

BULETIN ILMIAH LITBANG PERDAGANGAN

VOL.7 NO.2, DESEMBER 2013

ISSN: 2089-4287

PENGARAH:

Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan

PENANGGUNG JAWAB:

Sekretaris Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan
Kepala Pusat Data dan Informasi Perdagangan

DEWAN REDAKSI/EDITOR

Ketua: Ir. Tjahya Widayanti, MSc (*Domestic Trade*)

Wakil Ketua: Dr. Ir. Kasan, MM (*Foreign Trade*)

Anggota:

Dr. Tri Mardjoko, SH, MA (*International Trade*)

Dr. Masyhuri, APU (*Economic History*)

Dr. Wayan R. Susila, APU (*Trade and Agricultural Economics*)

Zamroni Salim, Ph.D (*International Trade and Development*)

Drs. M. Bashori Imron, MSi (*Media and Communication*)

MITRA BESTARI:

Prof. Dr. Abuzar Asra, MSc (*Trade and Poverty*)

Prof. Dr. Carunia Mulya Firdausy, MA (*Trade and Development*)

Dr. Choiril Maksum, MSc (*Domestic Trade*)

Dr. Ir. Hartoyo, MSc (*Consumers Protection and Trade Standards, Agricultural Economics*)

Prof. Dr. Rina Oktaviani (*International Trade – CGE Modelling*)

Prof. Drs. Sukarna Wiranta, MA (*Domestic Trade*)

Dr. Slamet Sutomo (*Domestic Trade*)

Prof. Zainudin Djafar, MA, Ph.D (*International Relationship*)

REDAKSI PELAKSANA:

Puspita Dewi, SH, MBA

Maulida Lestari, SE, ME

I Made Dodi Narindra, SE. M.SM

Reni K. Arianti, SP, MM

Asmirawati Ismail, ST

ALAMAT REDAKSI:

Sekretariat Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan

Kementerian Perdagangan, RI

Gedung Utama Lantai 3 dan 4

JL.M.I. Ridwan Rais No.5, Jakarta Pusat 10110

Telp. (021) 23528681

Fax. (021) 23528691

evalap-bppkp@kemendag.go.id

Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan dapat diakses melalui:

<http://www.kemendag.go.id/id/view/bulletin/8>

Terakreditasi

Berdasarkan SK. Kepala LIPI No.742/E/2012 tanggal 7 Agustus 2012
(Sertifikat No.494/AU2/P2MI-LIPI/08/2012)

Diterbitkan 2 kali dalam satu tahun (Juli dan Desember)

Oleh Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan
Kementerian Perdagangan

**BULETIN ILMIAH LITBANG PERDAGANGAN
VOL.7 NO.2, DESEMBER 2013**

DAFTAR ISI

PENGANTAR REDAKSI	iii
KINERJA EKSPOR MINYAK KELAPA SAWIT INDONESIA <i>Tuti Ermawati, Yeni Saptia</i>	129
THE IMPACT OF FINAL DEMAND OF INDONESIA'S EXPORTED PRODUCTS ON DOMESTIC INCOME AND EMPLOYMENT <i>Aditya P Alhayat</i>	149
DAMPAK PENURUNAN EKSPOR TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA <i>Tri Wibowo</i>	171
IMPLEMENTASI SISTEM RESI GUDANG PADA KOMODITI JAGUNG: STUDI KASUS DI KABUPATEN TUBAN, PROVINSI JAWA TIMUR <i>Nurlia Listiani, Bagas Haryotejo</i>	193
FASILITAS BEBAS BEA MASUK BAGI LEAST DEVELOPED COUNTRIES DAN MANFAATNYA BAGI INDONESIA <i>Adrian D. Lubis</i>	213
PENGARUH VARIABEL EKONOMI DAN NON EKONOMI TERHADAP IMPOR INDONESIA DARI ASEAN+6 MELALUI MODA TRANSPORTASI LAUT <i>Astari Ayuwangi, Widyastutik</i>	231

PENGANTAR REDAKSI

Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan yang terbit setiap semesternya merupakan salah satu media bagi Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan (BP2KP) untuk menyebar luaskan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukannya kepada seluruh *stakeholders*. Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan Volume 7 No. 2 Desember 2013 menampilkan enam tulisan yang mengangkat tema perdagangan dalam negeri maupun perdagangan luar negeri.

Adapun judul yang dimuat dalam buletin edisi kali ini adalah Kinerja Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia; *The Impact of Final Demand of Indonesia's Exported Products on Domestic Income and Employment*; Dampak Penurunan Ekspor Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja; Implementasi Resi Gudang (SRG) pada Komoditi Jagung: Studi Kasus di Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur; Fasilitas Bea Masuk Bagi *Least Developed Countries* dan Manfaatnya Bagi Indonesia; dan Pengaruh Variabel Ekonomi dan Non Ekonomi Terhadap Impor Indonesia dari ASEAN + 6 Melalui Moda Transportasi Laut.

Tulisan dalam Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan cukup beragam, namun tetap merupakan bagian dari sektor perdagangan ataupun sektor yang terkait perdagangan. Redaksi mengucapkan terima kasih kepada seluruh penulis yang telah berpartisipasi dalam buletin ini. Secara khusus, Redaksi juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. Drs. Sukarna Wiranta, MA; Prof. Dr. Abuzar Asra, MSc; Prof. Dr. Carunia Mulya Firdausy, MA; Prof. Dr. Rina Oktaviani; Prof. Zainudin Djafar, MA, Ph.D; Dr. Ir. Hartoyo, MSc; Dr. Slamet Sutomo; dan Dr. Choiril Maksum, MSc sebagai Mitra Bestari yang telah melakukan penelaahan terhadap naskah yang ada.

Akhir kata, semoga tulisan yang ada dalam Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan dapat menjadi referensi dan bahan masukan bagi para pembaca, bermanfaat bagi masyarakat, serta memberi kontribusi yang berarti terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang perdagangan maupun yang terkait perdagangan.

KINERJA EKSPOR MINYAK KELAPA SAWIT INDONESIA

The Export Performance of Indonesia's Palm Oil

Tuti Ermawati, Yeni Saptia

Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Jl. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Pusat,
tuti_ermawati@yahoo.com,
ni_tia04@yahoo.com

Naskah diterima: 30 September 2013

Disetujui diterbitkan: 22 November 2013

Abstrak

Kajian ini menganalisis kinerja ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel Oil* (PKO) Indonesia diantara negara-negara produsen kelapa sawit, dan kinerja ekspor CPO dan PKO Indonesia ke beberapa negara tujuan ekspor utama. Metode analisis yang digunakan adalah indeks *Revealed Comparative Advantage* (RCA) dan *Constant Market Share* (CMS). Berdasarkan hasil analisis RCA menunjukkan bahwa kinerja ekspor CPO dan PKO Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand, tetapi sama dengan Colombia. Sementara hasil dari analisis CMS, kinerja ekspor CPO dan PKO cenderung menurun dibandingkan dengan pertumbuhan ekspor seluruh produk dunia. Di samping itu, parameter dari efek komposisi produk, efek distribusi pasar maupun efek daya saing, masih banyak yang bernilai negatif. Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan daya saing dan kinerja ekspor baik CPO maupun PKO adalah kebijakan yang mendukung pengembangan ekspor CPO maupun PKO dengan mempertimbangkan daya saing hilirisasi industri sawit, peningkatan kualitas CPO dan PKO yang sesuai dengan standar negara yang menjadi tujuan ekspor.

Kata kunci: Daya Saing, Kinerja, Ekspor, *Crude Palm Oil*, *Palm Kernel Oil*

Abstract

The study analyzes the export performance of Indonesia's Crude Palm Oil (CPO) and Palm Kernel Oil (PKO) among palm oil producers and the performance of Indonesia's CPO and PKO exports in some major importing countries. The analytical methods used in this study are Revealed Comparative Advantage (RCA) and Constant Market Share (CMS) indices. Based on RCA analysis, the performance of Indonesia's CPO and PKO exports are lower than those of Malaysia and Thailand, but it is still similar to to Colombia. Meanwhile, the CMS analysis shows that the performance of Indonesia's CPO and PKO exports tend to decrease compared to export growth of all the world products. In spite of these performances, the parameters from the effect of product composition, market distribution and competitiveness are still negative. Several ways that the government should perform to increase the competitiveness and performance of Indonesia's CPO and PKO exports are supporting policy to the development of CPO and PKO exports by considering the competitiveness of downstreaming palm oil industries, and improving the quality of them in compliance with the standard applied by the export destination countries.

Keywords: Competitiveness, Performance, Export, *Crude Palm Oil*, *Palm Kernel Oil*

JEL Classification: F10, F11, F12, F13

PENDAHULUAN

Kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan yang mengalami pertumbuhan produksi yang cukup pesat dibandingkan dengan tanaman perkebunan lainnya di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian (2012), produksi kelapa sawit Indonesia sebesar 17,54 juta ton pada tahun 2008 menjadi 23,52 juta ton pada tahun 2012, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,7% per tahun pada periode 2008-2012. Sementara karet hanya mengalami pertumbuhan produksi sebesar 2,95%, lada 2,33%, cengkeh, 2,69%, dan kakao sebesar 3,11%. Dengan tingkat produksi kelapa sawit yang cukup tinggi maka tidaklah mengherankan jika Indonesia menjadi salah satu negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia.

Kelapa sawit yang diproduksi di Indonesia sebagian kecil dikonsumsi di dalam negeri sebagai bahan mentah dalam pembuatan minyak goreng, *oleochemical*, sabun, *margarine*, dan sebagian besar lainnya diekspor dalam bentuk minyak sawit atau *Crude Palm Oil* (CPO) dan minyak inti sawit atau *Palm Kernel Oil* (PKO). Dari total kelapa sawit yang dihasilkan, menurut Kementerian Keuangan (2011), ekspor CPO pada tahun 2010 sebesar 50%, sementara *Crude Palm Kernel Oil* (CPKO) mencapai 85% dari total minyak sawit yang dihasilkan oleh Indonesia. PKO mempunyai produk turunan yang relatif lebih sedikit dibandingkan dengan CPO.

Pada tahun 2004, nilai ekspor CPO Indonesia ke dunia sebesar USD 1,06 miliar atau 1,74% dari total ekspor Indonesia, dan terus mengalami perkembangan yang signifikan pada tahun 2012 menjadi USD 8,42 miliar

atau 4,43% dari total ekspor Indonesia. Nilai ekspor PKO Indonesia ke dunia pada tahun 2004 sebesar USD 385 juta atau sebesar 0,53% dari total ekspor produk Indonesia, dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2011 nilai eksportnya menjadi USD 1,64 miliar atau sebesar 0,80% dari total ekspor Indonesia (UN *Comtrade*, 2012).

Peningkatan ekspor komoditas ini tidak terlepas dari semakin tingginya tingkat produktivitas. Sebagaimana Casson (1999) menjelaskan bahwa peningkatan produksi kelapa sawit bisa disebabkan beberapa faktor antara lain efisiensi dan ketersediaan lahan panen, biaya produksi yang rendah, pasar domestik dan internasional yang menjanjikan, serta kebijakan pemerintah yang mendorong pengembangan industri kelapa sawit. Negara-negara yang menjadi tujuan utama ekspor CPO dan PKO Indonesia adalah Cina, India, Pakistan, Belanda, Malaysia, dan Singapura.

Selain Indonesia, negara lain yang menjadi produsen kelapa sawit terbesar di dunia antara lain Malaysia, Thailand, Nigeria, dan Colombia. Pada tahun 2011, Indonesia mampu menghasilkan 23.900 ribu ton atau 40,27% dari total produksi minyak sawit dunia sebesar 50.894 ribu ton, sementara Malaysia 40,26%, Thailand 2,78%, Nigeria 2,03%, dan Colombia 1,80% (Kementerian Pertanian, 2012). Dengan tingkat produksi yang tidak terlalu jauh dari Indonesia, Malaysia sangat berpotensi menjadi pesaing utama Indonesia. Berangkat dari kondisi tersebut, maka tujuan dari tulisan ini adalah memberikan gambaran bagaimana posisi daya saing Indonesia di antara negara-negara

produsen kelapa sawit serta kinerja dari produk kelapa sawit khususnya produk CPO dan PKO Indonesia di beberapa negara pengimpor terbesar kelapa sawit dari Indonesia. Alat analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah *Revealed Comparative Advantage* (RCA) dan *Constant Market Share* (CMS).

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam konsep keunggulan bersaing dalam perdagangan setiap negara diharapkan untuk mengkhususkan diri dalam memproduksi barang-barang yang diproduksi dengan biaya paling murah (Asheian dan Ebrahimi, 1990, seperti dikutip oleh Suprihatini, 2005). Menurut Salvatore (2007) keunggulan komparatif merupakan biaya marginal tenaga kerja suatu negara untuk menghasilkan produk maupun jasa lebih rendah dibandingkan dengan tenaga kerja di negara lain. Hal ini menunjukkan produktivitas tenaga kerja untuk semua produk dapat dihasilkan di negara tertentu. Konsep ini memiliki perbedaan dengan keunggulan absolut Adam Smith dimana keunggulan absolut lebih mengacu pada kemampuan tenaga kerja di suatu negara untuk menghasilkan barang tertentu dengan biaya marginal absolut lebih rendah dari mitra dagangnya (Salvatore, 2007).

Teori keunggulan komparatif ini kemudian disempurnakan lagi oleh Haberler pada tahun 1936 dengan menggunakan teori biaya imbalan (*Opportunity Cost Theory*). Berdasarkan teori tersebut, biaya produksi untuk menghasilkan suatu produk dengan cara mengorbankan jumlah produk kedua untuk mendapatkan sumber daya

yang cukup dalam memproduksi satu unit tambahan produk pertama. Artinya negara yang memiliki keunggulan komparatif adalah negara yang memiliki *opportunity cost* lebih rendah dalam menghasilkan suatu produk (Salvatore, 1997). Selanjutnya teori keunggulan komparatif yang lebih modern adalah teori Hecksler-Ohlin. Teori ini menjelaskan bahwa setiap negara akan melakukan spesialisasi produk, mengeksport komoditas yang banyak menyerap faktor produksi yang relatif murah dan melimpah di negara tersebut, serta mengimpor komoditas yang banyak menyerap faktor produksi yang relatif mahal dan langka di negara tersebut (Salvatore, 1997).

Keunggulan komparatif kadang diartikan sebagai daya saing, sebagaimana yang diungkapkan oleh Sudaryanto dan Simatupang (1993) yang seperti dikutip oleh Saptana (2010), bahwa keunggulan komparatif sebagai ukuran daya saing yang akan dicapai ketika perekonomian tidak mengalami distorsi. Adapun yang menjadi penyebab terjadinya distorsi pasar adalah: kebijakan pemerintah baik langsung (pajak), maupun tidak langsung (misalnya regulasi), adanya ketidak sempurnaan pasar yang diakibatkan oleh monopoli ataupun monopsoni domestik (Saptana, 2010).

Ada beberapa kajian yang telah dilakukan terkait dengan daya saing produk perkebunan di Indonesia, antara lain hasil kajian yang dilakukan oleh Suprihartini (2005) tentang posisi daya saing teh Indonesia di pasar dunia dengan menggunakan CMS menunjukkan bahwa pertumbuhan ekspor teh Indonesia masih jauh di

bawah pertumbuhan ekspor teh dunia, sedangkan negara-negara yang memiliki pengaruh distribusi pasar yang positif dari produk teh adalah Inggris, Vietnam, Bangladesh, dan Jerman. Sementara posisi daya saing teh Indonesia lebih lemah dibandingkan negara-negara produsen teh lainnya.

Poramacom (2002) juga pernah mengkaji daya saing produk karet Thailand dengan menggunakan model RCA dan CMS selama tahun 1991-1993 dan 1995-1996. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa keunggulan komparatif karet alam negara Thailand lebih kecil dibandingkan dengan Indonesia di pasar Amerika Serikat. Di sisi lain, berdasarkan analisis CMS selama periode 1997-1998 dan 1995-1996, pertumbuhan ekspor aktual Thailand menunjukkan angka negatif yang berasal dari efek pertumbuhan standar, efek pasar, dan efek kompetitif. Artinya meskipun Thailand merupakan eksportir utama dunia untuk produk karet alam, Thailand menghadapi pasar kompetitif yang tinggi.

Simeh (2004) menghitung indeks RCA untuk beberapa minyak nabati salah satunya minyak sawit Indonesia dan Malaysia. Hasil RCA tersebut mengindikasikan bahwa RCA minyak sawit Indonesia mengalami penurunan dari 3.705 tahun 1990 menjadi 2.474 pada tahun 2002. Sementara, nilai RCA minyak sawit Malaysia sebesar 9.099 pada tahun 2002 mengindikasikan bahwa minyak kelapa sawit Malaysia memiliki keunggulan komparatif terhadap minyak sawit Indonesia.

Prajogo, dan Mardianto (2004) mengkaji analisis komparasi antar negara ASEAN terkait dengan

pertumbuhan ekspor produk pertanian, efek komposisi produk, distribusi pasar dan daya saing terhadap ekspor produk pertanian ke kawasan ASEAN dengan menggunakan metode analisis CMS dengan periode waktu 1997-2001. Kesimpulan dari hasil kajiannya adalah pada periode 1997-1999 pertumbuhan ekspor Indonesia ke kawasan paling tinggi di antara negara-negara ASEAN lainnya, komposisi produk ekspor Indonesia terbaik, daya saing ekspor Indonesia paling kuat, namun distribusi pasar ekspornya masih kalah dibandingkan dengan Singapura. Sementara pada periode tahun 1999-2001 pertumbuhan ekspor Indonesia ke kawasan ASEAN mengalami penurunan, begitu juga dengan komposisi produk, distribusi pasar serta daya saing ekspor Indonesia melemah.

Studi lain yang dilakukan oleh Haque, Sultana dan Momen (2013) untuk mengetahui kinerja produk telekomunikasi di Malaysia dengan menggunakan RCA dan CMS. Hasil studi menunjukkan untuk produk komunikasi khusus perekam suara (SICT 763), nilai RCA nya mengalami penurunan pada tahun 2000-2011. Pada periode tahun yang sama hasil CMS menunjukkan bahwa produk SICT 763 memiliki efek kompetitif yang sangat besar.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Terdapat beberapa metode dalam mengukur tingkat daya saing suatu produk diantaranya adalah CMS dan RCA. Untuk mengukur tingkat daya saing industri suatu negara dengan pendekatan CMS berdasarkan pemahaman bahwa laju pertumbuhan

ekspor suatu negara dibandingkan laju pertumbuhan rata-rata dunia dijabarkan menjadi tiga faktor. Sedangkan RCA yang pertama kali dikembangkan oleh Balassa (1965) digunakan untuk mengukur keunggulan komparatif suatu negara. RCA merupakan indeks yang menjelaskan perbandingan antara pangsa pasar suatu produk dalam ekspor total suatu negara dengan pangsa pasar produk yang sama dalam total ekspor dunia. Indeks RCA dengan nilai yang sama dengan atau lebih dari 1 ($RCA \geq 1$) mengindikasikan bahwa negara tersebut memiliki daya saing suatu produk di atas rata-rata dunia. Sebaliknya, jika nilai indeks kurang dari 1 ($RCA < 1$) maka daya saing suatu produk di negara tersebut di bawah rata-rata dunia (Tambunan, 2004). Rumus dari nilai RCA sebagai berikut:

$$RCA = \frac{X_{ik} / X_i}{X_{wk} / X_w}$$

Dimana : X_{ik} = ekspor produk CPO/
PKO negara i
 X_{wk} = ekspor produk CPO/
PKO dunia
 X_i = ekspor semua produk
negara i
 X_w = ekspor semua produk
dunia

Sementara indeks RCA adalah perbandingan antara nilai RCA saat ini dengan nilai RCA tahun sebelumnya, sehingga rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks RCA} = RCA_t / RCA_{t-1}$$

Menurut Simonis (2009), analisis CMS adalah metode dekomposisi yang

diterapkan pertama kalinya dalam arus perdagangan internasional. Penggunaan Model CMS dilatarbelakangi adanya kemungkinan bahwa ekspor suatu negara selama periode waktu tertentu mengalami perubahan terhadap dunia sebagai pertumbuhan standar. Menurut De Vries (1967) dan Richardson (1971) seperti dikutip oleh Arshad, M., Fatimah dan A. Radam (1997), model CMS menjelaskan kinerja pertumbuhan ekspor menjadi beberapa komponen antara lain ukuran pasar, distribusi pasar, dan daya saing. Sementara, menurut Suprihartini (2005) terdapat empat terminologi pada model CMS yaitu (1) pertumbuhan standar; (2) pengaruh komposisi komoditas; (3) pengaruh distribusi pasar; (4) pengaruh persaingan. Berdasarkan pada formulasi umum yang digunakan Tyers et al, (1985) dalam Suprihartini (2005), persamaan yang digunakan analisis CMS ini adalah:

$$\text{Pertumbuhan Standar } g = \frac{E(t) - E(t-1)}{E(t-1)}$$

Parameter pertumbuhan standar menunjukkan standar umum pertumbuhan ekspor produk negara-negara di dunia. Ekspor negara-negara pesaing Indonesia dapat dilihat melalui analisis pertumbuhan ini. Jika pertumbuhan standar ekspornya lebih tinggi mengindikasikan kinerja ekspor Indonesia lebih baik. Begitu pula sebaliknya, jika pertumbuhan ekspor standar lebih rendah dibanding pertumbuhan ekspor Indonesia ke negara-negara pengimpor menunjukkan performa ekspor Indonesia lebih buruk.

Efek Komposisi Produk

$$\frac{\sum_i (g_i - g) E_{(t-1)i}}{E_{(t-1)}}$$

Efek komposisi produk menunjukkan apakah suatu negara telah berkonsentrasi pada pasar komoditas yang berkembang pesat. Parameter efek komposisi produk ini dapat bernilai positif maupun negatif. Parameter positif menunjukkan bahwa negara eksportir (misalnya Indonesia) mengeksport produk ke negara yang memiliki pertumbuhan impor produk yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan impor kelompok produk tersebut. Sebagai contoh, jika pertumbuhan ekspor produk CPO Indonesia ke negara pengimpor lebih tinggi dari pada pertumbuhan impor semua produk oleh negara pengimpor, artinya efek komposisi produk CPO Indonesia di negara pengimpor tersebut akan positif. Demikian halnya apabila terjadi sebaliknya, maka efek komposisi produknya bernilai negatif.

Efek Distribusi Pasar

$$\frac{\sum_i \sum_j (g_{ij} - g_i) E_{(t-1)ij}}{E_{(t-1)}}$$

Efek distribusi pasar mengukur kinerja ekspor dengan menganalisa keuntungan atau kerugian pada ekspor negara yang menjadi perhatian (misalnya Indonesia) sebagai akibat dari adanya perubahan pada ukuran relatif pasar ekspor. Parameter efek distribusi pasar dapat bernilai positif atau negatif. Parameter bernilai positif jika negara eksportir (misalnya Indonesia) untuk mendistribusikan pasarnya ke pusat pertumbuhan

permintaan. Contohnya, apabila ekspor CPO maupun PKO Indonesia ke negara dengan pertumbuhan impor minyak sawit dari Indonesia lebih tinggi, maka efek distribusi pasar akan positif. Jika sebaliknya, maka efek distribusi pasar akan negatif.

Efek Daya Saing

$$\frac{\sum_i \sum_j (E_{(t)ij} - E_{(t-1)ij} - g_{ij} E_{(t-1)ij})}{E_{(t-1)}}$$

Dimana;

$$g = \frac{W_{(t)} - W_{(t-1)}}{W_{(t-1)}}$$

$$g_i = \frac{W_{(t)i} - W_{(t-1)i}}{W_{(t-1)i}}$$

$$g_{ij} = \frac{W_{(t)ij} - W_{(t-1)ij}}{W_{(t-1)ij}}$$

$E_{(t)}$ = Total ekspor semua produk Indonesia pada tahun (t)

$E_{(t-1)}$ = Total ekspor semua produk Indonesia pada tahun (t-1)

$E_{(t)i}$ = Total ekspor produk CPO/PKO Indonesia pada tahun (t)

$E_{(t)j}$ = Total ekspor semua produk ke negara j pada tahun (t)

$E_{(t)ij}$ = Total ekspor produk CPO/PKO Indonesia ke negara j pada tahun (t)

$W_{(t)}$ = Total ekspor semua produk dunia pada tahun (t)

$W_{(t)i}$ = Total ekspor produk CPO/PKO dunia pada tahun (t)

$W_{(t)j}$ = Total ekspor semua produk dunia ke negara j pada tahun (t)

$W_{(t)ij}$ = Total ekspor produk CPO/PKO dunia ke negara j pada tahun (t)

$W_{(t-1)}$ = Total ekspor semua produk dunia pada tahun (t-1)

Parameter daya saing menunjukkan kenaikan atau penurunan pangsa ekspor Indonesia secara relatif terhadap ekspor standar setelah menghitung perubahan komposisi produk dan distribusi pasar. Sebagaimana Richardson (1971) yang mengemukakan bahwa efek daya saing mengindikasikan pertumbuhan ekspor yang timbul dari adanya perubahan pada pangsa pasar ekspor. Asumsinya adalah bahwa efek daya saing yang didasarkan pada perubahan pangsa pasar ekspor negara pengekspor (misalnya Indonesia) di negara-negara pengimpor untuk produk tertentu hanya dapat terjadi selama periode analisis sebagai respon terhadap perubahan harga relatif produk asal Indonesia. Jika parameter efek daya saing adalah positif, berarti Indonesia adalah kuat di antara pesaing lainnya. Sebaliknya jika yang negatif yang berarti Indonesia lemah (Hadi, 2004).

Analisis CMS biasa digunakan untuk menganalisis kinerja ekspor dengan pendekatan berbagai macam produk, akan tetapi kajian ini menggunakan metode tersebut hanya untuk produk kelapa sawit khususnya CPO dan PKO. Disamping metode CMS, tulisan ini juga memaparkan daya saing ekspor CPO dan PKO Indonesia dibandingkan dengan negara-negara pengekspor lainnya dengan menggunakan metode analisis RCA.

Data

Data yang digunakan dalam studi berupa data statistik ekspor-impor produk kelapa sawit yang diperoleh dari database *United Nations Commodity Trade Statistics* (UNCOMTRADE). Produk kelapa sawit yang dianalisis

dalam kajian ini lebih dikhususkan pada dua produk kelapa sawit antara lain nilai ekspor CPO (HS 1996 Kode 151110) dan nilai ekspor PKO (HS 1996 Kode 151321). Kinerja ekspor Indonesia untuk produk CPO dan PKO dengan metode CMS akan dibagi menjadi dua periode yakni (2005-2008) sebelum terjadinya krisis ekonomi global pada tahun 2008 dan periode (2009-2012) pasca terjadinya krisis ekonomi global.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Revealed Comparatif Advantage

Berdasarkan hasil perhitungan indeks *Analisis Revealed Comparatif Advantage* (RCA) dari 4 negara yang menjadi produsen utama minyak kelapa sawit dunia menunjukkan bahwa negara yang memiliki kinerja ekspor tertinggi adalah Malaysia dengan indeks RCA rata-rata di atas 1 untuk CPO (1,04) dan PKO (1,08). Artinya Malaysia mempunyai daya saing yang cukup bagus dibandingkan dengan Indonesia, Colombia, dan Thailand. Sementara untuk Indonesia, indeks RCA rata-rata tahun 2004-2012 masih di bawah 1 yaitu CPO sebesar 0,98 dan PKO 0,94 (Tabel 1). Dengan demikian, Indonesia dapat dikatakan masih belum optimal dalam memanfaatkan keunggulan komparatif yang dimilikinya, terutama lahan yang luas, biaya tenaga kerja serta biaya input yang rendah. Sementara Malaysia yang areal perkebunan sawitnya terbatas mampu berekspansi dengan melakukan investasi-investasi di negara lain termasuk Indonesia.

Menurut Marks, Larson dan Pomeroy (1998), Malaysia telah menjadi pemasok utama di pasar global

dikarenakan Malaysia memiliki kebijakan orientasi ekspor yang dapat mendorong dan mengembangkan perusahaan untuk mengatasi terjadinya in efisiensi, sehingga biaya produksi yang lebih tinggi di Malaysia dibandingkan Indonesia tidak menjadi masalah yang signifikan bagi perusahaan. Argumen tersebut diperkuat juga dengan pernyataan Gumbira (2006) seperti dikutip oleh Gumbira (2010) yang menyatakan bahwa Malaysia lebih unggul dibandingkan dengan Indonesia dalam kancah perdagangan internasional kelapa sawit karena faktor dukungan koordinasi dan konsolidasi kebijakan pemerintah yang lebih baik, kondisi investasi swasta yang kondusif dan penguasaan teknologi dan pengetahuan yang lebih maju. Upaya pemerintah Malaysia untuk memperluas ekspor minyak sawit merupakan bagian dari upaya restrukturisasi ekonomi guna mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Sedangkan di Indonesia, kebijakan pemerintahannya dalam mengembangkan kelapa sawit lebih fokus pada intervensi substitusi impor guna menstabilkan harga domestik minyak goreng. Namun upaya tersebut kurang berhasil dalam menciptakan

lingkungan yang dinamis guna mendorong pengembangan produk baru dan keterkaitannya ke depan.

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata RCA Thailand untuk produk CPO pada periode yang sama juga menunjukkan angka $RCA > 1$, artinya Thailand memiliki daya saing produk CPO yang lebih bagus dibandingkan dengan Indonesia. Meskipun negara ini termasuk baru menyandang gelar sebagai negara pengeksport kelapa sawit setelah Indonesia dan Malaysia, namun kinerja ekspornya cukup baik. Meningkatnya kinerja daya saing Thailand tersebut terkait dengan semakin tingginya permintaan dunia khususnya pasar Uni Eropa terhadap produk CPO Thailand. Hal ini dimungkinkan, mengingat Thailand selain memiliki ketersediaan lahan yang masih luas untuk ditanami kelapa sawit, Thailand juga mampu memasok CPO yang bersertifikasi sesuai dengan kriteria RSPO. Semakin baiknya performa ekspor Thailand dalam hal produk kelapa sawit merupakan tantangan bagi Indonesia untuk lebih giat dalam meningkatkan daya saing produk CPO maupun PKO di pasar internasional.

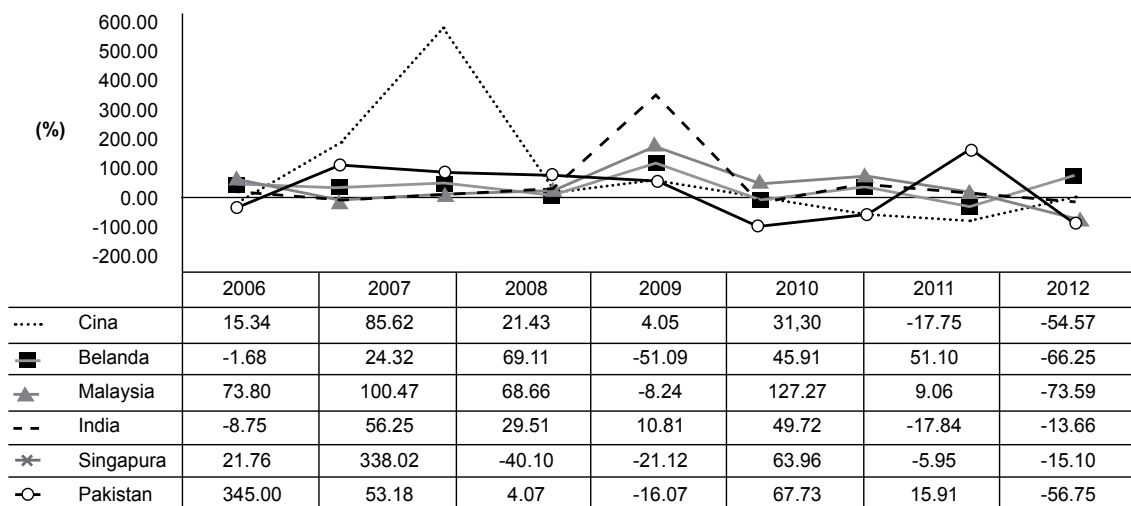
Tabel 1. Nilai Indeks RCA Negara Pengeksport CPO dan PKO Terbesar Dunia

Tahun	Indonesia		Malaysia		Colombia		Thailand	
	CPO	PKO	CPO	PKO	CPO	PKO	CPO	PKO
2004	1,10	0,99	0,82	0,99	1,65	0,98	NA	1,03
2005	0,97	1,01	0,99	0,81	0,71	0,89	NA	0,89
2006	0,94	1,08	1,27	0,76	0,76	0,80	NA	0,96
2007	1,08	0,96	0,81	1,63	1,24	0,89	1,26	0,63
2008	1,01	0,98	0,92	0,88	0,76	0,99	1,09	1,12
2009	0,95	0,97	1,05	0,94	0,47	0,66	0,18	0,24
2010	0,92	0,91	1,01	0,97	0,32	0,96	0,89	1,33
2011	0,78	0,82	1,27	1,51	2,02	1,30	4,61	1,11
2012	1,08	0,79	1,24	1,22	0,93	1,32	0,68	1,18
<i>Rata-rata</i>	<i>0,98</i>	<i>0,94</i>	<i>1,04</i>	<i>1,08</i>	<i>0,98</i>	<i>0,98</i>	<i>1,45</i>	<i>0,94</i>

Sumber: Hasil perhitungan penulis

Secara lebih rinci terlihat bahwa kinerja CPO Indonesia pada tahun 2004-2012 mengalami perkembangan yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2007-2008, kinerja ekspor CPO Indonesia cukup bagus dengan nilai indeks RCA di atas 1, dan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2005-2006 karena adanya kenaikan permintaan CPO yang cukup signifikan dari Pakistan, Singapura, India, Malaysia, dan Belanda sehingga nilai ekspor CPO Indonesia meningkat (Gambar 2). Namun pada tahun 2009, kinerja ekspor mulai menurun dengan nilai indeks RCA 0,95. Hal ini diduga akibat adanya penurunan nilai ekspor CPO dari beberapa negara

terutama Pakistan (-83,45), dan juga India (20,74) (Gambar 2), padahal India selama ini menjadi negara pengimpor terbesar CPO Indonesia dimana pada tahun 2008 nilai ekspor CPO nya mencapai USD 3,3 miliar, tetapi pada tahun 2009 menjadi USD 2,6 milyar. Ada banyak faktor yang mengakibatkan terjadinya penurunan nilai ekspor CPO pada tahun 2009, salah satunya adalah melemahnya harga CPO di pasaran dunia, pada tahun 2009 harga CPO turun sebesar 25,36% dari USD 862,94 per metrik ton pada tahun 2008 menjadi USD 644,07 per metrik ton pada tahun 2009 (Tabel 2).



Gambar 1. Pertumbuhan Nilai Ekspor Crude Palm Oil (CPO) Indonesia ke 6 Negara, 2004-2012

Sumber: Hasil perhitungan penulis

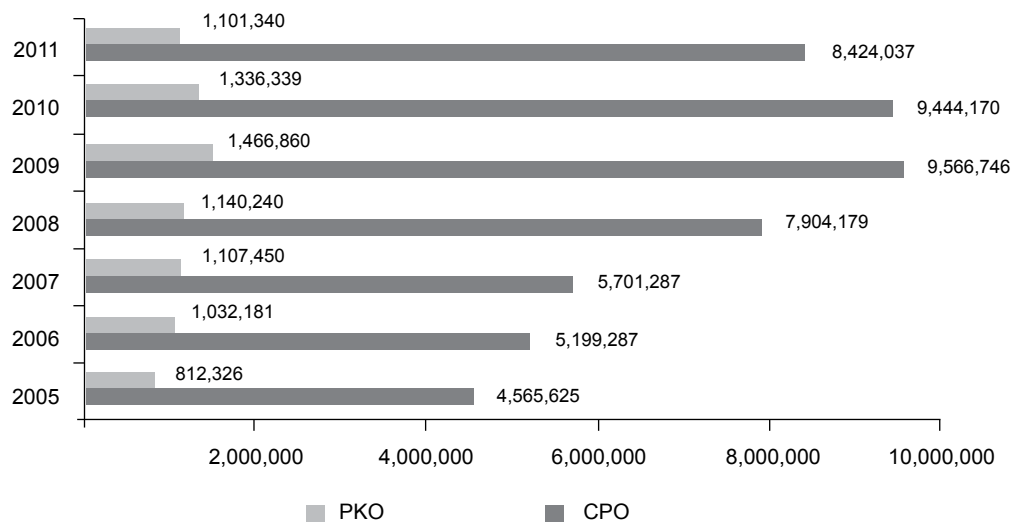
Pada tahun 2011, harga CPO mulai menguat menjadi USD 1076,50 per metrik ton atau naik 25,18% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun hal tersebut belum cukup mampu menaikkan kinerja ekspor CPO bahkan nilai indeks RCA CPO pada tahun 2011 sebesar 0.78 yang berarti bahwa kinerja ekspor CPO tahun tersebut terendah sepanjang 9 tahun terakhir (Tabel 1). Hal ini terjadi

karena pada tahun tersebut volume ekspor CPO Indonesia mengalami penurunan sebesar -10,8% dari 9,44 juta ton pada tahun 2010 menjadi 8,42 juta ton pada tahun 2011 (Gambar 2), sehingga nilai ekspor CPO Indonesia menurun cukup besar terutama dari Cina (-68,41%) dan Belanda (-24,85%) (Gambar 1).

Penurunan volume ekspor terjadi disebabkan permintaan CPO dari

beberapa negara menurun, diantaranya Cina yang mengurangi impornya karena pertumbuhan ekonomi Cina yang masih melambat, kemudian Pakistan yang mengurangi impornya pada tahun 2011 karena tertundanya penyelesaian *Preferential Trade Agreement* (PTA) yaitu perjanjian perdagangan antara Indonesia dengan Pakistan dimana

di dalam perjanjian ada kesepakatan penghapusan bea masuk oleh kedua negara terhadap produk unggulan masing-masing. Dalam PTA yang mulai berlaku 1 September 2013, Indonesia mendaftarkan CPO dan Pakistan memasukkan jeruk kino sebagai komoditas yang bebas bea masuk.



Gambar 2. Volume Ekspor CPO dan PKO Indonesia, 2005-2011 (dalam Ton)

Sumber: Badan Pusat Statistik (2005-2011)

Pada tahun 2012 kinerja ekspor CPO Indonesia di pasar dunia kembali mengalami peningkatan dengan nilai indeks RCA sebesar 1,08. Meskipun terjadi penurunan nilai ekspor CPO ke beberapa negara, namun adanya peningkatan permintaan CPO yang tinggi dari Belanda mampu membuat kinerja ekspor CPO Indonesia meningkat. Hal ini terjadi karena ekspor CPO ke Belanda nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai ekspor ke Singapura dan Malaysia sehingga

perubahan permintaan CPO dari negara tersebut sangat berpengaruh terhadap kinerja ekspor CPO Indonesia. Selain Belanda, India merupakan negara tujuan ekspor CPO Indonesia dengan nilai ekspor yang cukup besar, namun di tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 25,90% dari USD 4,47 Miliar pada tahun 2011 menjadi USD 3,3 Miliar pada tahun 2012, hal ini diakibatkan India mengalami inflasi dan adanya rencana kenaikan pajak impor *refined vegetable oils*.

Tabel 2. Perkembangan Harga CPO dan PKO Menurut CIF Rotterdam, 2004-2012.

Tahun	CPO (USD Per Metrik Ton)	Perubahan CPO (%)	PKO (USD Per Metrik Ton)	Perubahan PKO (%)
2004	434,72		648,08	
2005	367,69	-15,42	626,98	-3,26
2006	416,81	13,36	581,10	-7,32
2007	719,12	72,53	888,46	52,89
2008	862,94	20,00	1129,50	27,13
2009	644,07	-25,36	700,00	-38,03
2010	859,94	33,52	1185,75	69,39
2011	1076,50	25,18	1649,08	39,08
2012	939,83	-12,70	1111,08	-32,62

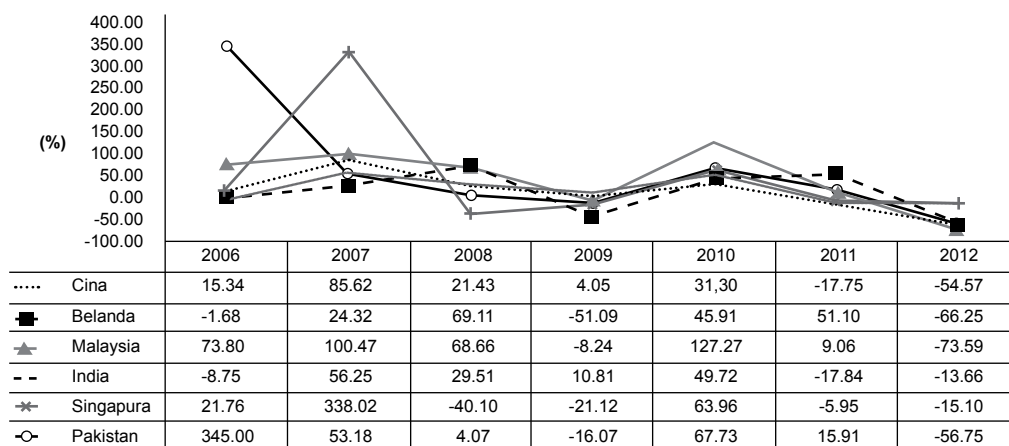
Sumber: Index Mundi (2004-2012)a dan Index Mundi (2004-2012)b, diolah oleh penulis

Kinerja produk PKO Indonesia dengan nilai indeks RCA di atas 1 ($RCA > 1$) hanya pada tahun 2005-2006. Sedangkan pada tahun 2007-2012 indeks RCA produk PKO mengalami penurunan menjadi kurang dari 1 ($RCA < 1$). Menurunnya kinerja ekspor PKO pada periode tersebut diduga kuat karena adanya penurunan nilai ekspor dari beberapa negara yang menjadi tujuan utama ekspor PKO, bahkan pada tahun 2012 penurunan permintaan lebih dari 50% terutama dari Cina, Belanda, Malaysia, dan Pakistan (Gambar 3).

Rendahnya volume permintaan negara-negara importir terhadap produk PKO Indonesia dimungkinkan juga karena harganya yang terlampaui tinggi dibandingkan produk CPO (Tabel 3). Berdasarkan Tabel 3 tampak bahwa harga PKO mengalami tren yang fluktuatif. Pada tahun 2004 harga PKO sebesar USD 648,08 per metrik ton cenderung mengalami penurunan 10% menjadi USD 581, 10 per metrik ton

pada tahun 2006, kemudian kembali meningkat menjadi 1129,50 per metrik ton pada tahun 2007.

Faktor lain penyebab menurunnya kinerja ekspor PKO khususnya pada tahun 2009-2012, dimungkinkan karena dampak krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008. Adanya krisis *financial global* yang terjadi pada pertengahan tahun 2008 menyebabkan terdepresiasi nilai mata uang yang tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan di beberapa negara importir kelapa sawit sehingga menyebabkan daya beli masyarakatnya pada umumnya mengalami penurunan. Akibatnya, pertumbuhan nilai ekspor PKO Belanda yang tren pada awalnya meningkat menjadi menurun hingga 51,09% pada tahun 2009. Begitu pula dengan negara Singapura, Malaysia dan Pakistan tren pertumbuhan nilai ekspor menurun menjadi 26,12%, 8,24% dan 16,07% di tahun yang sama.



Gambar 3. Pertumbuhan Nilai Ekspor PKO Indonesia ke 6 Negara, 2004-2012

Sumber: Hasil perhitungan penulis

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa produk PKO merupakan potensi besar bagi Indonesia untuk memperoleh keuntungan ekonomi yang tinggi dalam mengekspor PKO karena memiliki nilai jual yang cukup tinggi dibandingkan CPO. Namun, mahalnya harga produk PKO di pasaran internasional menyebabkan permintaan dunia akan produk PKO ini tidak sebanyak CPO. Secara umum, daya saing ekspor CPO maupun PKO Indonesia masih di bawah Malaysia. Kinerja ekspor Malaysia yang lebih baik dibanding dengan negara-negara pengekspor minyak sawit lainnya dikarenakan kebijakan pemerintah Malaysia konsisten dalam mendukung ekspor minyak sawitnya dengan membebaskan secara penuh pajak komoditas CPO. Sementara di Indonesia, kebijakan pajak ekspor yang diberlakukan pada produk minyak sawit sebagai upaya untuk menstabilkan harga minyak goreng justru cenderung “menggemukkan” keuntungan para *rent seeker* sehingga merugikan para produsen, pengolah dan konsumen (Marks, Larson dan Pomeroy, 1998). Namun demikian, posisi Indonesia yang

saat ini masih menjadi produsen terbesar kelapa sawit di dunia merupakan peluang dan tantangan ke depan dalam memaksimalkan potensi yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan kinerja dan daya saing ekspor minyak kelapa sawitnya.

Analisis Contant Market Share

Berdasarkan hasil perhitungan *Contant Market Share* (CMS) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekspor seluruh produk, CPO, maupun PKO Indonesia ke dunia lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan ekspor seluruh produk dunia (pertumbuhan standar) pada tahun 2005-2008. Hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia banyak mengambil keuntungan dari adanya pertumbuhan perdagangan dunia baik CPO maupun PKO. Permintaan dunia yang cukup tinggi terhadap minyak sawit telah mampu digunakan oleh Indonesia dalam meningkatkan kinerja ekspor CPO maupun PKO nya. Selain itu, perkembangan kesepakatan AFTA telah menjadi stimulus dalam meningkatkan perdagangan ekspor Indonesia.

Tabel 3. Pertumbuhan Standar dan Ekspor Seluruh Produk, CPO, dan PKO Indonesia Ke Dunia, 2005-2008 dan 2009-2012

Komponen	2005-2008	2009-2012
Pertumbuhan Standar Seluruh Produk	0,15	0,02
Pertumbuhan Ekspor Seluruh Produk Indonesia	0,18	0,11
Pertumbuhan Standar CPO	0,08	0,08
Pertumbuhan Ekspor CPO Indonesia	0,50	0,08
Pertumbuhan Standar PKO	0,31	0,01
Pertumbuhan Ekspor PKO Indonesia	2,70	-0,03

Sumber: Hasil perhitungan penulis

Pada periode 2009-2012, pertumbuhan ekspor seluruh produk Indonesia (0,11) masih lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan standar (0,02). Namun, adanya krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2008 sedikit berpengaruh terhadap permintaan ekspor CPO Indonesia sehingga pada periode 2009-2012 pertumbuhan ekspor CPO Indonesia (0,08) sama dengan pertumbuhan standar CPO (Tabel 3). Selain itu, diduga beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan bea keluar periode 2009-2012 sedikit banyak berpengaruh terhadap kinerja ekspor CPO di periode tersebut.

Kebijakan tersebut diantaranya adalah Peraturan Menteri Keuangan No.128/PMK.011/2011 tentang penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar menggantikan Peraturan Menteri Keuangan No.67/PMK.011/2010. Dalam perkembangannya, keberadaan Permen tersebut dianggap oleh banyak kalangan tidak efektif dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri hilir kelapa sawit di dalam negeri karena kedepannya diharapkan Indonesia tidak hanya mengekspor minyak kelapa sawit mentah, melainkan produk turunannya yang memiliki nilai tambah. Pada tahun

2012 pemerintah menerbitkan kebijakan baru yakni PMK No. 75/PMK.011/2012 yang menetapkan tarif bea keluar atas kelapa sawit, CPO serta produk turunannya dan membagi jenis barang yang dikenakan bea keluar dalam lima kelompok, sesuai dengan jenjang hilirisasi produk kelapa sawit, CPO, dan turunannya (Kementerian Keuangan, 2013). Indonesia harus berjuang cukup ekstra jika ingin memenangkan pasar CPO dunia karena pada periode ini juga terjadi penurunan permintaan CPO dari beberapa negara akibat perlambatan ekonomi yang terjadi di negara tujuan ekspor.

Selanjutnya, pertumbuhan ekspor PKO Indonesia pada periode 2009-2013 nilainya jauh lebih rendah (-0,03) dibandingkan dengan pertumbuhan standar PKO dunia (0,01). Pertumbuhan ekspor PKO yang negatif tersebut diduga karena faktor komposisi produk PKO yang di ekspor Indonesia kurang mengikuti kebutuhan pasar sebagaimana yang tercermin dari angka efek komposisi produk PKO Indonesia di periode yang sama bertanda negatif (-0,00004).

Dilihat dari efek komposisi komoditasnya, hasil perhitungan menunjukkan bahwa efek komoditas untuk PKO dan CPO di kedua periode

negatif (Tabel 3). Kontribusi dari komposisi produk CPO maupun PKO Indonesia di pasar internasional pada periode tersebut masih rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia kurang cermat dalam mengambil peluang ekspor produk sawit dengan memperhatikan pertumbuhan impor CPO dan PKO di negara-negara pengimpor menurut komposisi produk. Kondisi demikian tidak mengherankan, sebab dibentuknya sertifikasi *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) sebagai upaya membendung penolakan minyak sawit di pasar Eropa, ternyata kurang mendapat respon dari para pengusaha di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa pengusaha yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Kepala Sawit Indonesia (GAPKI) merasa bahwa sertifikasi RSPO kurang memberikan banyak keuntungan bagi pihak Indonesia sebagai produsen kelapa sawit dimana *bargaining position* dari pembeli lebih kuat dibandingkan produsennya sehingga harga jual dari kelapa sawit Indonesia menjadi tidak premium. Berikut kutipan wawancara dengan narasumber (GAPKI).

“Sebenarnya kita dulu welcome dengan RSPO, Mengapa? Karena di tengah-tengah sawit diserang oleh NGO, kemudian RSPO datang

dengan semangat roundtable. Kemudian semangat roundtable itu hilang, makanya tahun 2005 dibuatlah usulan sertifikasi (selalu dengan RSPO keputusannya diambil dengan suara terbanyak). Sementara suara grower 30%, yang lain anggotanya consumer, trader, buyer, LSM, dll (70%). Jadi setiap ambil keputusan, grower selalu kalah. Saat ini grower tinggal 17%. Jadi dengan kata lain RSPO sekarang disetir oleh NGO.”¹

Hal ini menjadi tantangan bagi Indonesia untuk lebih meningkatkan pertumbuhan ekspornya dengan meningkatkan kualitas komoditi CPO dan PKO berstandar internasional sehingga meningkatkan minat negara lain untuk mengimpor minyak CPO dan PKO dari Indonesia. Terlebih lagi sejak tahun 2011 Indonesia telah memiliki standarisasi sendiri akan produk kelapa sawit dalam bentuk *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO). ISPO merupakan acuan pengembangan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia yang merupakan rangkuman dari seluruh peraturan perundangan yang terkait dengan kelapa sawit di Indonesia, dimana bersifat *mandatory* sehingga ketentuan ISPO wajib dipatuhi oleh pelaku usaha perkebunan di Indonesia.

Tabel 4. Efek Komposisi Produk CPO dan PKO, 2005-2008 dan 2009-2012

Jenis Produk	2005-2008	2009-2012
CPO	-0,00344	-0,00099
PKO	-0,00060	-0,00004

Sumber: Hasil perhitungan penulis

¹ Hasil Wawancara dengan GAPKI, April 2012

Efek distribusi pasar CPO di kedua periode lebih banyak bernilai negatif kecuali di pasar Pakistan pada tahun 2009-2012 yang bernilai positif (Tabel 5). Berarti pertumbuhan ekspor CPO Indonesia ke Cina, Belanda, India, Malaysia, dan Singapura masih lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan impor CPO di negara-negara tersebut. Distribusi pasar komoditas CPO Indonesia kurang memperhatikan pertumbuhan impor di negara Cina, Belanda, India, Malaysia dan Singapura. Jadi Indonesia belum menjadi negara pengeksport CPO tertinggi di 6 negara di atas, dan hanya Pakistan yang menjadikan Indonesia sebagai pengeksport utama.

Dengan kondisi di atas maka tidaklah mengherankan jika kemudian Indonesia dengan Pakistan membuat PTA, karena dengan adanya PTA maka kedua negara dapat lebih meningkatkan kerjasama perdagangannya yang tidak hanya sebatas perdagangan minyak kelapa sawit. Selain faktor kurang cermatnya Indonesia dalam memperhatikan pertumbuhan impor menurut komposisi komoditas yang tepat di negara-negara pengimpor, Hadi (2004) juga menambahkan karena adanya faktor lemahnya *market intellegence* para eksportir Indonesia sehingga dinamika penawaran dan permintaan komoditas pertanian tidak terpantau secara baik.

Tabel 5. Distribusi Pasar Dunia Ekspor CPO dan PKO Indonesia, 2005-2012

Distribusi pasar Dunia	Negara	2005-2008	2009-2012
<i>Crude Palm Oil (CPO)</i>	Cina	-0,00047384	-0,00010866
	Belanda	-0,00141301	-0,00050290
	India	-0,00332409	-0,00187002
	Pakistan	-0,00044282	0,00003940
	Malaysia	-0,00077190	-0,00061410
	Singapura	-0,00098745	-0,00023951
<i>Palm Kernel Oil (PKO)</i>	Cina	0,00019202	-0,00004384
	Belanda	-0,00009232	-0,00002197
	India	0,00000612	-0,00002410
	Pakistan	0,00000156	0,00000027
	Malaysia	0,00008979	0,00013476
	Singapura	-0,00000528	-0,00000289

Sumber: Hasil perhitungan penulis

Sementara untuk PKO, efek distribusinya pada tahun 2005-2008 bernilai positif kecuali Belanda dan Singapura yang bernilai negatif (Tabel 5). Hal ini dapat dimaklumi mengingat Belanda dan Singapura merupakan negara yang agak ketat

menerapkan komoditas yang masuk ke negaranya sehingga Indonesia tidak termasuk dalam pengeksport utama di negara tersebut. Namun pada tahun 2009-2012, parameter efek distribusi yang bernilai positif hanya Pakistan dan Malaysia. Pada tahun 2009-2012, hanya

Pakistan dan Malaysia yang menjadikan Indonesia sebagai pengeksport utama di negara mereka. Pemerintah Indonesia dalam hal ini harus segera bertindak dan sesegera mungkin mengatasi hal tersebut karena CPO dan PKO merupakan komoditas yang menjadi andalan ekspor Indonesia.

Apabila dilihat dari efek daya saing, pada periode 2005-2008 hampir semua parameternya daya saing CPO bernilai positif kecuali Cina dan Pakistan yang bernilai negatif (Tabel 6). Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun Indonesia bukan merupakan negara yang menjadi pengeksport utama di Belanda, India, Malaysia, dan Singapura pada tahun 2005-2008, namun Indonesia memiliki daya saing yang cukup kuat

dan merupakan pesaing terkuat dengan negara pengimpor CPO lainnya, kecuali Cina dan Pakistan.

Tahun 2009-2012, adanya krisis ekonomi tahun 2008 menyebabkan terjadinya perubahan pangsa pasar sehingga parameter daya saing Indonesia di India, Pakistan, Malaysia, dan Singapura bernilai negatif, dan hanya di Cina, dan Belanda yang bernilai positif (Tabel 6). Berarti di Cina dan Belanda, Indonesia masih memiliki daya saing yang cukup kuat dan mampu berdaya saing dengan negara kompetitornya, namun di India, Pakistan, Malaysia, dan Singapura, persaingan Indonesia dengan negara pengeksport lainnya mulai melemah.

Tabel 6. Daya Saing Ekspor CPO dan PKO Indonesia, 2005-2012

Distribusi pasar Dunia	Negara	2005-2008	2009-2012
<i>Crude Palm Oil (CPO)</i>	Cina	-0,00013910	0,00007085
	Belanda	0,00324745	0,00463192
	India	0,00180149	-0,00190831
	Pakistan	-0,00014927	-0,00024771
	Malaysia	0,00001383	-0,00013550
	Singapura	0,00001626	-0,00030141
<i>Palm Kernel Oil (PKO)</i>	Cina	-0,00009759	-0,00017148
	Belanda	-0,00006596	-0,00017422
	India	-0,00001531	0,00002543
	Pakistan	0,00000271	0,00000004
	Malaysia	0,00012092	0,00001856
	Singapura	-0,00000280	0,00000312

Sumber: Hasil perhitungan penulis

Efek daya saing PKO Indonesia pada tahun 2005-2008 memiliki parameter negatif dan hanya Pakistan dan Malaysia yang bernilai positif. Pada tahun 2009-2012, daya saing ekspor PKO mengalami perubahan signifikan,

hampir semua memiliki parameter yang positif kecuali Cina dan Belanda. Di Cina dan Belanda, daya saing PKO Indonesia masih lemah karena di kedua negara tersebut Indonesia bukan pengeksport utama.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Indonesia merupakan salah satu negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia, diikuti oleh Malaysia, Thailand, Nigeria, dan Colombia, tidaklah mengherankan jika Indonesia menjadi salah satu negara pengeksport PKO utama minyak kelapa sawit di dunia. Meskipun menjadi negara utama pengeksport minyak sawit, perhitungan indeks RCA menunjukkan bahwa daya saing Indonesia baik CPO maupun PKO lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia, dan untuk CPO lebih rendah dibandingkan dengan Thailand, dan sama dengan Colombia.

Sementara dilihat dari CMS, pertumbuhan ekspor CPO pada periode 2005-2008 masih lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan standar, pada periode tersebut Indonesia masih mampu mengambil keuntungan dari pertumbuhan ekspor minyak sawit dunia. Namun pada tahun 2009-2012, pertumbuhan ekspor CPO Indonesia mengalami penurunan sehingga nilainya sama dengan pertumbuhan CPO standar. Dilihat dari efek komposisi produk, ekspor CPO dan PKO Indonesia memiliki nilai parameter yang negatif, begitupun dengan efek distribusi pasar dunia pada periode 2005-2008, semua bernilai negatif untuk CPO dan periode 2009-2012 hanya Pakistan yang memiliki nilai positif. Sementara untuk efek daya saing, hanya di Belanda dan India, Indonesia dipandang sebagai pesaing yang kuat dalam memperebutkan pangsa pasar minyak sawit, dan pada 2009-2012 hanya di Cina dan Belanda, Indonesia dianggap sebagai pesaing yang kuat oleh kompetitornya. Untuk PKO, pangsa

pasar yang kuat ada di India, Pakistan, Malaysia, dan Singapura sehingga di negara tersebut Indonesia merupakan pesaing yang kuat untuk negara pengeksport PKO. Dikeluarkannya PMK Nomor 75/PMK.011/2012 sebagai upaya program hilirisasi industri kelapa sawit diduga menjadi salah satu penyebab turunnya daya saing ekspor CPO dan PKO. Namun di sisi lain dengan adanya penurunan ekspor tersebut diharapkan akan meningkatkan pasokan bahan baku CPO dan PKO dalam negeri, untuk diolah kembali sehingga dapat menghasilkan produk turunan CPO dan PKO dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Kedepannya diharapkan ekspor CPO dan PKO tidak hanya dalam bentuk bahan mentah yang seperti selama ini terjadi, tetapi lebih pada produk turunan dari CPO dan PKO.

Berdasarkan perhitungan RCA, kinerja CPO dan PKO Indonesia agak lemah dibandingkan dengan negara lain, hal ini didukung hasil dari perhitungan CMS yang menunjukkan bahwa efek komposisi produk, daya saing, dan distribusi pasar masih banyak yang bernilai negatif, meskipun pertumbuhan ekspor minyak sawit Indonesia meningkat. Meningkatnya pertumbuhan ekspor minyak kelapa sawit tersebut mengindikasikan bahwa Indonesia masih mampu mengambil keuntungan dari pertumbuhan ekspor minyak sawit dunia sehingga dianggap sebagai kompetitor yang kuat oleh negara pesaingnya.

Banyak hal yang menyebabkan kinerja dan daya saing minyak kelapa sawit Indonesia agak lemah di perdagangan dunia terutama periode 2009-2012, antara lain: Pertama,

krisis ekonomi global pada tahun 2008 menyebabkan permintaan minyak kelapa sawit beberapa negara pengimpor minyak sawit menurun akibat terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi di beberapa negara. Kedua, adanya penetapan standar yang berbeda antara penawaran dan permintaan. Selama ini standarisasi produk minyak kelapa sawit mengacu pada RSPO, namun kemudian GAPKI pada tahun 2011 keluar dari RSPO dan Indonesia sendiri memiliki ISPO yang menjadi standar produk kelapa sawit di Indonesia. Meskipun diyakini oleh pemerintah bahwa keluarnya GAPKI tidak akan berpengaruh terhadap ekspor Indonesia ke dunia karena sifatnya *government to government*, dan masih ada beberapa pengusaha minyak kelapa sawit yang masih bergabung dengan RSPO, namun hal tersebut sedikit banyak berpengaruh. Disini perlu pembuktian dari Indonesia, bahwa dengan adanya ISPO maka kualitas minyak sawit Indonesia tetap terjaga bahkan memiliki kualitas yang lebih tinggi. Ketiga, adanya beberapa peraturan pemerintah tentang penetapan tarif bea keluar yang menjadikan Indonesia kurang kompetitif dibandingkan dengan Malaysia, dan negara lainnya.

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah agar daya saing dan kinerja minyak kelapa sawit dapat meningkat, antara lain: Pertama, perlu adanya sinergitas kebijakan pemerintah yang mendukung daya saing hilirisasi industri sawit. Kedua, Indonesia lebih memperhatikan komposisi produk CPO dan PKO sesuai dengan kebutuhan negara-negara pengimpor dengan meningkatkan kualitas CPO dan

PKO yang sesuai dengan standarisasi negara yang menjadi tujuan ekspor. Ketiga, Indonesia harus lebih teliti dalam mengeksport produk CPO maupun PKO dengan memperhatikan dinamika impor di negara yang menjadi tujuan ekspor Indonesia. Hal ini penting dilakukan mengingat, selama ini distribusi pasar Indonesia lemah karena kurangnya *market intelligence* para eksportir.

DAFTAR PUSTAKA

- Arshad, M., Fatimah dan A. Radam. (1997). *Export Performance of selected Electrical and Electronic Product*. Department of Agricultural Economics Faculty of Economics and Management Universiti Putra Malaysia. Diunduh pada tanggal 20 September 2013 dari www.econ.upm.edu.
- Ashegian, P dan B. Ebrahimi. (1990). *Internasional Business*. New York: Harper and Row Publisher, Inc.
- Balassa, B. (1965). *Trade Liberalization and Revealed Comparative Advantage*. *Manchester School of Economic and Social Studies Journal*, 33(2): 99-124
- Casson, A. (1999). *The Hesitant Boom: Indonesia's Oil Palm Sub-Sector in an Era of Economic Crisis and Political Change*. Appendix C-Malaysian Investment in The Indonesian Oil Palm Sector. Center for International Forestry Research (CIFOR), November 1999
- De Vries, B.A. (1967). *The Exsport Experience of Developing Countries*. World Bank Staff Occasional Papers, No 3 pp. 18-31. Baltimore: Johns Hopkins Press.
- Gumbira, S.E. (2010). Review Kajian, penelitian dan Pengembangan Agroindustri Strategis Nasional: Kelapa Sawit, Kakao dan Gambir. *Jurnal Teknologi Pertanian* Vol. 19(1), 45-55. Diunduh pada tanggal 19 September 2013 dari <http://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnaltin/article/viewFile/1109/186>

- Hadi, P dan S. Mardianto. (2004). Analisis Komparasi Daya Saing Produk Ekspor Pertanian Antar Negara ASEAN dalam Era Perdagangan Bebas AFTA. *Jurnal Agro Ekonomi*, Volume 22 No.1, Mei 2004: 46-73
- Haque, A, S. Sultana and A. Momen. (2013). Export Performance of Malaysian Telecommunication Products: Market Prospects and Challenges. *Proceeding of 3rd Asia-Pacific Business Research Conference 25-26 February 2013*. Malaysia.
- Harbeler, G. (1936). *The Theory of International Trade with its Application to Commercial Policy*. Londong: William Hodges and Co.
- Index Mundi. (2004-2012a). *Palm Oil Monthly Price-US Dollars Per Metric Ton*. Diunduh pada 19 September 2013 dari <http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=palm-oil&months=120>
- Index Mundi. (2004-2012b). *Palm Kernel Oil Monthly Price-US Dollars Per Metric Ton*. Diunduh pada 19 September 2013 dari <http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=palm-kernel-oil&months=120>
- Kementerian Keuangan. (2013). *Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Negara RI*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kementerian Pertanian. (2012). *Statistik Pertanian 2012*. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- Marks, S., D. Larson, and J. Pomeroy. (1998). Economic Effects of Taxes On Exports of Palm Oil Products. *Bulletin of Indonesian Economic Studies* Vol 34 No. 3, December 1998
- Poramacom, N (2002). Revealed Comparative Advantage (RCA) and Constant Market Share Model (CMS) on Thai Natural Rubber. *Kasetsart Journal*. (Soc.Sci):23:54-60.
- Prajogo, H dan S. Mardianto. (2004). Analisis Komparasi Daya Saing Produk Ekspor Pertanian Antar Negara ASEAN dalam Era Perdagangan Bebas AFTA. *Jurnal Agro Ekonomi*, Vol. 22, No 1, Mei 2004
- Richardson, J.D. (1971). Some Sensitivity Tests for a Constant Market Share, Analysis of Exsport Growth. *Review of Economics and Statistics*. Vol 53, PP. 300-204
- Salvatore, D. (2007). *International Economics 9th edition*. USA: Wiley and Sons Inc.
- Saptana. (2010). Tinjauan Konseptual Mikro-Makro Daya saing dan Strategi Pembangunan Pertanian. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. Volume 28 No 1, Juli 2010:1-18
- Simeh, M.A. (2004). Comparative Advantage of the European Rapeseed Industry vis-a-vis Other Oils and Fats Producers. *Oil Palm Industry Economic Journal*, Vol 4 (2), pp. 14-22.
- Simonis, D. (2009). Belgium Export Performance, A Constant Market Share Analysis. Working Paper 2-00, Economic Analysis and Freedom.
- Sudaryanto, T dan P. Simatupang. (1993). *Arah Pengembangan Agribisnis: Suatu Catatan Kerangka Analisis dalam Prosiding Prespektif Pengembangan Agribisnis di Indonesia*. Bogor: Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian.
- Suprihartini, R . (2005). *Daya Saing Ekspor Teh Indonesia Di Pasar Teh Dunia*. Bogor: Lembaga Riset Perkebunan Indonesia
- Tambunan, T.H. (2004). *Globalisasi dan Perdagangan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tyers, R, P. Phillips and D. Lim. (1985). ASEAN-Australia Trade in Manufactures: a Constant Market Share Analysis. 1970-1979. In Lim,D (ed). 1985. *ASEAN-Australia Trade in Manufactures*. Melbourne: Longman Chashire.
- UN Comtrade. (2003-2012). *Trade Flow*. Diunduh tanggal 1 s.d 15 September 2013 dari <http://comtrade.un.org/db/dqBasicQueryResults>

THE IMPACT OF FINAL DEMAND OF INDONESIA'S EXPORTED PRODUCTS ON DOMESTIC INCOME AND EMPLOYMENT

Dampak Permintaan Akhir Produk Ekspor Indonesia Terhadap Pendapatan dan Kesempatan Kerja Dalam Negeri

Aditya P Alhayat

Pusat Pengkajian Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan-RI,
Jl. M. I. Ridwan Rais No.5 Jakarta Pusat, alhayat_limited@yahoo.com

Naskah diterima: 9 September 2013

Disetujui diterbitkan: 22 November 2013

Abstract

The conventional trade statistics may lead to an incomplete interpretation on the importance of international trade, due to its recording system and the increasing globalization of production process. The global value chain approach and the World Input-Output Table were employed. This paper aims to estimate the extent to which Indonesia's economy relies on the final demand of the particular export market in term of generating incomes and employment when the fragmentation of global production exists. The results show that value added and employments induced by final demand in advanced economies are higher than those generated by final demand in developing economies. Enhancing production integration within the same region (East Asia or ASEAN) can be an effective strategy to induce higher Indonesia's income and employment directly and indirectly.

Keywords: Value Added, Global Value Chain, World Input-Output Table

Abstrak

Statistik perdagangan internasional dapat menyebabkan interpretasi yang kurang lengkap tentang pentingnya perdagangan internasional, terkait dengan sistem pencatatannya dan semakin meningkatnya globalisasi proses produksi barang. Studi ini bertujuan untuk mengestimasi sejauh mana perekonomian Indonesia bergantung pada permintaan akhir di suatu pasar ekspor tertentu dan dampaknya terhadap penciptaan pendapatan dan lapangan kerja ketika terjadi fragmentasi produksi global. Analisis ini menggunakan pendekatan global value chain dan Tabel Input-Output Dunia. Hasil studi menunjukkan bahwa nilai tambah dan lapangan kerja sebagai akibat dari pemenuhan permintaan akhir di negara maju lebih tinggi daripada yang dihasilkan dari pemenuhan permintaan akhir di negara berkembang. Peningkatan integrasi produksi di wilayah yang sama (Asia Timur atau ASEAN) dapat menjadi strategi yang efektif untuk mempengaruhi peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja di Indonesia secara langsung dan tidak langsung.

Kata kunci: Nilai Tambah, Rantai Nilai Global, Tabel Input-Output Dunia

JEL Classification: F10, C67, R15

INTRODUCTION

The world trade constellation has changed due to the rising prominence of developing economies in the global economy. China, India, Brazil, and Russia nowadays become key players as a global engine of growth, especially since global financial turmoil in 2008. Furthermore, these countries are predicted to suppress the G6¹ economies in 2050 and to change the future of global economic landscape (Wilson and Purushothaman, 2003). The fascinating growth of emerging countries gave impacts on the change of trade patterns around the world, including for Indonesia. Looking at international trade data, Indonesia's major exports destinations apparently shift from traditionally relying on the developed countries to the developing countries. Merchandise exports share of Indonesia to Japan, the United States and EU27 in 2008 cumulatively dropped by 10.1% compare to 2000, while the export share to both China and India increased by 7.4% during the same period (UN Comtrade, 2013).

Based on the above international trade statistics, we may argue that the developed economies are losing much of their relative importance to Indonesia's economy during the last decades, particularly after the global economic

turmoil. However, this statement based on the conventional trade statistics may not appropriate due to its recording system. It does not provide a complete picture of the impact of trade on economy² in the era of the so-called global value chain.³

In this perspective, the relation between an exporting country and an importing country is represented not only by the direct trade flows but also by the indirect trade flows. This is due to the fact that the process of production of goods is no longer entirely completed by one company in a single country, but it is now produced by many companies in several countries.

However, the international trade statistics only capture the direct effect between the two trading partners without further distinguishing the trade flows into intermediate goods or final goods. This would undermine the indirect impact on the importance of the third country in which the underlying export product will finally be consumed. Therefore, the international trade statistics has its own limitation to capture inter-linkages demand across countries, particularly in the globalization era in which the production processes are connected worldwide. On the contrary, the global value chain concept would have different perspective in which the decline of Indonesia's

¹ The member countries of G6 are the USA, Japan, UK, Germany, France and Italy.

² Many researchers have criticized the measurement of international (gross) trade statistics and employed it as the background of their studies, among others are Pula and Peltonen (2009), Maurer and Degain (2010), Koopman, Wang, and Wei (2012), Johnson and Noguera (2012), and Armstrong and Burt (2012).

³ The issue of the global value chain has been extensively studied under various terms, such as global production sharing, multi-stage production, fragmentation, slicing up the value chain, outsourcing, offshoring, second unbundling, trade in task, or vertical specialization (Hummels, Ishii, and Yi, 2001 and Stehrer, Foster, and de Vries, 2012). The configuration of the production can be a sequential process from an upstream to a downstream stage ("snakes"), an assembling process of parts from different sources with no particular order ("spider"), or a combination of the both types (Baldwin and Venables, 2010).

exports to developed economies in terms of international trade statistics might not necessarily represent the real decline of those economies contributing to Indonesia's economy. In addition, the developed countries might be still the main end-buyers (final demand) for Indonesia's export products.

As an illustration, suppose that Indonesia produces natural rubber and exports it to China. The material is then to be transformed into soles of rubber and used for producing footwear. Afterwards, the footwear is not only sold domestically in China but also exported to the United States (US). In this example, Indonesia has a direct trade relationship with China and has an indirect trade relationship with the US. However, international trade statistics only portrayed the trade relationship between Indonesia and China, and between China and the US. If the amount of footwear exported to the US is higher than the ones sold in China's market, the ultimate demand of Indonesian rubber is much driven by the consumer in the US. As a case, suppose that the purchasing power of the US consumers decreases (due to, for example, the economic recession), the imported footwear with soles of rubber from China also declines. Subsequently, it reduces the demand on Indonesian natural rubber.

Considering those backgrounds, this paper would like to analyze the extent to which the final demands in advanced and developing economies have direct and indirect impacts on Indonesia's income and employment using the global value chain concept. By modeling trade in the global input-output linkages, it is expected to give more complete figures

of the effect of ultimate demand in advanced and developing countries on Indonesia's incomes and employment. Diversifying market destination becomes a growing issue for policy makers in response to the recent global economic crisis, especially promoting export to developing countries, which is perceived to have strong economic growth. One of Indonesia's priorities on the foreign trade policies is to diversify export markets in such a way that Indonesia would not much rely on certain destination countries as well as to promote export to the final destinations in which the products would be consumed (Ministry of Trade, 2010).

LITERATURE REVIEW

The evolving structure of current global trade is characterized by the diffusion of key players in global trade, increasing trade interconnection, growing role of global supply chains, and diffusion of high-technology exporters (Riad et al., 2012). Slicing up global production stages, which allows for specializing in specific tasks along the global production chains, is one of the important new natures of international trade (Hummels, Ishii, and Yi, 2001). The specialization of activities in which countries have the highest competitive level is needed to reap the benefit of globalization since the international competition is likely to occur between workers performing the same tasks in different nations (trade in tasks) rather than competition among factories/sectors in different nations (trade in goods) (Baldwin, 2006). Therefore, one can argue that country's competitiveness should be based on activities in global production in generating incomes and jobs, rather

than relied solely on a country's share in world exports (Timmer et al., 2012b).

The emerging global production fragmentation⁴ brings an important consequence as international trade statistics may lead to misleading interpretation of the importance of trade on economic growth. International trade statistics calculate the value of gross trade when the physical goods pass through a country's border (Maurer and Degain, 2010). If the transformations of inputs require a production process which involves many countries, then the total trade flows are calculated multiple times (double counting), and it is likely to be inflated. This is due to the fact that the increasing global value chain leads countries to export significant intermediate goods.

In addition, the existence of the global supply chain blurs the concept "country of origin" because products are no longer made in certain single country, but rather they are made in the world (WTO and IDE-JETRO, 2011). Custom authorities consider "country of origin" as the last processing country irrespective of its relative position within the global value chain (WTO and Commission des Finances du Sénat, 2011). Hence, gross trade statistics does not portray a complete picture of the real trade partner where the product is produced. Moreover, the grouping of transactions on the traded goods causes the gross

trade statistics to misrepresent the relative importance of some sectors in international trade (Armstrong and Burt, 2012). This is because the processing of goods also involves service sectors (non-tradable goods) which can be the most dominant production factor in the respective countries.

The limitations of gross statistics in providing a more complete picture of the role of international trade become a point of departure for many parties (particularly scholars) to construct a new measure that represents the latest international trade developments. This new trade measurement based on value added solves the 'double counting' problem embedded, due to its recording system, on the gross trade statistics.

This new approach estimates the value-added by each country (and industry) within stages of an international production process. The imported inputs (completed in the previous stages of production by other countries) used in producing goods for export by the respective country are not counted. In this circumstance, the value added could be seen as a compensation for the production factors (labor and capital). It implies that the consumption of goods in importing country does not only induce income but also generates employment in exporting country where the production takes place. These linkages are illustrated in Figure 1.

⁴ Increased fragmentation of global production is among others driven by improving Information and Communication Technology (ICT), decreasing transportation costs, as well as increasing trade and investment liberalization practices (Armstrong and Burt, 2012).

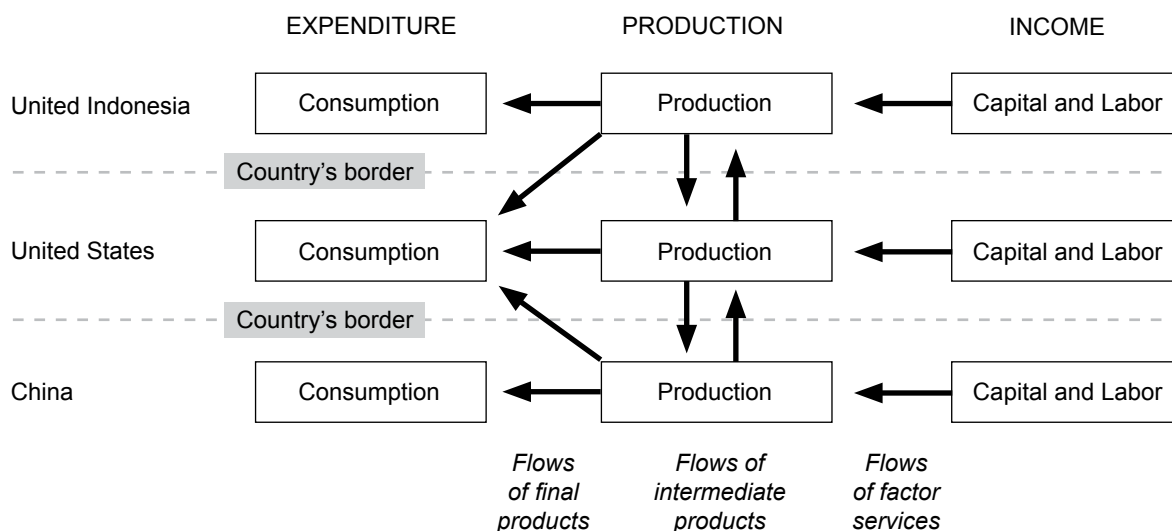


Figure 1. Global Value Chain: Relations between Expenditure, Production, and Income

Source: Adapted from Timmer et al. (2012a)

In the fragmented global production, the flows of products and services can be presented as arrows in Figure 1. The demand of consumption goods in the United States stimulates either domestic production (US) or foreign production (Indonesia and China). In this case, the US can directly import final goods from Indonesia and China, or they can import intermediate products to be processed domestically. Hence, the flows of international trade do not only occur in the final products but also in the intermediate products. The highly fragmented production would lead more countries to participate in the value chain as well as increase trade in intermediate inputs. In short, the production activities (tasks) which are now fragmented across countries would in turn lead to the utilization of capital and labor to create value added at each stage of production in the respective countries. One can also read the opposite direction of arrows in Figure 1 as flows of payments. For instance, consumer's expenditure on

the final goods in Indonesia will generate compensations for the capital owners and labors, which involve in domestic production and/or production abroad. It also allows for indirect trade (no arrows of final and intermediate products) between Indonesia and China through the third country (the US) as a hub.

RESEARCH METHOD

This section firstly discusses a brief explanation of the structure of World Input-Output Table, as well as the way to read this table. Afterwards, it explains the method of analysis used to calculate value added exports. It also deals with the data source and computer program used for the study.

Schematic World Input-Output Table Input-Output Table (IOT) represents economic transaction activities in a given area at a point in time (snapshot). Rows on the IOT represent the selling sectors that produce or deliver outputs, whereas the columns show the purchasing sectors that use or buy those outputs.

Purchasing sector can be an industry or a final consumer (households, companies, and government) representing the demand of goods. The goods produced by a manufacturer can be purchased by other manufacturers as an input in their production (intermediate demand). The goods can also be used by consumers in the final form (final demand). The flow of goods is usually measured by the monetary unit using double entry book keeping system so that the total output produced by selling sectors equals to the total inputs used by purchasing sectors. The further fundamental construction and analysis on IOT can be seen in Miller and Blair (2009).

Since the IOT portrays economic transactions in a specific area, we can assign National Input-Output Table (NIOT) for a country and World Input-Output Table (WIOT) for the world/international. In principle, the building blocks in the WIOT are same as those in the NIOT. There are intra and inter-industry linkages describing the use of output for each sector in production process (intermediate input) and also the flow of product to the consumers as a final use. The origin of intermediate input as well as the flow of final consumption are detached between domestic and foreign. However, WIOT explicitly specifies the country origin of imported products and country destination of exported products. Therefore, we prefer using the WIOT in this study.

Figure 2 provides general structure of WIOT which is simplified into three countries (Country 1, 2, and 3) and two industries (Industry 1 and 2). The variables of f , z , v and x represent intermediate goods, final goods, value

added, and input/output respectively. Similar to a standard input-output table, rows in WIOT represent the flow (use) of outputs from given industry whereas the columns indicate the origin (input) from a particular industry. The superscript in the intermediate use indicates the flow of transaction between countries while the subscript denotes the transaction between sectors. For example, z_{21}^{13} represents the value of intermediate good produced by Industry 2 in Country 1 that is exported to the Country 3 and used as input in Industry 1. The output of Industry 2 can be also served as final use which is consumed domestically in Country 1 indicated by f_2^{11} .

From the first row in Figure 2 we can see the flows of output produced by Industry 1 in Country 1 used as intermediate input for domestic production (z_{11}^{11} and z_{12}^{11}) and production abroad (z_{11}^{12} , z_{12}^{12} , z_{11}^{13} , and z_{12}^{13}). In addition, the output of Industry 1 in Country 1 can be also served as final use which is consumed domestically (f_1^{11}) and internationally or exported to other countries (f_1^{12} and f_1^{13}). Therefore, the use of output in the first row is equal to the total output of Industry 1 in Country 1. In another way, we can read it on the column-base, describing the sources of a given output for the intermediate and final use. Taking the first column as an example, the output produced by Industry 1 in Country 1 comes from domestic intermediate input (z_{11}^{11} and z_{21}^{11}) and imported intermediate input (z_{11}^{21} , z_{21}^{21} , z_{11}^{31} , and z_{12}^{31}). In addition, to produce an output of Industry 1 in Country 1 requires production factors, i.e. labor and capital, which are compensated on the value added v_1^1 . Therefore, the total

input of Industry 1 in Country 1 is the sum of all intermediate inputs (domestic and abroad) and the value added (labor and capital compensation). The stylized

accounting identity of input-output table implies that the total use of output in row must be equal to the total input in column for the same industry.

		Intermediate Use (Z)						Final Use (f)			Total Output (x)
		Country 1		Country 2		Country 3		Country 1	Country 2	Country 3	
		<i>Ind 1</i>	<i>Ind 2</i>	<i>Ind 1</i>	<i>Ind 2</i>	<i>Ind 1</i>	<i>Ind 2</i>				
Country 1	<i>Ind 1</i>	Z_{11}^{11}	Z_{12}^{11}	Z_{11}^{12}	Z_{12}^{12}	Z_{12}^{13}	Z_{12}^{13}	f_1^{11}	f_1^{12}	f_1^{13}	x_1^1
	<i>Ind 2</i>	Z_{21}^{11}	Z_{22}^{11}	Z_{21}^{12}	Z_{22}^{12}	Z_{21}^{13}	Z_{22}^{13}	f_2^{11}	f_2^{12}	f_2^{13}	x_2^1
Country 2	<i>Ind 1</i>	Z_{11}^{21}	Z_{12}^{21}	Z_{11}^{22}	Z_{12}^{22}	Z_{11}^{23}	Z_{12}^{23}	f_1^{21}	f_1^{22}	f_1^{23}	x_1^2
	<i>Ind 2</i>	Z_{21}^{21}	Z_{22}^{21}	Z_{21}^{22}	Z_{22}^{22}	Z_{21}^{23}	Z_{22}^{23}	f_2^{21}	f_2^{22}	f_2^{23}	x_2^2
Country 3	<i>Ind 1</i>	Z_{11}^{31}	Z_{12}^{31}	Z_{11}^{32}	Z_{12}^{32}	Z_{11}^{33}	Z_{12}^{33}	f_1^{31}	f_1^{32}	f_1^{33}	x_1^3
	<i>Ind 2</i>	Z_{21}^{31}	Z_{22}^{31}	Z_{21}^{32}	Z_{22}^{32}	Z_{21}^{33}	Z_{22}^{33}	f_2^{31}	f_2^{32}	f_2^{33}	x_2^3
Value Added		v_1^1	v_2^1	v_1^2	v_2^2	v_1^3	v_2^3				
Total Input		x_1^1	x_2^1	x_1^2	x_2^2	x_1^3	x_2^3				

Figure 2. Basic Outline of the WIOT

Source: Adapted from Timmer (2012)

Note: the shaded area is inter-industry linkages (use of intermediate inputs in production stages)

Method of Analysis

The amount of value added of a country embedded in the final demand of certain destination market becomes the main concern in this paper. Therefore, it requires an accounting framework taking account inter-industry (intermediate) linkages across countries as well as the goods flows (goods originate) and the use of goods. By following the Global Value Chain concept as developed by Timmer et al. (2012a), one can track

the value added generated by a country along the stages of production in different countries.⁵ In the initial step, the market clearing conditions for the whole countries need to be set, and the production outputs need to be distinguished into intermediate and final use. The final demand is then allocated based on the group of country destinations in order to calculate the amount of output that should be produced to meet the specific final demand. Because the respective

⁵ This paper basically refers to Los, Timmer, and de Vries (2012) in writing the notational input-output matrices as well as the steps to calculate value added.

output contains direct factor input, then the value added can be derived.

The analysis using Input-Output model can be expressed in matrix notation. Therefore, it is important to firstly provide information on some general notations. Based on the common convention, matrices are shown by bold capital letters (\mathbf{Y}); vectors by bold lower case letters (\mathbf{y}); and scalars in italic lower case letters (y). Vectors are defined as column vectors so a row vector is constructed by transposition indicated by a prime (\mathbf{y}'). The diagonal matrices are indicated by a hat above the letter ($\hat{\mathbf{y}}$) which consists of vector on the main diagonal and zeros on the off-diagonal.

Now, assume that goods flow from source sector s as input for sector destination d and move from country origin i to country destination j . The goods circulations can represent intra-industry trade ($s=d$) or inter-industry trade ($s \neq d$) as well as domestic trade ($i=j$) or foreign trade ($i \neq j$). Quantity of goods produced by country i equals to the amount of goods used for both domestic and overseas consumption. Assuming that there is only single price for each product (irrespective of the use) then the value of output of country i at market clearing condition is

$$x_i(s) = \sum_j f_{ij}(s) + \sum_d \sum_j m_{ij}(s, d) \quad (1)$$

Equation (1) essentially states that the value of output received by producers is the same as the total amount of the consumer spending whether for final consumption (f) and/or for further production process or intermediate inputs

(m). For instance, $x_i(s)$ is production value of sector s of country i ; $f_{ij}(s)$ is expenditure on final goods from sector s in country j ; and $m_{ij}(s, d)$ is expenditure on intermediate goods used on sector d in country j .

In the input-output approach, matrix notation can be used to describe the market clearance condition for S sectors and N countries creating SN dimension. The output value for each country-sector is expressed by the column vector with dimension, while final demand for output is defined in column vector (\mathbf{f}). Finally, the intermediate input linkages are denoted in the global matrix (\mathbf{A}). Each element of the matrix consists of the proportion of the output sector from country which is used for an input sector in country toward total output sector of country, so it can be expressed as a_{ij} . In the input-output notation, the global market clearance condition is as follows.

$$\begin{bmatrix} \mathbf{x}_1 \\ \mathbf{x}_2 \\ \vdots \\ \mathbf{x}_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} & \dots & \mathbf{A}_{1N} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} & \dots & \mathbf{A}_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{A}_{N1} & \mathbf{A}_{N2} & \dots & \mathbf{A}_{NN} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x}_1 \\ \mathbf{x}_2 \\ \vdots \\ \mathbf{x}_N \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \sum_j \mathbf{f}_{1j} \\ \sum_j \mathbf{f}_{2j} \\ \vdots \\ \sum_j \mathbf{f}_{Nj} \end{bmatrix} \quad (2)$$

It should be noted that \mathbf{x} reflects production level in country consisting -vector and \mathbf{f} represents final demand country of output from country for each sector. Equation (2) can be summarized into

$$\mathbf{x} = \mathbf{Ax} + \mathbf{f} \quad (3)$$

The equation above represents input-output system in which total output is distinguished into intermediate and

final use. Solving for gross output, the equation can be rewritten as:

$$\mathbf{x} = (\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{f} \quad (4)$$

Leontief input-output inverse $(\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}$ shows the input requirements, both direct and indirect, on all other producers, generated by one unit of final output. Identity matrix \mathbf{I} is $\text{SN} \times \text{SN}$ consisting of ones on the diagonal element and zero on the off-diagonal elements.

Because the interest of this paper is the final demand in the advanced and developing economies, total outputs are therefore divided into outputs generated due to domestic demand \mathbf{F}^D , the final demand in advanced economies \mathbf{F}^{ADV} and the final demand in developing economies \mathbf{F}^{DEV} . The decomposition of this final demand can be expressed in the linear system as:

$$\mathbf{x} = (\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{f}^D + (\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{f}^{ADV} + (\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{f}^{DEV} \quad (5)$$

Value added incomes are generated by pre-multiplying equation (3) with vector \mathbf{p} of $\mathbf{1} \times \text{SN}$ designating value added per unit output (value added coefficient). Focusing only to the external orientation, the value added created in country i absorbed in final demand abroad (export of value added) is

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_i^E &= \mathbf{p}'(\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{f}^{ADV} + \mathbf{p}'(\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{f}^{DEV} \\ &= \mathbf{v}_i^{ADV} + \mathbf{v}_i^{DEV} \end{aligned} \quad (6)$$

Since the concern of this paper is value added creation in Indonesia, so it sets all elements in the vector of value added to zero except for value added \mathbf{p} created by Indonesia. Following the

same logic in Equation (6), by replacing elements of vector \mathbf{p} with the relevant vector of factor inputs coefficients, then, the generated employments to satisfy the respective final demand can be derived.

Data

This study uses World Input-Output Table at current prices (WIOT Analytical) retrieved from the WIOD website (<http://www.wiod.org/database/iot.htm>) released in April 2012. The WIOT Analytical provides information on inter-industry linkages, final use, total output, and value added. The final use (consumption) of industrial output can be separated into five categories: household expenditure, non-profit organizations serving households (NPISH) expenditure, government expenditure, gross fixed capital formation, and changes in inventories. The WIOT defines economic transactions among 40 countries accounted to more than 85% of world GDP, and it represents the whole economy by adding up rest of the world (RoW). It also covers 35 industries ranging from natural resource, manufacture, and services. Hence, the Intermediate Use matrix in the WIOT has the dimension of 1435×1435 .

The data on employment are taken from the Socio-Economic Accounts (<http://www.wiod.org/database/sea.htm>) or commonly called as satellite account which has same data structure (country and industrial classification) to the WIOT Analytical. We prefer using the number of persons engaged (EMP) rather than the number of employees (EMPE) because it represents the whole employment, including self-employed

and family workers. It should be noted that the monetary values in the Socio-Economic Accounts are in the national currency whereas the monetary values in the Socio-Economic Accounts are in the US Dollar (US\$). Therefore, we need to convert the national currency into US\$ using the exchange rate which is also provided in the WIOD database.

For the purpose of this study, the final demand of advanced economies is set referred to the IMF classification and put the others, including RoW as developing economies. The advanced countries—based upon the IMF classification which are not explicitly defined in the WIOD—consist of Iceland, Israel, New Zealand, Norway, San Marino, Singapore, and Switzerland.⁶ Among these countries, Singapore is the most important trade partner for Indonesia.⁷ Nevertheless, it is argued that the classification will not lead to the bias results because the calculation of trade flows in this study is based on the final demand absorbed into the destination market. It should be noted that Singapore is one of the main re-export countries⁸ which relies much on the imported intermediate inputs (Choy, 2009). Re-export activity is part of the double-counting problem embedded in the gross trade statistics which will cause distorted picture on the how much of the exporting country depends on the foreign market.

The new sub-category for advanced economies can further defined into mature markets (G7) and other advanced economies as well as the sub-category for developing economies into emerging markets (BRICMT) and other developing economies. This decomposition aims to know the extent of impacts that the respective markets have on Indonesia's economy in terms of incomes and employment. It is also possible to obtain information about the products/sectors (agriculture, manufacture, and services) of related trading partners of which Indonesia has benefited the most.

In order to calculate Indonesia's value added income and employment induced by the underlying export markets, Scilab program is utilized. Scilab is a freeware program which has more or less the same function as the popular commercial of Matlab package and can be downloaded from <http://www.scilab.org>. This program makes computation easier in matrices. In particular, Scilab version 5.3.3 is used because it provides an additional module for reading Excel-files into Scilab as well as for writing the results to Excel-files.

RESULTS AND DISCUSSIONS

Impact of Foreign Demand on Indonesian Income and Employment

Before discussing the magnitude of dependency of Indonesia's economy toward export markets, it is better to first

⁶ Hong Kong is also included as an advanced country on the IMF classification. However, in the WIOD, Hong Kong data have been combined into the Chinese trade data (Timmer (Ed.), 2012).

⁷ Based on the UN Comtrade database, Singapore is Indonesia's fourth largest export destination in 2009 which accounted to US\$ 10 billion or 8.8% of Indonesia's total export to the world.

⁸ Trade data from the Singapore Department of Statistics (<http://www.singstat.gov.sg>) shows that almost 50% of the Singapore's total exports to the world in 2009 are come from re-export item.

compare the results with related existing literatures. By doing this benchmarking, the reliability of the results can be assured as well as can be used to avoid fallacy on the interpretation. In this respect, the study by Johnson and Noguera (2012) is one of the literatures used in the analysis.

Johnson and Noguera (2012) define value added exports as value added produced in the source country and absorbed in the destination country. In addition, they calculate the ratio of value added exports to gross exports (called as "VAX ratio") to measure the intensity of production sharing. The VAX ratios are low when intensity of production sharing is high. The ratio can be lower or higher. For the aggregate level, the ratio is always smaller than the one as found in Johnson and Noguera (2012). However, in the sector-level, the ratio may pose value greater than one, particularly in the agriculture & natural Resources and services. It is because manufactures, which are directly exported, contain value added from other sectors. The higher gap between gross exports and value added exports means that the gross export statistics will lead to more bias in capturing the real trade flows.

Following their works, the ratio of Indonesia's value added exports absorbed in the foreign final demands to Indonesia's gross exports is the calculated. Surprisingly, the result on the value added to gross exports ratio for Indonesia in 2004 was 0.79, same as what Johnson and Noguera (2012) found. Recalling that result, this study uses WIOD database while Johnson and Noguera (2012) use GTAP database to calculate value added exports. In

general, the average ratio of Indonesian value added exports to fulfill the foreign final demand toward its gross exports during 1995-2009 was 0.82. In other words, Indonesia's value added exports was 18% lower than gross export statistics, confirming to the notion given by Johnson and Noguera (2012) that value added exports are smaller than gross exports at the aggregate level.

Table 1 provides Indonesia's value added exports and gross exports of a particular market destination during 1995-2009. Both measures indicate that the trend of Indonesia's exports to developing countries is almost four times faster than the trend of exports to advanced countries (panel a and b). Indonesia's value added exports to advanced economies during 1995-2009 grew slower (4.3% per year) than those in developing countries (15.3% per year). After the global economic recession 2008, both final demands in advanced and developing economies have been equally important for Indonesia's income. It is indicated by the relatively similar amount of value added exports generated in advanced and developing economies of USD 59.2 billion and USD 55.9 billion respectively. Before that, the developing economies had been much less important for Indonesia than advanced economies, even in 2005.

By comparing the value added exports and gross exports as shown in Table 1 panel c, it can be implied that the production sharing intensity on Indonesia's exports to developing economies is higher than the export to advanced economies. On average, the ratio of Indonesia's value added exports to the gross exports attributed to

developing economies was 0.78, lower than the ratio attributed to advanced economies which amounted to 0.84. The smaller ratio indicates the higher intensity of production sharing across countries. This is probably due to the fact that a lot of materials and intermediate goods were imported into Indonesia before being processed and then exported to developing economies.

Panel d on Table 1 indicates the relative contribution of Indonesia's value added exports toward Indonesia's economy. For example in 2000, Indonesia's value added exports generated from serving the world's final demands contributed to almost 30% of Indonesia's GDP. It was mainly due to the value added exports to the advanced economies (23.4% of Indonesia's GDP). However, in 2009, the advanced economies became less important, as indicated by the lower ratio of Indonesia's value added exports to GDP of 10.5%. On the contrary, the role of developing countries in generating Indonesia's incomes became more important, even though it was not so strong. Despite the dynamic role of foreign final demands toward Indonesia's economy, Indonesia still relied heavily on domestic final demands, which induced to 75% of total value added (on average) during 1995-2009.

To understand whether Indonesia has gained or suffered from global demands, the annual growth of Indonesian value added export-to-GDP

ratio is compared to the annual growth of destination market's GDP-to-World's GDP ratio within the same period. The former ratio refers to Indonesia's income from exports to fulfill particular foreign demands, and the latter ratio represents economic condition of the respective export market. This is based on the fact that developing economies are now becoming more important for the global economy. For instance, the share of developing countries' GDP to the world's GDP was increasing at 3.0% per year (Table 1 panel e). Therefore, it can be considered as an advantage for Indonesia if their incomes from export expand faster than the economic performance of a particular market in the global economy. This shows that Indonesia is able to capture market opportunities abroad.

Based on the calculation, the annual decline of Indonesia's value added exports to advanced countries-to-the GDP ratio during 1995-2009 was faster than annual economic growth in that market (comparing item 'd' and 'e' in Table 1). Meanwhile, the trend of Indonesian value added export to developing countries-to-GDP ratio (7.7% per year) grew faster than the trend of GDP in developing countries-to-World's GDP (3.0% per year). These facts show us that Indonesia was severely injured from declining demands in advanced countries. On the contrary, Indonesia benefited for catering market demands in developing countries.

Table 1. Selective Indicators of Indonesian Export Performance and Foreign Market Condition, 1995-2009

Description	1995	2000	2005	2009	1995-2009	
					Average	Trend (%/year)
a. Indonesia's Value Added Exports (US\$ billion), to:						
World	45.1	52.0	74.9	115.1	67.8	7.7
Advanced Economies	35.6	40.7	48.0	59.2	44.6	4.3
Developing Economies*	9.6	11.3	26.9	55.9	23.2	15.3
b. Indonesia's Gross Exports (US\$ billion), to:						
World	54.1	65.3	93.9	134.9	82.9	7.6
Advanced Economies	42.6	50.5	55.6	66.8	52.6	3.6
Developing Economies*	11.6	14.9	38.3	68.1	30.3	16.4
c. Ratio of Indonesia's Value Added Exports to the Gross Exports, to:						
World	0.834	0.795	0.798	0.853	0.815	0.1
Advanced Economies	0.835	0.806	0.864	0.886	0.844	0.7
Developing Economies*	0.829	0.758	0.703	0.821	0.778	-0.9
d. Ratio of Indonesia's Value Added Exports to the GDP, to:						
World	0.187	0.298	0.270	0.205	0.249	0.6
Advanced Economies	0.147	0.234	0.173	0.105	0.174	-2.6
Developing Economies*	0.040	0.065	0.097	0.100	0.076	7.7
e. Ratio of Foreign GDP to the World's GDP, in:						
Advanced Economies	0.784	0.769	0.734	0.658	0.742	-1.1
Developing Economies*	0.207	0.225	0.259	0.332	0.251	3.0

Source: Author's calculation based on the WIOD Database

Note: * Indonesia is excluded

Turning to the annual results as depicted in the Figure 3, Indonesia's value added exports to the world-to-GDP ratio climbed during 1995-2001 and continued to fall afterwards; resulting in average ratio of 24.9% during 1995-2009. The most visually striking change in Figure 3 is the sharp increase of value added export-to-GDP ratio in 1998. A year after Indonesia had undergone crisis in 1997, the total value added decreased considerably by 60.4%, especially on the value added generated from domestic final demands. At the same time, the value added exports attributed to the final demands abroad experienced smaller drop, thus creating the highest value added export-to-GDP ratio of 35% within the period of 1995-

2009. On the contrary, there was only 65% value added generated to satisfy Indonesia's final demand in 1998. Before that year, the value added reached more than 80% (rest over the bar in Figure 3).

The decomposition of value added export by market for final goods (Figure 3) demonstrates that the role of final demand in advanced economies towards Indonesia's income is declining, while the role of developing economies is increasing. Therefore, there was a switching composition of the Indonesia's value added export to the foreign market from the dependency mostly on advanced economies in 1995 (78.8 % in share) to relatively balanced market dependency, both on advanced and developing economies in 2009. It is

sensible to foster exports to developing economies because their economies continue to grow. In fact, the economic growth in developing economies has

been faster than those in the advanced economies, particularly after the Global Economic Recession 2008.

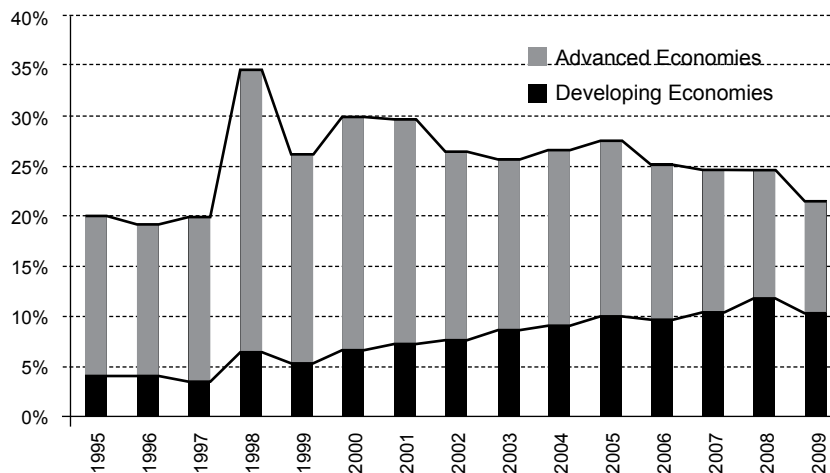


Figure 3. Value Added Exports by Market for Final Goods (% of GDP)

Source: Author's calculation based on the WIOD Database

Note: The bars in Figure 2 depict the share of Indonesia's value added exports induced by foreign final demands in advanced economies and developing economies. The remaining shares of the respective combined bars indicate Indonesia's value added exports induced by domestic final demand. Thus, the summation of the whole shares in each respective year will be 100%.

With regard to employment, Indonesia's export activities contributed to 16.4% of total employment in average during 1995-2009. For the benchmark years that are available on the Indonesia's Input-Output Table, the results are mostly similar to the work of Aswicahyono and Manning (2011). They found that the shares of employments induced by export activities to the total employment were 11.8% in 1995, 19.0% in 2000, and 16.6% in 2005. In this case, most of the results on the respective year are higher than those estimated by Aswicahyono and Manning (2011). Of course, it would not have similar results because of the different databases used.

They used Indonesian Input-Output Table of 66-sector classification. Meanwhile, in this study the World Input-Output Table of 35-sector classification and covered 41 countries (including RoW) is used. In addition, different exchange rate also causes different values of transaction flows on both Input-Output Tables. Therefore, this study claims that the results are better because it considered different export demands from different trade partners. In the International Input-Output setting, not only the direct effects of exporting final goods which can be calculated, but also the indirect effects induced by exports in intermediate goods caused by feedback effect and spillover

effect⁹ (Meng, Fang, and Yamano, 2012). Nevertheless, both results have the same magnitude, in the sense that

employment induced by exports in 2000 was the highest and followed by those in 2005 and 1995.

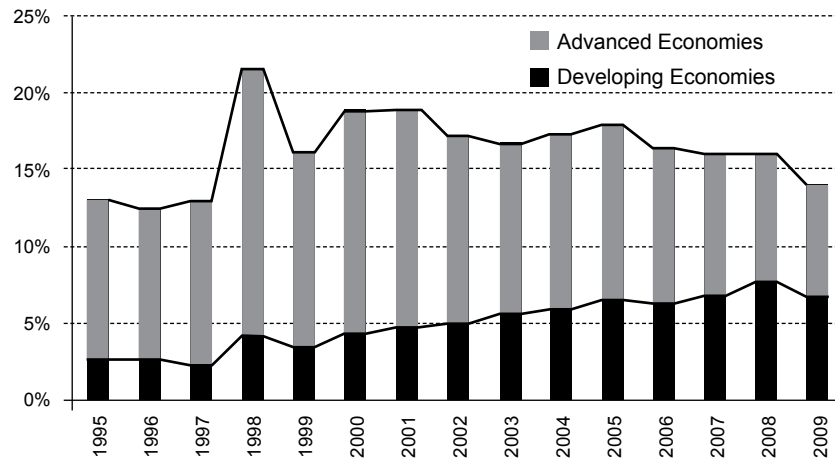


Figure 4. Employments Induced by Foreign Final Demand (% total workers)

Source: Author's calculation based on the WIOD Database

Note: The bars in Figure 3 depict the share of Indonesia's employments induced by foreign final demands in advanced economies and developing economies. The remaining shares of the respective combined bars indicate Indonesia's employments induced by domestic final demand. Thus, the summation of the whole shares in each respective year will be 100%.

The pattern of employment generated by serving foreign final demands in Figure 4 is almost the same as the pattern of the value added exports in Figure 3. It would not cause much difference whether focusing on the value added export or employment at the aggregate level. When the exports play important contribution to Indonesia's income in certain years, the increasing employment is also visible in the respective year. In 1998, for example, exports contributed mostly to generate income as well as for inducing employment. In contrast, the weak global demands in 2009 led to decreasing contribution of export value added toward Indonesia's GDP as well as

the share of export-related employment toward Indonesia's total employments.

Looking at more details of 1998, the number of employment induced by export activities increased by 67.6% or an additional 7.9 million workers from the previous year. This was because many workers had to switch from formal sectors to the informal sectors due to massive layoff during recession (Feridhanusetyawan, 2002). It should be noted that the employment data used in this analysis refers to the number of people involved in the production activities and is not limited only to employees but also the self-employed workers. The number of persons engaged

⁹ Spillover effect refers to the exogenous changes in final demand in one country that lead to increasing production in that country and rising imported inputs from other countries. Feedback effect occurs if the production of those inputs in the exporting country also requires imported materials from the originating country.

(EMP) for total industry in the WIOD database showed an increase of 0.7% in 1998 compared with 1997, while the number of employees (EMPE) dropped by 4.3%. To this respect, agriculture, hunting, forestry and fishing sectors had the largest contribution for inducing employment in 1998. It reaffirms that the informal sectors play an important role in creating Indonesia's employment during the Asian Financial Crisis.

Before turning into the next subsection, it is worth mentioning about the overestimation on the results. Indonesia's value added exports and employments induced by fulfilling final demands in developing economies are slightly overestimated because Rest of the World (RoW) is included in the developing economies category. Most RoW consists of developing countries, but some of them are considered to be advanced countries, i.e. Iceland, Israel, New Zealand, Norway, San Marino, Singapore, and Switzerland. Recalling from the research method section, the advanced economies of which data are not available are also included into RoW in the WIOD database.

The Dominant Export Markets and Sectors for Indonesia's Economy

The further decomposition of final demand indicates that Indonesia's major markets in advanced countries during the period 1995-2009 were concentrated in only G7 countries, particularly in the US and Japan. The average contribution of Indonesian value added exports to the G7's markets was relatively stable at 73.7% of total value added exports to the advanced countries (Figure 5.A).

Therefore, the declining Indonesian value added exports to developed countries markets during 1995-2009 were due to rapid annual drop of the value added export generated in G7 countries (-3.2%) relative to the other advanced countries (-0.9%).

In contrast to the results in advanced economies, the breakdown of final demand in developing economies, which emphasize on Brazil, Russia, India, China, Mexico, and Turkey (BRICMT), did not meet the expectation. The emerging markets of BRICMT gave modest contributions for Indonesia's income during 1995-2009, amounting to 40.3% of total value added exports to developing countries (Figure 4.B). On the other hand, other developing countries had larger contributions in generating Indonesia's income. Further, decomposition on BRICMT countries reveals that China and India contributed 58.8% and 19.6% respectively to Indonesia's income in the category of BRICMT countries. This led to a conclusion that Indonesia's exports to developing countries are much more dependent on Asian markets, especially in ASEAN countries. In addition, there was a sharp increase on Indonesia's export of value added in satisfying final demands for China, from 1.8% of GDP (2004) to 2% of GDP (2005). This may indicate that the commencement of ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) in 2004 has substantially impacted Indonesia's income. The tariff reduction under the ACFTA scheme does help Indonesia in boosting export flows directly to Chinese market or indirectly through other ASEAN countries.

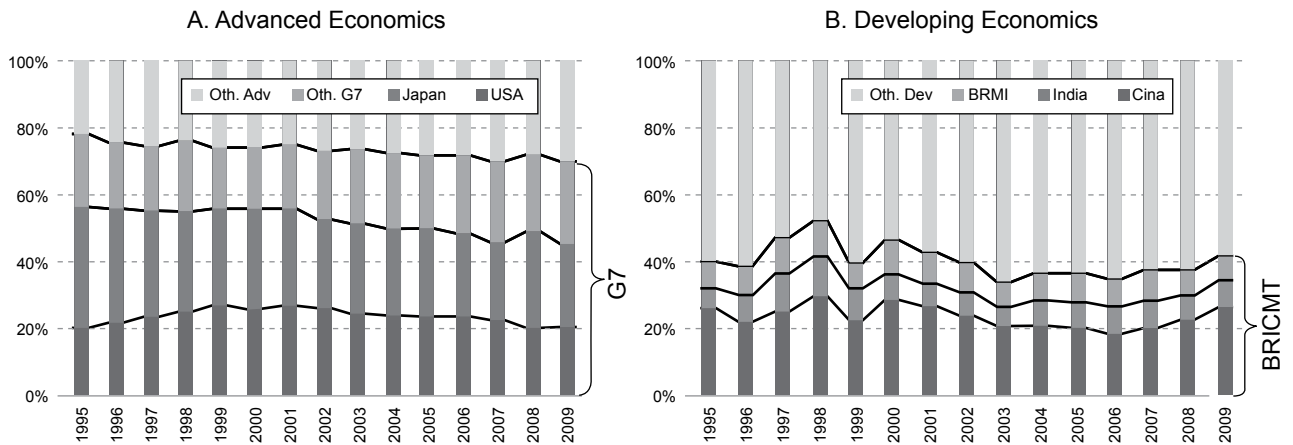


Figure 5. Share of Indonesia's Value Added Exports by Particular Markets for Final Goods

Source: Author's calculation based on the WIOD Database
 Notes: BRMT stands for Brazil, Russia, Mexico, and Turkey

Turning to sector decomposition, manufacturing exports to advanced and developing countries still have noticeable contribution to Indonesia's GDP. However, the contribution of manufacturing during 1995-2009 tended to decrease rapidly relative to other sectors (Figure 6). The production characteristics of manufactured goods, which are easily to be fragmented across borders and

the growing competition among global players, were the possible reasons for the declining export of value added on Indonesia's manufacturing. Along with the decline in the manufacturing and agriculture & mining sectors, the contribution of service sector to the Indonesia's global value chain income in advanced economies also experienced a decrease.

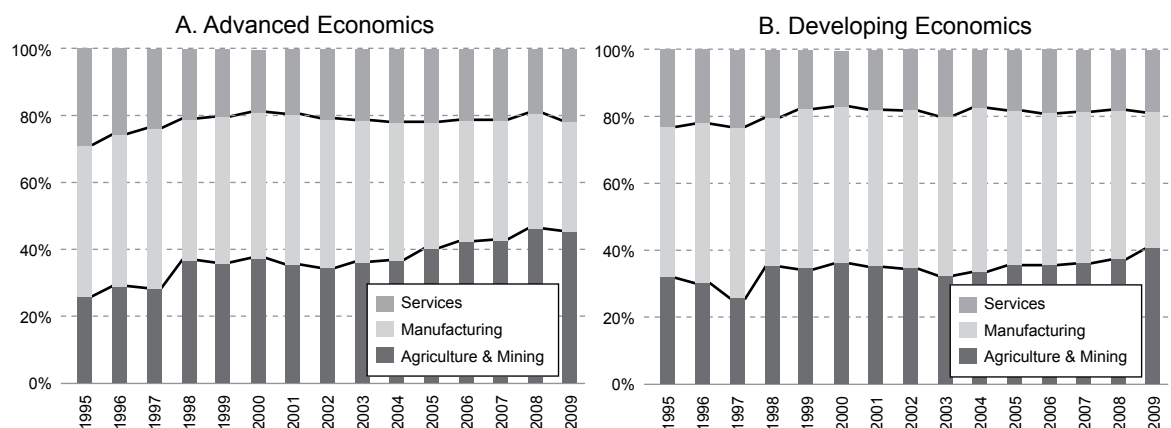


Figure 6. Share of Indonesia's Value Added Exports by Sectors and Markets for Final Goods

Source: Author's calculation based on the WIOD Database

To have better understanding on the impact of final demands in advanced economies and developing economies on Indonesia's economy at detail sector-level, some important export-related activities for Indonesia are presented as shown in Figure 7. The sizes of the bubbles are proportional to the average amount of value added during 1995-2005 in the corresponding sector; the vertical axis shows the annual growth of the sectoral value added exports; and the horizontal axis indicates the annual growth of employment of the respective sector. Irrespective to the market for the final goods, the higher contributors for Indonesian income mainly come from the same sectors (8 of 10 largest sectors). Moreover, they are dominated by natural resource-based products, such as mining, agriculture, and coke & refined petroleum.

Overall, it is obvious that final demands in developing economies tended to induce positive growth for Indonesia's value added and

employment in all sectors during 1995-2009. Meanwhile, not all sectoral value added and employment induced by final demands in advanced economies experienced positive growth during the period. For example, the value added exports generated in agriculture, hunting, forestry and fishing (c1) and food, beverages and tobacco (c3) continued to increase during 1995-2009, but the employments created in those sectors tended to decline (Figure 6.A). Mining and quarrying (c2) generated the largest value added attributed to the final goods market both in advanced and developing economies. However, the trend of value added and employment in mining and quarrying induced by final demands in developing countries were faster than those by final demands in advanced countries. This indicates that the market for Indonesia's mining and quarrying products in developing economies was growing and more advantageous to Indonesia's economy in terms of generating value added and employment.

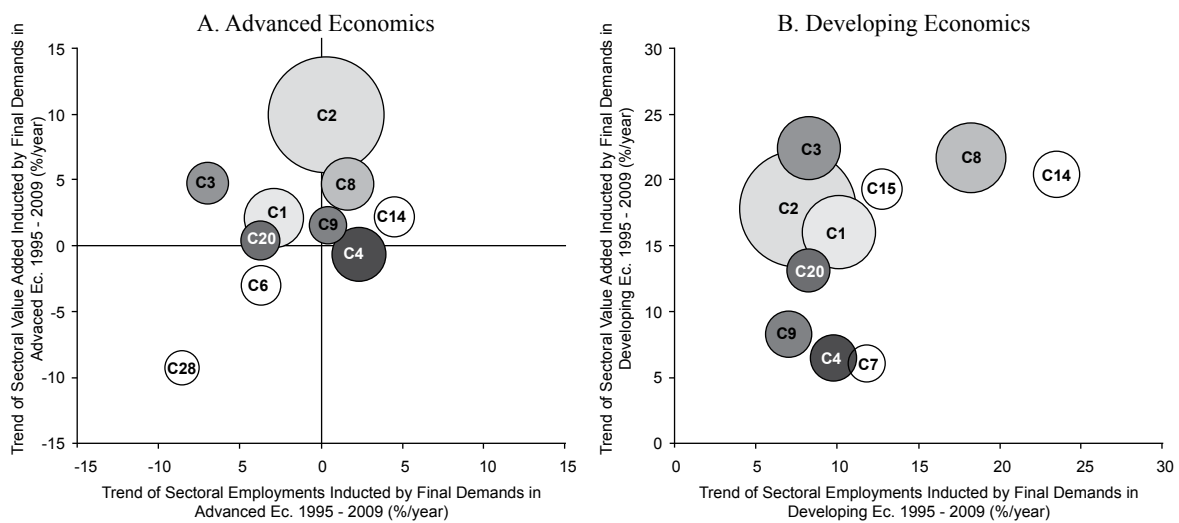


Figure 7. The Development of 10 Largest Sectoral Indonesia's Value Added Exports and Employment Induced by Final Demand in Advanced and Developing Economies

Notes: - Descriptions of the bubbles: (c1) Agriculture, Hunting, Forestry and Fishing; (c2) Mining and Quarrying; (c3) Food, Beverages and Tobacco; (c4) Textiles and Textile Products; (c6) Wood and Products of Wood and Cork; (c7) Pulp, Paper, Paper, Printing and Publishing; (c8) Coke, Refined Petroleum and Nuclear Fuel; (c9) Chemicals and Chemical Products; (c14) Electrical and Optical Equipment; (c15) Transport Equipment; (c20) Wholesale Trade and Commission Trade, Except of Motor Vehicles and Motorcycles; and (c28) Financial Intermediation.

- The 10 largest export-related activities to developing economies covered 74.9% of total value added exports to developing countries on average during 1995-2009, while the average share of 10 largest sectoral value added exports related to advanced economies was 72.4%.

Source: Author's calculation based on the WIOD Database

CONCLUSION AND POLICY RECOMMENDATION

In the last decades, the international organization of production has undergone many changes. The production process is no longer entirely completed by one company in a country but is now taken by many companies in various countries. Consequently, conventional trade statistics may provide less relevant pictures on the importance of trade to an economy when the global production fragmentation presents. It only considers the direct trade flow across borders and cannot measure the impact of final

demand of the producing country along the global supply chain. Therefore, it is necessary to use an alternative measure which is able to capture the recent production phenomenon, i.e. value added approach.

The final demands in advanced countries have higher impact on generating Indonesia's income (value added) and employment rather than final demands in the developing countries. However, Indonesia's income and employment induced from catering market in developing economies is growing faster than serving the advanced countries. It indicates that Indonesia has

benefited from stronger demands that currently occurred in most developing countries. Therefore, the author believes that the Indonesian export policy on market diversification to developing countries will continue to have positive impacts on Indonesia's economy. Despite the strong demand in developing countries, it should be cautious that mining and quarrying become the main sector generating higher income and employment in Indonesia. The higher income from this sector is possibly due to the higher international price and exploitation of natural resources rather than due to the down streaming of the production process.

For Indonesia, serving the final demand in developing countries creates a higher intensity of global production sharing compare to serving the final demand in advanced countries. It might indicate that producing final goods for developing countries needs intermediate goods or involves many production stages across countries. Therefore, enhancing production integration within the same region (East Asia or ASEAN) can be an effective strategy to induce higher Indonesia's income and employment directly and indirectly.

REFERENCES

- Armstrong, M and M. Burt. (2012). *Adding Value to Trade Measures: Understanding Canada's Role in Global Value Chains*. Ottawa: The Conference Board of Canada.
- Aswicahyono, H. and C. Manning. (2011). Exports and Job Creation in Indonesia Before and After the Asian Financial Crisis. *Departmental Working Papers 2011-11*, Australian National University, Arndt-Corden Department of Economics.
- Baldwin, R. (2006). Globalisation: The Great Unbundling(s). *Globalisation Challenges for Europe*. Helsinki: Office of the Prime Minister of Finland.
- Baldwin, R. and A. Venables. (2010). Spiders and Snakes: Offshoring and Agglomeration in the Global Economy. *NBER Working Papers* No. 16611.
- Choy, K. M. (2009). Trade Cycles in a Re-export Economy: The Case of Singapore. *Economic Growth Centre Working Paper* No. 2009/05, Division of Economics, Nanyang Technological University.
- Commission des Finances du Sénat. (2011). Globalization of Industrial Production Chains and Measurement of Trade in Value Added. Accessed on 4 April 2013 from <http://www.wto.org>.
- Feridhanusetyawan, T. (2002). The Social Impact of the Indonesian Economic Crisis: Labour Market Adjustments. EADN Regional Project.
- Hummels, D., J. Ishii, and K. Yi. (2001). The Nature and Growth of Vertical Specialization in World Trade. *Journal of International Economics*, Vol. 54 (1), pp. 75-96.
- Johnson, R. C. and G. Noguera. (2012). Accounting for Intermediates: Production Sharing and Trade in Value Added. *Journal of International Economics*, Vol. 86 (2), pp. 224-236.
- Koopman, R., Z. Wang, and S. Wei. (2012). Tracing Value-added and Double Counting in Gross Exports. *NBER Working Paper* No. 18579.
- Los, B., M. Timmer and G. de Vries. (2012). China and the World Economy: A Global Value Chain Perspective on Exports, Incomes and Jobs. *Research Memorandum GD-128*, University of Groningen, Groningen Growth and Development Centre.
- Maurer, A. and C. Degain. (2010). Globalization and Trade Flows: What You See is Not What You Get! *WTO Staff Working Paper* ERSD-2010-12.

- Meng, B., Y. Fang, and N. Yamano. (2012). Measuring Global Value Chains and Regional Economic Integration: An International Input–Output Approach. *IDE Discussion Papers* No. 362.
- Miller, R. E. and P. D. Blair. (2009). *Input-Output Analysis: Foundations and Extensions*. UK: Cambridge University Press, 2nd Edition.
- Ministry of Trade of the Republic of Indonesia. (2010). Strategic Plan of Ministry of Trade 2010-2014. Accessed on 3 September 2010 from www.kemendag.go.id
- Riad, N., et al. (2012). Changing Patterns of Global Trade. IMF Strategy, Policy, and Review Department No. 12/1.
- Scilab 5.3.3. Accessed on 15 November 2012 from <http://www.scilab.org/en/download/5.3.3>.
- Singapore Department of Statistics. Accessed on 13 June 2013 from <http://www.singstat.gov.sg>
- Stehrer, R. (2012). Trade in Value Added and the Value Added in Trade. *WIOD Working Paper* No. 8.
- Stehrer, R., N. Foster, and G. de Vries. (2012). Value Added and Factors in Trade: A Comprehensive Approach. *WIOD Working Paper* No. 7.
- Timmer, M. P. (Ed.). (2012). The World Input-Output Database (WIOD): Contents, Sources and Methods. *WIOD Working Paper* No. 10.
- Timmer, M. P. et al. (2012b). Fragmentation, Incomes, and Jobs. An Analysis of European Competitiveness. *WIOD Working Paper* No. 9.
- Timmer, M.P. et al. (2012a). New Measures of European Competitiveness: A Global Value Chain Perspective. Background paper for the WIOD project presentation at the high-level conference on “Competitiveness, Trade, Environment and Jobs in Europe: Insights from the New World Input Output Database (WIOD),” April 16 2012.
- United Nations Commodity Trade Statistics Database (UN Comtrade). (2013). Accessed on 1 June 2013 from <http://wits.worldbank.org/wits>.
- Wilson, D. and R. Purushothaman. (2003). Dreaming With BRICs: The Path to 2050. *Goldman Sachs Global Economics Paper* No. 99
- World Input-Output Database (WIOD). Accessed on 18 May 2013 from <http://www.wiod.org>.
- WTO and IDE-JETRO. (2011). Trade Patterns and Global Value Chains in East Asia: From Trade in Goods to Trade in Tasks. Accessed on 30 March 2013 from <http://www.wto.org>.
- Pula, G. and T. A. Peltonen. (2009). Has Emerging Asia decoupled? An Analysis of Production and Trade Linkages Using the Asian International Input-Output Table. *European Central Bank Working Paper Series* No. 993.

**DAMPAK PENURUNAN EKSPOR TERHADAP PENYERAPAN
TENAGA KERJA**
The Impact of Export Contraction on Labor Absorption

Tri Wibowo

Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
Jl. Dr. Wahidin 1, Jakarta 10710, 3wibowo@gmail.com

Naskah diterima: 27 Agustus 2013
Disetujui diterbitkan: 26 November 2013

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dampak penurunan ekspor terhadap penyerapan tenaga kerja dengan menggunakan analisis multiplier tenaga kerja dari tabel *input-output*. Hasil analisis secara sektoral menunjukkan bahwa pada saat terjadi penurunan ekspor di sektor industri sebesar 4,9% dan sektor pertambangan sebesar 9,6% akan berdampak terhadap hilangnya kesempatan kerja, meskipun terjadi kenaikan ekspor di sektor pertanian sebesar 8%. Pangsa kesempatan kerja di sektor pertanian pada periode 2006–2008 sebesar 41,2%, mengalami penurunan menjadi 38% pada periode 2009–2011. Kondisi ini mengindikasikan bahwa telah terjadi pergeseran tenaga kerja sektor pertanian ke non pertanian, khususnya industri dan jasa. Peningkatan teknologi di sektor pertanian akan meningkatkan produktivitas, daya tarik sektor tersebut, dan mengurangi tingginya migrasi tenaga kerja sektor pertanian ke sektor lain.

Kata kunci: Dampak Ekspor, Penyerapan Tenaga Kerja, Pergeseran Tenaga Kerja

Abstract

This article aims to figure out the impact of decreasing export against employment opportunity by using labor multiplier analysis from input-output table. Sectoral analysis shows that decreasing export in industrial sector creates a large loss of employment opportunities not only in the respective sector, but also in other sectors such as agriculture and trade. From the period of 2011 to 2012, an 8% decreased in agricultural exports together with a 9.6% and a 4.9% decreased in mining and industrial sectors respectively, created unemployment. Labor market share in agricultural sector in the period of 2006-2008 was 41.2% and then it decreased to 38% in the period of 2009 - 2011. This indicates that there was a shift of labor from agricultural to non-agricultural sectors, especially industry and services. The advancement of technology in agricultural sector could increase the productivity, attractiveness, and reduce the shift of workers from agricultural sector to the others.

Keywords: Impact of Exports, Employment Absorption, Employment Shift

JEL Classification : F16, J21, P23

PENDAHULUAN

Kondisi perekonomian dunia tahun 2013 diperkirakan menghadapi tantangan yang cukup berat. Tekanan pertumbuhan ekonomi dunia ini tercermin dari revisi perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia yang dikeluarkan International Monetary Fund (IMF). Pada Januari 2012, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2013 masih sebesar 3,9%. Perkiraan tersebut pada Januari 2013 (WEO, 2013) direvisi menjadi 3,6%. Pada Oktober 2012 (WEO, 2012), IMF merevisi lagi pertumbuhan ekonomi dunia menjadi 3,5%. Revisi perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia oleh IMF yang terus mengalami penurunan ini mengindikasikan bahwa perekonomian dunia tahun 2013 masih lesu. Kondisi ini cepat atau lambat akan mempengaruhi perekonomian Indonesia.

Perlambatan perekonomian dunia tersebut dimulai dari krisis keuangan Eropa yaitu defisit anggaran pemerintah yang semakin besar, bermula dari krisis di negara Yunani, Irlandia, dan Portugal. Melebarnya defisit anggaran pemerintah disertai dengan rasio hutang terhadap PDB menyebabkan kemampuan memperoleh pembiayaan menjadi terbatas. Tidak berfungsinya kebijakan moneter dalam kawasan Euro, terbatasnya ruang gerak fiskal, serta lambatnya upaya pemulihan, mendorong perlambatan bahkan penurunan perekonomian pada beberapa negara lain kawasan Eropa.

Dengan perekonomian Indonesia yang semakin terbuka, imbas krisis keuangan Eropa dikhawatirkan dapat melebar tidak hanya di negara-negara kawasan Eropa serta negara maju,

tetapi juga berimbas di negara-negara *emerging market*, tidak terkecuali Indonesia. *Capital inflow* yang masuk ke negara *emerging market* lebih didominasi oleh *portofolio investment* yang bersifat jangka pendek dibanding *Foreign Direct Investment* (FDI). Krisis ini akan berdampak terhadap perekonomian domestik dan berimbas pada kinerja sektor riil. Volume dan nilai ekspor mengalami tekanan, pendapatan perusahaan mengalami penurunan, yang pada akhirnya akan berdampak pada pasar tenaga kerja.

World of Work Report (ILO, 2011), memperkirakan bahwa pasar tenaga kerja dunia akan diserbu angkatan kerja usia muda. Dalam dua tahun ke depan, dibutuhkan sekitar 80 juta pekerjaan baru untuk mengembalikan tingkat lapangan kerja sebelum krisis pada tahun 2007. Negara maju diperkirakan kekurangan lapangan kerja sekitar 25 juta dan negara *emerging* sekitar 15 juta. Dengan kondisi perlambatan ekonomi dunia seperti itu, maka diperkirakan lapangan kerja baru hanya akan mampu menyerap separuhnya. Lapangan kerja di negara maju diperkirakan tidak akan kembali seperti sebelum masa krisis sampai dengan tahun 2016.

Meskipun kondisi perekonomian global mengalami penurunan, perekonomian Indonesia pada tahun 2012 mampu tumbuh 6,2%. Dari sisi sektoral, sektor padat tenaga kerja seperti pertanian dan industri tumbuh lebih lambat dibanding sektor padat modal seperti sektor pengangkutan dan telekomunikasi. Sektor pertanian pada tahun 2012 hanya mampu tumbuh sebesar 4,0% (yoy), sektor industri tumbuh sebesar 5,7%. Di sisi lain, sektor

pengangkutan dan telekomunikasi mampu tumbuh sebesar 10,0%. Kondisi ini tentu menjadi tantangan bagi pemerintah dalam penyerapan tenaga kerja.

Kondisi perekonomian tahun 2013 yang masih dibayang-bayangi krisis Eropa, dan melemahnya perekonomian AS serta Cina, akan berimbas pada melemahnya permintaan ekspor Indonesia. Kondisi ini telah mulai terlihat pada tahun 2012. Pada tahun 2011, ekspor non migas Indonesia sebesar USD162 miliar, turun menjadi USD 153 miliar pada tahun 2012 atau mengalami penurunan sebesar USD 5 miliar (5,5%).

Tenaga kerja Indonesia pada tahun 2011 tercatat sebesar 111,3 juta orang, mengalami kenaikan sebesar 1,4% pada tahun 2012 yaitu menjadi 112,8 juta orang. Walaupun secara keseluruhan pada tahun 2012 tenaga kerja Indonesia mengalami kenaikan, namun tenaga kerja sektor pertanian mengalami penurunan dari 41,2 juta orang pada tahun 2011, menjadi 41,2 juta orang pada tahun 2012, atau mengalami penurunan sebesar 3%.

Naik turunnya tenaga kerja suatu sektor akan memberikan dampak terhadap sektor lainnya. Tulisan ini ingin melihat keterkaitan tenaga kerja antar sektor pada saat terjadi penurunan ekspor, bagaimana dampak terhadap sektor itu sendiri serta keterkaitan terhadap sektor lainnya. Analisis dilakukan dengan menggunakan data ekspor tahun 2012 dengan pertimbangan pada tahun tersebut ekspor Indonesia mengalami penurunan dan terjadi defisit pada Neraca Pembayaran Indonesia (NPI). Untuk melihat pergeseran tenaga kerja sektoral tersebut, digunakan

data tenaga kerja periode 2006–2008 untuk periode sebelum krisis finansial 2008/2009 dan data periode 2009–2011 untuk periode sesudah krisis finansial 2008/2009.

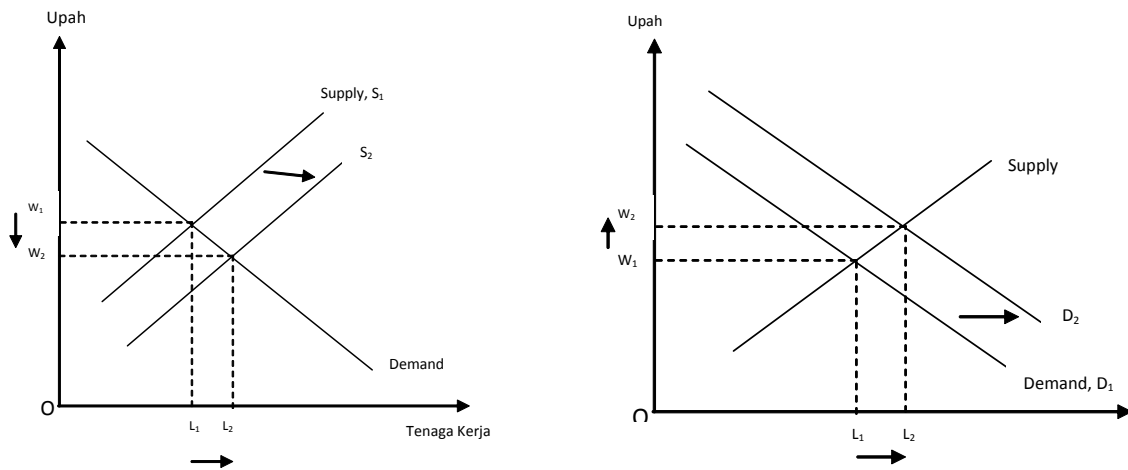
TINJAUAN PUSTAKA

Pergeseran Tenaga Kerja

Mankiw (2010) menyatakan, pergeseran penawaran dan permintaan tenaga kerja akan menambah tenaga kerja, namun memiliki pengaruh yang berbeda terhadap upah tenaga kerja. Penambahan penawaran tenaga kerja akan menyebabkan turunnya tingkat upah, sedangkan penambahan permintaan tenaga kerja akan menyebabkan naiknya tingkat upah.

Ketika terjadi kenaikan pasokan tenaga kerja dari S_1 ke S_2 , keseimbangan upah akan turun dari W_1 ke W_2 . Pada upah rendah tersebut, perusahaan akan mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja, sehingga tenaga kerja akan mengalami kenaikan yaitu naik dari L_1 ke L_2 . Perubahan upah mencerminkan perubahan nilai dari marginal produk tenaga kerja. Dengan adanya peningkatan tenaga kerja karena adanya kenaikan pasokan (*supply*), upah yang diterima seorang pekerja akan menjadi lebih rendah.

Ketika permintaan tenaga kerja meningkat dari D_1 ke D_2 , mungkin karena peningkatan harga produk perusahaan, keseimbangan upah naik dari W_1 ke W_2 , dan akan terjadi kenaikan tenaga kerja dari L_1 ke L_2 . Perubahan upah mencerminkan perubahan dalam nilai marginal produk tenaga kerja.



Gambar 1. Pergeseran Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja

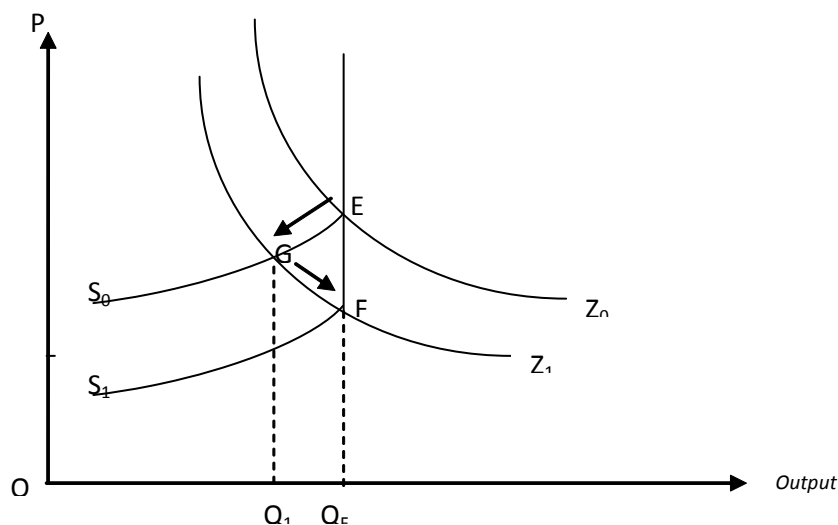
Sumber: Mankiw (2010)

Keseimbangan Tenaga Kerja

Permasalahan yang sering muncul dalam ketenagakerjaan adalah terjadinya ketidakseimbangan antara permintaan tenaga kerja (*demand for labor*) dan penawaran tenaga kerja (*supply of labor*), pada suatu tingkat upah. Kelebihan penawaran tenaga kerja akan mengakibatkan *excess supply of labor*, sedangkan apabila permintaan lebih besar daripada penawaran tenaga kerja akan mengakibatkan terjadinya *excess*

demand for labor dalam pasar tenaga kerja.

Boediono (1999), terkait dengan pasar tenaga kerja menyatakan bahwa semua harga-harga (termasuk harga tenaga kerja, yaitu upah) fleksibel ke atas maupun kebawah, dan pelaku ekonomi bereaksi secara cepat dan rasional terhadap perubahan harga tersebut, sehingga penyimpangan dari posisi "*full employment*" hanya bersifat sementara. Kondisi tersebut seperti dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Keseimbangan Tenaga Kerja

Sumber: Boediono (1999)

Pada awalnya keseimbangan berada diposisi E dengan tingkat *output* sebesar QF yang akan menyerap seluruh angkatan kerja atau tingkat output “*full employment*”. Apabila terjadi penurunan permintaan agregat dari Z0 ke Z1. Reaksi pertama dalam perekonomian adalah menurunnya output dari QF ke Q1 (atau pergerakan E ke G) yang diikuti dengan adanya pengangguran tenaga kerja. Pengangguran ini hanya bersifat sementara, karena adanya para pengangguran atau kelebihan tenaga kerja akan mendorong tingkat upah turun. Menurunnya tingkat upah berarti akan menurunkan biaya marginal (*marginal cost*) untuk menghasilkan *output*. Kondisi ini disebabkan karena harga salah satu input variabel (upah tenaga kerja) menjadi lebih murah, maka biaya total akan menjadi turun, akibatnya kurva penawaran agregat bergeser ke bawah dari S0 ke S1.

Tingkat upah akan menurun terus selama masih terjadi pengangguran, dan kurva penawaran agregat juga akan terus bergeser ke bawah. Proses ini akan berhenti apabila semua orang telah bekerja kembali, atau dengan perkataan lain bila tingkat output “*full employment*” tercapai kembali. Kondisi ini ditunjukkan oleh pergerakan dari G ke F. Posisi keseimbangan baru ini ditandai oleh: (a) tercapainya output “*full employment*” dan (b) tingkat harga dan tingkat upah yang lebih rendah.

Proses menuju posisi *equilibrium* baru, kadang-kadang memakan waktu yang cukup lama, tergantung pada berapa besar hambatan-hambatan yang merintang proses tersebut, termasuk di antaranya: (a) ketegaran dan fleksibilitas yang tidak sempurna dari harga dan

upah meskipun pengangguran ada dimana-mana, dan (b) kelambatan reaksi para pelaku ekonomi (produsen, konsumen, buruh) terhadap situasi ekonomi yang baru karena misalnya, tidak diperolehnya informasi yang cukup mengenai situasi terkini.

Model Input- Output

Tabel *Input-Output* (I-O) sebagai model matematis memiliki asumsi dasar dalam penyusunannya. Asumsi–asumsi tersebut, antara lain (BPS, 2008a):

1. Keseragaman (*homogeneity*), yaitu asumsi bahwa setiap sektor ekonomi hanya memproduksi satu jenis barang atau jasa dengan susunan *input* tunggal (seragam) dan tidak ada substitusi otomatis terhadap *input* dan *output* sektor yang berbeda.
2. Kesebandingan (*proportionality*), yaitu asumsi bahwa hubungan antar *input* dan *output* pada setiap sektor produksi merupakan fungsi *linier*, artinya kenaikan dan penurunan *output* suatu sektor akan sebanding dengan kenaikan dan penurunan *input* yang digunakan oleh sektor tersebut.
3. Penjumlahan (*additivity*), yaitu asumsi bahwa total efek dan kegiatan produksi di berbagai sektor merupakan penjumlahan dari efek pada masing-masing kegiatan.

Lebih lanjut (BPS, 2008b) analisis dengan tabel *Input-Output* sebagai model kuantitatif memiliki keterbatasan, yaitu koefisien *input* atau koefisien teknis diasumsikan tetap (konstan) selama periode analisis atau proyeksi, maka teknologi yang digunakan oleh sektor-sektor ekonomi dalam proses produksi

pun dianggap konstan. Akibatnya, perubahan kuantitas dan harga *input* akan selalu sebanding dengan perubahan kuantitas harga *output*.

Terdapat berbagai model analisis yang dapat digunakan selain tabel *Input-Output* seperti *Computable General Equilibrium* (CGE), *Global Trade Analysis Project* (GTAP) yang merupakan CGE dengan multisektor dan multiregion. Namun model tersebut mempunyai tingkat kerumitan yang tinggi dan analisis harus diselesaikan

dengan menggunakan *software* yang relatif mahal seperti Gempack atau GAMS. Walaupun mempunyai keterbatasan, namun Tabel *Input-Output* merupakan alat analisa yang lengkap dan komprehensif. Keunggulan Tabel *Input Output* antara lain Model *Input-Output* memberikan deskripsi yang detail mengenai perekonomian nasional maupun perekonomian regional serta mampu menggambarkan keterkaitan antar sektor. Analisis juga cukup menggunakan *software* EXCEL.

Tabel 1. Struktur Tabel *Input Output*

Struktur Input \ Alokasi Output	Sektor	Permintaan Antara						Permintaan Akhir	Jumlah Output
		1	2	.	.	.	n		
Input Antara	1	X_{11}	X_{12}	.	.	.	X_{1n}	F_1	X_1
	2	X_{21}	X_{22}	.	.	.	X_{2n}	F_2	X_2

	n	X_{n1}	X_{n2}	.	.	.	X_{nn}	F_n	X_n
Input Primer		V_1	V_2	.	.	.	V_n		
Jumlah Input		X_1	X_2	.	.	.	X_n		

Sumber : Sitepu (2011)

Struktur Tabel I-O digambarkan dalam bentuk matriks seperti disajikan pada Tabel 1, dimana matriks Tabel I-O dapat dibagi dalam empat kuadran, yaitu kuadran I, II, III dan kuadran IV. Kuadran pertama, menunjukkan arus barang dan jasa yang dihasilkan dan digunakan masing-masing sektor dalam suatu perekonomian. Kuadran pertama ini sangat penting karena menunjukkan saling ketergantungan antar sektor ekonomi di dalam suatu proses produksi. Kuadran kedua, menunjukkan permintaan akhir, penggunaan atau konsumsi barang dan jasa bukan

untuk proses produksi. Kuadran ketiga, menunjukkan input primer sektor-sektor produksi, dan kuadran ke empat, memperlihatkan input primer yang langsung didistribusikan ke sektor-sektor permintaan akhir.

Studi Sebelumnya

Molnar dan Lesher (2009) menyimpulkan, walalupun pertumbuhan ekonomi mulai menunjukkan pemulihan mulai tahun 2000, namun sektor padat karya seperti sektor manufaktur mengalami pertumbuhan yang lambat. Lambatnya pertumbuhan pada sektor-sektor padat

karya telah mengakibatkan tingginya angka pengangguran. Pada tahun 1997, tingkat pengangguran sebesar 4,8%, naik hampir dua kali lipat menjadi 9,1% pada tahun 2007. Pangsa ekspor komoditas berteknologi tinggi Indonesia mulai tahun 2000 sampai dengan 2006 terus mengalami penurunan. Kondisi ini berbanding terbalik dengan Cina yang pangsa ekspornya komoditas berteknologi tinggi terus tumbuh pesat.

Sementara itu Irawan, Anggraeni dan Oktaviani (2011) menganalisis dampak *eksternal shock* pada industri manufaktur. Analisis I-O dengan biplot selama periode 2000, 2003 dan 2005 menunjukkan hasil koefisien Leontief yang hampir sama. Hasil ini mengindikasikan bahwa tidak ada perubahan teknologi selama periode penelitian. Dampak krisis ekonomi telah mengakibatkan turunnya kinerja sektor industri manufaktur. Industri berbasis pertanian relatif lebih cepat pulih dibanding industri lainnya. Pemerintah perlu melakukan diversifikasi sektor manufaktur dalam rangka menghadapi kemungkinan guncangan terhadap perekonomian. Jika tidak ada perbaikan teknologi, manufaktur Indonesia tidak memiliki kemampuan untuk meningkatkan daya saing dan akan tertinggal dari negara lain.

Tekanan kenaikan biaya dan upah minimum telah membuat pengusaha industri sepatu merasionalisasi jumlah buruh secara bertahap demi mempertahankan usaha. Gelombang rasionalisasi atau PHK yang terjadi sejak Januari – Juni 2013 menimpa sedikitnya 44 ribu buruh industri sepatu. Industri alas kaki dan garmen merupakan sektor industri padat karya

yang menyerap sedikitnya 4 juta tenaga kerja dan menghasilkan devisa ekspor USD 20 miliar atau Rp 200 triliun per tahun (Kompas, 29 Juli 2013).

Terjadinya resesi global akan berdampak pada tingginya angka PHK. Pendapatan rumah tangga menjadi menurun, sehingga rumah tangga akan menanggung biaya perlambatan ekonomi. Diperlukan dukungan pemerintah untuk mempertahankan daya beli salah satunya melalui keringanan pajak. Adanya keringan pajak akan memperkuat konsumsi domestik (ILO, 2008).

Dalam mengatasi krisis 2008, negara-negara di seluruh dunia mengeluarkan berbagai upaya penyelamatan. Respon kebijakan fiskal dilakukan berbagai negara melalui peningkatan pengeluaran pemerintah khususnya untuk belanja barang publik, pemberian berbagai keringan pajak, serta memberikan stimulus fiskal untuk perusahaan, dan pemberian subsidi. Negara-negara yang masuk dalam kelompok G-20, dilihat dari persentase besaran stimulus fiskal terhadap PDB yang dikeluarkan pemerintah untuk menahan gejolak krisis, Indonesia menempati urutan ke-17. Dilihat dari dekomposisinya, sebagian besar stimulus fiskal di Indonesia berupa pemberian keringanan/pemotongan pajak dalam bentuk pajak ditanggung pemerintah (ILO, 2011).

Oktaviani dan Puspitawati (2004) berpendapat bahwa dengan adanya globalisasi membawa konsekuensi bagi negara-negara di dunia. Konsekuensi yang pasti terjadi adalah peningkatan tantangan dengan semakin meningkatnya persaingan. Selain itu, peluang perdagangan semakin

terbuka dengan semakin dihapusnya hambatan-hambatan perdagangan. Manfaat globalisasi secara umum bagi perdagangan bebas adalah meningkatnya total perdagangan dunia.

Pada prakteknya, Indonesia tidak menyiapkannya secara terencana dan baik adanya liberalisasi, sehingga pemerintah tidak bebas lagi dalam menentukan kebijakan. Keuntungan ekspor hanya sampai pelabuhan, sedangkan kegiatan lainnya seperti pengangkutan, bank, dan asuransi diambil oleh negara maju.

James dan Fujita (2000) menyatakan bahwa ekspor manufaktur pada gilirannya telah menghasilkan tambahan penyerapan kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui hubungan antar industri. Penelitian tersebut memperkirakan dampak ekspor manufaktur terhadap tenaga kerja dengan menggunakan *Input output* yang dibagi menjadi dua periode yaitu 1985 – 1990 dan 1990 – 1995. Pada periode terakhir, meskipun terjadi pertumbuhan yang cepat dari produksi dan ekspor, penciptaan lapangan kerja jauh lebih kuat dari pada periode 1985-1990. Meskipun ekspor industri ringan terus berkembang, tetapi tidak menghasilkan banyak tambahan pekerjaan seperti di masa lalu. Selain itu, terjadi perubahan distribusi tenaga kerja secara signifikan antara dua periode penelitian.

Oktaviani, Widyastutik dan Amaliah (2013) melakukan analisis FTA dengan menggunakan GTAP diperoleh hasil bahwa peningkatan output akan menyebabkan kelebihan penawaran domestik yang selanjutnya mendorong peningkatan ekspor dan sekaligus peningkatan kesempatan kerja. Hasil

ini konsisten juga bagi komoditas yang mengalami penurunan output, maka ekspor maupun kesempatan kerjanya juga mengalami penurunan. Lebih lanjut analisis I-O diperoleh hasil bahwa tidak terdapat perubahan struktural yang cukup berarti pada industri di Indonesia selama kurun waktu 1995 – 2005, baik keterkaitan ke depan, keterkaitan ke belakang, maupun *multiplier output*, yang menunjukkan stagnasi penguasaan dan penerapan teknologi.

Penyerapan tenaga kerja lebih sedikit diciptakan melalui ekspor di industri manufaktur pada tahun 2005 dibandingkan sebelum krisis, karena pertumbuhan lebih lambat dalam ekspor manufaktur (Arwicahyono, Douglas dan Manning, 2011). Perlambatan ini terjadi karena pasokan tenaga kerja tidak terampil, meskipun terdapat peningkatan pekerjaan di sektor jasa, sebagian disebabkan karena koneksi langsung dengan ekspor. Hambatan utama untuk penciptaan lapangan kerja melalui ekspor muncul di sisi pasokan, khususnya yang berkaitan dengan infrastruktur yang buruk, iklim investasi yang tidak menentu, dan peraturan tenaga kerja yang ketat.

Sementara itu ILO (2013) menyatakan bahwa meskipun, mengalami kemajuan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (HDI) tahun 2010 menduduki peringkat 108 dari 169 negara, dan pada tahun 2011 peringkatnya turun ke 124 dari 187 negara. Indonesia telah membuat beberapa kemajuan dalam pengembangan pendidikan dengan penurunan angka buta huruf dalam dekade terakhir. Tingkat kemiskinan telah menurun meskipun masih tinggi,

namun populasi kelas menengah terus meningkat. Mayoritas penduduk bekerja di Indonesia (2005-2009) memiliki tingkat pendidikan yang rendah; yaitu lebih dari 50% baik yang tidak pernah sekolah atau tidak lulus tingkat sekolah dasar. Bagian dari penduduk yang bekerja dengan pendidikan universitas relatif kecil meskipun meningkat. Pada tahun 2010 hanya terdapat sepertiga dari orang yang dipekerjakan di Indonesia memiliki hubungan kerja formal.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam tulisan ini adalah analisis diskriptif dengan memaparkan kondisi tenaga kerja di Indonesia. Untuk mengetahui dampak kesempatan kerja, digunakan analisis tabel I-O. Tabel I-O yang digunakan dalam analisis adalah I-O transaksi domestik atas dasar harga

produsen tahun 2008. Analisis ini digunakan untuk melihat penambahan kesempatan kerja baru akibat peningkatan permintaan akhir di suatu sektor tertentu, atau sebaliknya apabila terjadi penurunan permintaan akhir.

Tabel I-O yang tersedia paling akhir adalah tahun 2008. Salah satu keterbatasan analisis I-O adalah koefisien teknis diasumsikan tetap (konstan) selama periode analisis. Oleh karena itu, analisis dampak ekspor terhadap tenaga kerja diasumsikan tidak mengalami perubahan. *Multiplier* tenaga kerja tahun 2008 diasumsikan tidak berubah pada tahun 2012. Asumsi ini diperkuat oleh temuan Oktaviani, Widyastutik dan Amaliah (2013) yang menyatakan tidak terdapat perubahan struktural yang cukup berarti pada industri di Indonesia selama kurun waktu 1995–2005, baik keterkaitan ke depan, keterkaitan ke belakang, maupun *multiplier output*.

Struktur tabel I-O di atas dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\begin{matrix}
 X_{11} + X_{12} + \dots + X_{1n} + F_1 & = & X_1 \\
 X_{21} + X_{22} + \dots + X_{2n} + F_2 & = & X_2 \\
 \vdots & & \vdots \\
 X_{n1} + X_{n2} + \dots + X_{nn} + F_n & = & X_n
 \end{matrix} \dots \dots \dots (1)$$

atau disederhanakan menjadi :

$$\sum_{j=1}^i X_{ij} + F_i = X_i \dots \dots \dots (2)$$

dimana :

- X_{ij} = banyaknya output sektor i yang dipergunakan sebagai input oleh sektor j
- F_i = jumlah permintaan akhir untuk masing-masing sektor i
- X_i = jumlah output sektor i

Lebih lanjut Sitepu (2011), dengan mengetahui nilai X_{ij} dan X_i dapat dihitung koefisien teknologi a_{ij} sebagai berikut :

$$a_{ij} = \frac{x_{ij}}{x_j} \dots \dots \dots (3)$$

Koefisien a_{ij} dapat diterjemahkan sebagai jumlah *input sektor i* yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit

output sektor j. Dengan menggabungkan persamaan (1) dan persamaan (3), akan diperoleh matriks sebagai berikut :

$$(I - A) X = F \text{ atau } X = (I - A)^{-1} F \quad \dots\dots\dots (4)$$

dimana :

- $(I - A)$ = matrik Leontief
- $(I - A)^{-1}$ = matrik lebalikan Leontief (*multiplier output*)
- F = permintaan akhir yang bersifat eksogen
- X = total *output* yang ditentukan dengan memasukkan berbagai nilai permintaan akhir

Untuk melihat dampak perubahan permintaan akhir terhadap penyerapan tenaga kerja digunakan analisis multiplier tenaga kerja berikut :

$$M_{TK} = \hat{L} [I - A]^{-1}$$

$$\hat{L} = \frac{TK_j}{x_j}$$

$$\Delta TK = M_{TK} \Delta F \quad \dots\dots\dots (5)$$

dimana :

- MTK = multiplier tenaga kerja
- $[I - A]^{-1}$ = matrik kebalikan Leontief
- ΔTK = perubahan tenaga kerja
- \hat{L} = matrik diagonal koefisien tenaga
- TK_j = jumlah tenaga kerja sektor *j*
- ΔF = perubahan permintaan akhir

Koefisien tenaga kerja (*labor coefficient*) adalah suatu bilangan yang menunjukkan besarnya jumlah tenaga kerja sektor *j* (TK_j) yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit *output* sektor *j* (X_j).

Penelitian ini difokuskan pada total ekspor yang dalam Table I-O terdiri dari ekspor barang (305) dan jasa (306). Ekspor merupakan komponen permintaan akhir, sehingga perubahan penyerapan tenaga kerja pada persamaan (9) akibat perubahan ekspor menjadi :

$$\Delta TK_{(ekspor)} = MTK \Delta F_{(ekspor)} \quad \dots\dots\dots (6)$$

Penelitian difokuskan pada ekspor dan dampaknya terhadap tenaga kerja pada tahun 2012, dimana NPI mengalami defisit serta ekspor mengalami

penurunan, serta bagaimana dampak penurunan ekspor tersebut terhadap penyerapan tenaga kerja.

Data

Data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data tenaga kerja dan ekspor. Sumber data untuk analisis diskriptif diperoleh dari data Sakernas tahun 2012 yang diolah oleh Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan, Badan Litbang, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Berita Resmi Statistik dari Badan Pusat Statistik tahun 2008 sampai dengan 2012, serta Tabel I-O Update tahun 2008 transaksi domestik atas dasar harga produsen.

HASIL DAN PEMBAHASAN Perkembangan Ekspor

Secara keseluruhan, nilai ekspor Indonesia pada tahun 2012 mencapai USD190 miliar. Nilai ini turun sebesar 6,61% dibanding periode yang sama tahun 2011 yang besarnya mencapai US 203,5 miliar. Sementara itu, ekspor non migas yang mempunyai kontribusi sebesar 80,5% dari total ekspor, turun dari USD 162 miliar pada tahun 2011, menjadi 153 miliar pada tahun 2012, artinya mengalami penurunan sebesar 5,5% (BPS, 2013). Lebih detailnya disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Perkembangan Ekspor Migas dan Non Migas

Ekspor	2011 (Juta USD)	2012 (Juta USD)	Perubahan (%)	Kontribusi 2012 (%)
Migas	41477	36973.1	-10.9	19.5
Non Migas	162019.6	153071.5	-5.5	80.5
Total	203496.6	190044.6	-6.6	100.0

Sumber : BPS (2013), diolah

Pada Tabel 3, disajikan ekspor non migas berdasarkan negara tujuan. Penurunan ekspor non migas pada tahun 2012 paling besar terjadi pada kawasan Eropa (-12,2%), diikuti tujuan ke Amerika Serikat (7,0%). Krisis di kawasan Eropa yang mulai menjalar ke Amerika Serikat mengakibatkan terjadinya penurunan ekspor non migas yang cukup signifikan di kedua kawasan ini. Namun demikian,

kontribusi/pangsa kedua kawasan ini tidak begitu besar (21,2%), sehingga dampak terhadap total ekspor non migas tidak signifikan. Negara-negara di kawasan ASEAN, Cina, dan Jepang memberikan kontribusi sebesar 45,3% terhadap ekspor non migas tahun 2012. Walaupun ekspor non migas ke tiga negara tersebut mengalami penurunan, namun penurunannya tidak sebesar kawasan Eropa dan Amerika Serikat.

Tabel 3. Ekspor Non Migas Menurut Negara Tujuan

Negara Tujuan	2011 (Juta USD)	2012 (Juta USD)	Perubahan (%)	Kontribusi 2012 (%)
1. Asean	32214.6	31268.5	-2.9	20.4
2. Eropa	20445.8	17950.6	-12.2	11.7
3. Amerika Serikat	15684.2	14591.3	-7.0	9.5
4. Cina	21595.6	20863.8	-3.4	13.6
5. Jepang	18330.1	17226.5	-6.0	11.3
6. Lainnya	53749.3	51170.8	-4.8	33.4
Total	162019.6	153071.5	-5.5	100.0

Sumber : BPS (2013), diolah

Dilihat dari sektoral, ekspor non migas tahun 2012 pada sektor pertambangan turun sebesar 9,6%, dan sektor industri turun sebesar 4,9%. Sedangkan sektor pertanian masih mampu naik sebesar 8,0%. Dengan kontribusi sektor industri mencapai 75,9%, penurunan sebesar 4,9% tersebut memberikan andil sebesar -3,75% terhadap penurunan ekspor non migas Indonesia tahun 2012 yang besarnya -5,5%. Perubahan ekspor masing-masing sektor ini dipergunakan sebagai simulasi dampak perubahan ekspor terhadap tenaga kerja untuk masing-masing sektor. Ekspor non migas secara sektoral disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Ekspor Non Migas Menurut Sektoral

Negara Tujuan	2011 (Juta USD)	2012 (Juta USD)	Perubahan (%)	Kontribusi 2012 (%)
Pertanian	5165.8	5577.9	8.0	3.6
Industri	122188.7	116145	-4.9	75.9
Pertambangan dan lainnya	34665.1	31348.6	-9.6	20.5
Total Non Migas	162019.6	153071.5	-5.5	100.0

Sumber : BPS (2013), diolah

Perkembangan Tenaga Kerja

Jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Agustus 2012 mencapai 118,0 juta orang, meningkat sebanyak 0,67 juta orang dibanding angkatan kerja pada Agustus 2011 yaitu sebesar 117,37 juta orang. Sementara itu, jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus 2012 sebesar 110,80 juta orang, meningkat 1,1 juta dibandingkan pada Agustus 2011 yaitu sebesar 109,67 juta orang. Pada sisi lain, tingkat partisipasi angkatan kerja pada

Agustus 2012 turun menjadi 67,88%, dibandingkan Agustus 2011 yaitu sebesar 68,34%.

Pada Agustus tahun 2012, jumlah pengangguran terbuka mencapai 7,24 juta orang, berkurang 0,46 juta dibanding periode yang sama tahun 2011. Demikian juga Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), pada Agustus 2012 tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,14%, turun dibandingkan dengan periode tahun 2011 yang besarnya 6,56%.

Angka ini menunjukkan bahwa baik secara kuantitatif (jumlah pengangguran) maupun relatif (tingkat pengangguran terbuka) kondisi pengangguran di

Indonesia pada Agustus 2012 lebih baik dibandingkan dengan situasi pada Agustus 2011 (Tabel 5).

Tabel 5. Kondisi Umum Lapangan Kerja Indonesia, 2008-2012 (Juta orang)

URAIAN	2008	2009	2010	2011	2012
Penduduk Usia Kerja (1 + 2)	166,64	169,33	172,07	171,76	173,89
1. Angkatan Kerja	111,95	113,83	116,53	117,37	118,04
a. Bekerja	102,55	104,87	108,21	109,67	110,80
b. Pengangguran Terbuka	9,39	8,96	8,32	7,70	7,24
2. Bukan Angkatan Kerja	54,69	55,49	55,54	54,39	55,83
3. Partisipasi Angkatan Kerja (%)	67,18	67,23	67,72	68,34	67,88
4. Tingkat Pengangguran (%)	8,39	7,87	7,14	6,56	6,14

Sumber : BPS (2013), diolah

Pada tahun 2012, angkatan kerja Indonesia didominasi oleh tenaga kerja dengan pendidikan yang rendah. Hampir setengahnya (47,9%) angkatan kerja hanya lulusan SD, 20% lulusan SLTP dan 25% lulusan SLTA. Secara kumulatif, sebesar 92% merupakan tenaga kerja dengan lulusan SLTA ke bawah. Demikian halnya dengan tingkat pengangguran terbuka, dari 7,7 juta penduduk yang menganggur sebesar 7 juta (91%) merupakan penduduk yang hanya mempunyai pendidikan SLTA ke bawah (Sakernas, diolah oleh Puslitbang Kemenakertrans, 2012). Pada Tabel 6, dapat dilihat bahwa dari sisi sektoral,

sejumlah 110 juta tenaga kerja di Indonesia pada tahun 2012, yaitu sebesar 39 juta orang (35,9%) merupakan tenaga kerja di sektor pertanian. Sektor penyerap tenaga kerja terbesar berikutnya adalah sektor perdagangan yaitu 23,1 juta orang (21,3%) sektor jasa kemasyarakatan dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 17,1 juta orang (15,2%), serta sektor industri dengan tenaga kerja mencapai 15,4 juta orang (13,3%). Sektor yang paling sedikit menyerap tenaga kerja adalah sektor listrik, air, dan gas. Sektor ini hanya mampu menyerap 0,2 juta orang tenaga kerja (0,2%).

Tabel 6. Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral, 2012

Sektor	Jumlah (juta org)	Prosentase (%)
Pertanian	38,9	35,1
Pertambangan	1,6	1,4
Industri	15,4	13,9
Listrik, air, gas	0,2	0,2
Bangunan	6,8	6,1
Perdagangan	23,2	20,9
Angkutan & Kom.	5,0	4,5
Keuangan	2,7	2,4
Jasa Kemasy.	17,1	15,4
T o t a l	110,8	100,0

Sumber : BPS (2012), diolah

Diperkirakan jumlah angkatan kerja pada tahun 2013 naik menjadi 121,74 juta orang, dan tahun 2014 naik menjadi 123,76 juta orang; atau mengalami kenaikan angkatan kerja rata-rata sebesar 2,13 juta orang per tahun. Jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2013 diperkirakan sejumlah 115,3 juta orang, dan naik menjadi 118,01 juta orang pada tahun 2014;

atau mengalami kenaikan penyerapan tenaga sebesar 2,7 juta orang. Dengan kondisi tersebut, jumlah pengangguran pada tahun 2013 diperkirakan akan mengalami penurunan menjadi 7,09 juta orang (tingkat pengangguran 5,9%), turun menjadi 6,44 juta orang (5,3%) pada tahun 2013, dan turun menjadi 5,76 juta orang (4,7%) pada tahun 2014 (Tabel 7).

Tabel 7. Perkiraan Angkatan Kerja, Bekerja dan Pengangguran, 2012 - 2014

Tahun	Angkatan Kerja (Juta Orang)	Bekerja (Juta Orang)	Pengangguran (Juta Orang)	Tingkat Pengangguran (%)
2008	111,95	102,55	9,39	8,4
2009	113,83	104,87	8,96	7,9
2010	116,53	108,21	8,32	7,1
2011	117,37	109,67	7,70	6,6
2012	118,04	110,80	7,24	6,1
2013 *)	121,74	115,30	6,44	5,6
2014 *)	123,76	118,01	5,76	4,9

Sumber : BPS (2008- 2012), diolah
*) angka perkiraan

Pergeseran Tenaga Kerja

Sektor pertanian merupakan penyerap tenaga kerja terbanyak, namun dari sisi produktivitas sektor tersebut mempunyai nilai yang paling rendah. Pada tahun 2011, dengan output sektor pertanian sebesar Rp 1,09 ribu triliun, mempunyai tenaga kerja sebanyak 39,3 juta orang, sehingga produktivitasnya hanya mencapai Rp 27,8 miliar/orang/tahun. Produktivitas sektor pertanian hampir 1:10 dibanding sektor jasa keuangan. Dari sisi upah, sektor pertanian hanya sebesar Rp 718 ribu per bulan, sedangkan rata-rata upah sektor lain mencapai Rp 1.678 ribu per bulan. Rasio upah sektor pertanian dibanding sektor lainnya mencapai 1 dibanding

2,3, atau dapat dikatakan rata-rata upah sektor selain pertanian mencapai 2,3 kali lipat dibanding sektor pertanian. Lebih lengkapnya disajikan pada Tabel 8, dan Gambar 3.

Upah yang rendah mengakibatkan pekerja sektor pertanian berpindah ke sektor lain yang mempunyai tingkat penghasilan lebih tinggi, yang pada gilirannya akan menurunkan output sektor pertanian dan menurunkan produktivitas. Tingkat risiko pertanian yang tinggi, ketidakpastian harga pada saat panen raya, permainan harga oleh para tengkulak, akses modal yang terbatas; mengakibatkan para wirausahawan kurang berminat terjun di sektor pertanian.

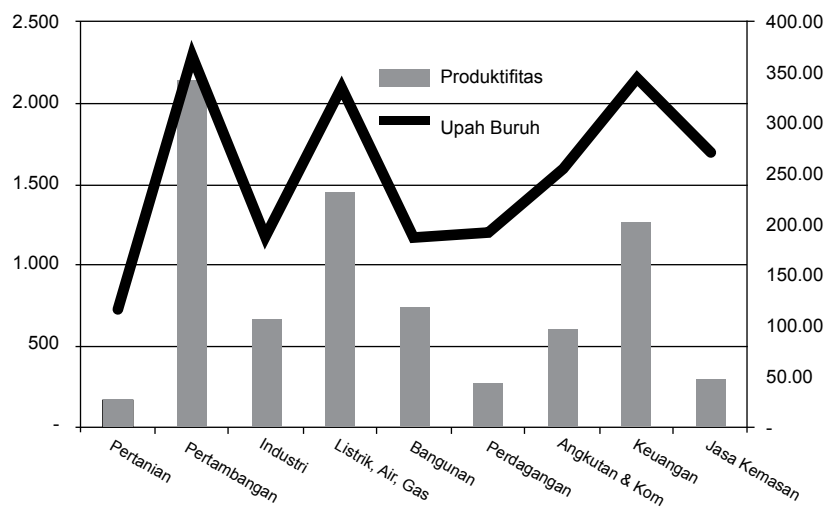
Tabel 8. Produktivitas dan Upah Sektoral, 2011

Sektor	PDB Nominal tanpa Migas (Rp. Triliun)	Jumlah Pekerja (ribu orang)	Produktivitas (Rp. Miliar/ Org/thn)	Rata-rata Upah per Bulan (Rp.000)
Pertanian	1.093	39.329	27,80	718
Pertambangan	503	1.465	343,23	2.307
Industri	1.554	14.542	106,87	1.176
Listrik, air, gas	56	240	232,44	2.105
Bangunan	757	6.340	119,33	1.172
Perdagangan	1.022	23.397	43,69	1.194
Angkutan & Kom.	491	5.079	96,72	1.610
Keuangan	535	2.633	203,15	2.165
Jasa Kemas.	783	16.646	47,06	1.702

Sumber : BPS (2011), diolah

Kondisi pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian ke industri dan jasa yang terjadi di Indonesia, seperti yang disampaikan Kuznets (dalam Ravallion, 2005) terdapat korelasi positif atau negatif (pada awalnya positif, kemudian berubah menjadi negatif) dalam jangka panjang antara tingkat pendapatan per kapita dengan tingkat pemerataan distribusi pendapatan. Hubungan antara kesenjangan pendapatan dan tingkat pendapatan per kapita berbentuk U

terbalik. Pada awal proses pembangunan, ketimpangan distribusi pendapatan naik sebagai akibat proses urbanisasi dan industrialisasi. Ketimpangan menurun karena sektor industri di kota sudah menyerap tenaga kerja dari desa atau produksi atau penciptaan pendapatan dari pertanian lebih kecil. Hubungan tersebut memberikan arti bahwa terjadi evolusi distribusi pendapatan dalam proses transisi dari ekonomi pedesaan (pertanian) menuju ke ekonomi perkotaan (industri).



Gambar 3. Upah Buruh dan Produktivitas Sektoral, 2011

Sumber : BPS (2011), diolah

Pada Tabel 9 disajikan analisis pergeseran tenaga kerja sektoral. Pada periode tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, rata-rata jumlah pekerja yang bekerja di sektor pertanian sebesar 40,89 juta orang menjadi 40,81 juta orang pada periode 2009-2011. Walaupun dari sisi jumlah tidak banyak mengalami perubahan, tetapi dari sisi kontribusi

pekerja terhadap jumlah penduduk yang bekerja, turun dari 41,2% menjadi 38%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sektor pertanian tidak menarik bagi angkatan kerja baru untuk masuk bekerja di sektor ini. Pemerintah perlu memberikan insentif, salah satunya melalui peningkatan upah pekerja di sektor pertanian.

Tabel 9. Pergeseran Tenaga Kerja Sektoral

Sektor	Jumlah Pekerja (Juta Org)		Distribusi Pekerja		Perubahan Distribusi (%)
	Rata-rata (2006-2008)	Rata-rata (2009-2011)	Rata-rata (2006-2008) %	Rata-rata (2009-2011) %	
Pertanian	40,89	40,81	41,2	38,0	-3,2
Pertambangan	1,00	1,29	1,0	1,2	0,2
Industri	12,27	13,74	12,4	12,8	0,4
Listrik, air, gas	0,20	0,23	0,2	0,2	0,0
Bangunan	5,13	5,81	5,2	5,4	0,2
Perdagangan	20,33	22,61	20,5	21,0	0,6
Angkutan & Kom.	5,93	5,61	6,0	5,2	-0,8
Keuangan	1,40	1,95	1,4	1,8	0,4
Jasa Kemasy.	12,16	15,53	12,2	14,4	2,2

Sumber : BPS (2006-2011), diolah

Dampak Penurunan Ekspor Terhadap Tenaga Kerja *Koefisien Tenaga Kerja*

Untuk menghitung dampak penurunan ekspor terhadap tenaga kerja, perlu terlebih dahulu dihitung koefisien tenaga kerja per masing-masing sektor. Koefisien tenaga kerja sektoral merupakan indikator untuk melihat daya serap tenaga kerja di masing-masing sektor. Semakin tinggi koefisien tenaga kerja di suatu sektor menunjukkan semakin tinggi pula daya serap tenaga kerja di sektor yang bersangkutan, disebabkan karena semakin banyak tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit *output*. Sebaliknya, sektor yang

semakin rendah tenaga kerjanya menunjukkan semakin rendah pula daya serap tenaga kerjanya. Koefisien tenaga kerja yang tinggi pada umumnya terjadi pada sektor-sektor padat karya, sedangkan koefisien tenaga kerja yang rendah umumnya terjadi di sektor-sektor padat modal yang proses produksinya dilakukan dengan teknologi tinggi.

Hasil penelitian yang dilakukan Kiyota (2011), dengan analisis tabel *input-output* di Jepang untuk periode 1975-2006, memperkirakan dampak ekspor suatu industri terhadap penyerapan tenaga kerja industri tersebut (efek langsung) serta penyerapan tenaga kerja industri lainnya (efek tidak langsung). Diperoleh temuan bahwa terjadi permintaan tenaga kerja di bidang manufaktur dan non-

manufaktur akibat dari meningkatnya ekspor sejak tahun 1985.

Pada Tabel 10, dapat dilihat bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang mampu menyerap tenaga kerja paling tinggi atau padat karya. Untuk menghasilkan *output* sektor pertanian sebesar Rp 1 miliar, diperlukan tenaga

kerja sebanyak 36,13 orang. Dari penyerapan tenaga kerja sektoral, sektor pertambangan menyerap tenaga kerja yang paling sedikit untuk satuan *output* yang sama. Untuk menghasilkan *output* sektor pertambangan sebesar Rp 1 miliar, hanya dibutuhkan tenaga kerja sebanyak 1,48 orang.

Tabel 10. Koefisien Tenaga Kerja Sektoral¹

No.	Sektor	Output (Rp. Triliun)	TK (ribu org)	Koef. TK
1	2	3	4	5 = 4/3
1	Pertanian	1.182	42.690	36,13
2	Pertambangan	717	1.062	1,48
3	Industri	3.799	12.440	3,27
4	Listrik. air. gas	124	208	1,67
5	Bangunan	1.244	4.734	3,81
6	Perdagangan	1.336	20.684	15,48
7	Angkutan& Kom.	660	6.014	9,11
8	Keuangan	567	1.440	2,54
9	Jasa Kemasy.	900	12.778	14,19

Sumber: BPS (2008)

Multiplier Tenaga Kerja

Dari hasil analisis Input-Output, diperoleh multiplier tenaga kerja pada masing-masing sektor. *Multiplier* tenaga kerja yang diperoleh merupakan *multiplier* pada tahun 2008. Diasumsikan tidak terjadi perubahan struktural dan koefisien teknologi dianggap statis sehingga tahun 2008 sampai dengan

2012 *multiplier* tidak berubah. Asumsi ini diperkuat hasil temuan dari Oktaviani, Widyastutik, dan Amaliah (2013) yang menyatakan tidak terdapat perubahan struktural yang cukup berarti pada industri di Indonesia selama kurun waktu 1995–2005. Hasil penghitungan dampak tenaga kerja dan multiplier tenaga kerja disajikan dalam Tabel 11.

Tabel 11. Multiplier Tenaga Kerja

Sektor	Koef. TK	Dampak TK	Ratio/Pengganda
1	2	3	4 = 3 / 2
Pertanian	36.13	43.43	1.20
Pertambangan	1.48	2.79	1.89
Industri	3.27	12.79	3.91
Listrik. air. gas	1.67	7.10	4.25
Bangunan	3.81	11.10	2.92
Perdagangan	15.48	23.03	1.49
Angkutan& Kom.	9.11	15.16	1.66
Keuangan	2.54	5.77	2.27
Jasa Kemasy.	14.19	21.13	1.49

Sumber : Hasil Analisis

¹ Nilai output diambil dari tabel IO 2008 (kode 210 atau 310), Jumlah Tenaga kerja tahun 2008 sumber dari Penduduk 15 tahun Keatas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama tahun 2008.

Apabila terjadi peningkatan permintaan output sektor pertanian sebesar Rp 1 miliar, akan dibutuhkan tenaga kerja sektor pertanian sebanyak 36,13 orang. Sektor pertanian juga membutuhkan sektor lain, maka akan mengakibatkan permintaan tenaga kerja sektor lainnya sehingga permintaan tenaga kerja secara keseluruhan menjadi 43,43 orang. Perbandingan dampak kesempatan kerja yang muncul di semua sektor dan kesempatan kerja hanya di sektor pertanian saja sebesar 1,2. Angka ini merupakan *multiplier* kesempatan kerja di sektor pertanian. Angka ini dapat diartikan apabila terjadi peningkatan kerja di sektor pertanian sebesar 1 orang, akan meningkatkan kesempatan kerja sektor lain sebesar 0,2 orang sehingga total peningkatan kesempatan kerja seluruh sektor sebesar 1,2 orang. Dari angka *multiplier* tenaga kerja pada Tabel 11, dapat dilihat apabila sektor LGA (Listrik,

Gas, dan Air) mempunyai multiplier tenaga kerja paling besar yaitu sebesar 4,25. Selanjutnya diikuti oleh sektor industri sebesar 3,91, dan seterusnya.

Penurunan ekspor dan kesempatan kerja

Untuk mencari dampak tenaga kerja akibat adanya penurunan ekspor digunakan simulasi penurunan ekspor sektor non migas tahun 2012 yang disajikan pada Tabel 4. Dari tabel tersebut, pada tahun 2012 ekspor sektor pertanian naik sebesar 8%, ekspor sektor pertambangan turun 9,6% dan ekspor sektor industri turun 4,9%. Diasumsikan komponen permintaan akhir yang lain tetap (*centeris paribus*), maka akibatnya terjadi perubahan tenaga kerja pada tahun 2012 yaitu adanya *shock* penurunan ekspor. Dampak penurunan ekspor dari ketiga sektor tersebut disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12. Dampak Penurunan Ekspor Non Migas Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja, 2012

Sektor	Perubahan Ekspor			Jumlah
	Ekspor Sektor Pertanian Naik (8%)	Ekspor Sektor Pertambangan Turun (-9,6%)	Ekspor Sektor Industri Turun (-4,9%)	
Pertanian	767,000	-8,2	-278,9	(210,4)
Pertambangan	0,0	-27,1	-6,1	(44,5)
Industri Lainnya	1000	-4,5	-187,2	(190,7)
Listrik, Air, Gas	0,0	-0,1	-1,0	(1,1)
Bangunan	100	-1,2	-1,3	(2,4)
Perdagangan	1200	-5,6	-56,1	(60,6)
Angkutan & Kom.	300	-2,7	-16,0	(18,4)
Keuangan	100	-0,8	-4,6	(5,3)
Jasa Kemasy.	300	-3,9	-11,9	(15,5)
Total	797,000	-65,5	-563,1	(548,9)

Sumber : Hasil Analisis

Dari Tabel 12 dapat diartikan sebagai berikut : (i) kenaikan ekspor sektor pertanian pada tahun 2012 sebesar 8%, akan menciptakan permintaan tenaga kerja sektor pertanian sebesar 76,7 ribu orang, dan sektor lainnya,

sehingga penciptaan kesempatan kerja keseluruhan sektor sebesar 79,7 ribu orang; (ii) penurunan ekspor sektor pertambangan sebesar 9,6%, akan mengakibatkan penurunan kesempatan kerja sektor pertambangan sebesar 38,4 ribu orang, dan penurunan kesempatan kerja sektor lain seperti Pertanian (-8,2), Industri (14,4), Listrik, Air dan Gas (-0,1), Bangunan (-1,2), Perdagangan (-5,6), Angkutan dan Komp. (-2,7), Keuangan (-0,5), penurunan kesempatan kerja keseluruhan sektor sebesar 65,5 ribu orang; (iii) penurunan ekspor sektor industri pada tahun 2012 sebesar 4,9% akan mengakibatkan penurunan kesempatan kerja sektor industri itu sendiri sebesar 187,2 ribu orang, dan sektor lainnya sehingga penurunan kesempatan kerja keseluruhan sektor sebesar 563,1 ribu orang.

Turunnya ekspor sektor industri mengakibatkan hilangnya kesempatan kerja sektor pertanian (-278,9 ribu orang) lebih besar dibanding hilangnya kesempatan kerja sektor industri itu sendiri (-187,2 ribu orang). Hal ini disebabkan karena ekspor sektor industri mempunyai keterkaitan yang sangat besar terhadap komoditas pertanian yang padat karya seperti CPO. Dampak penyerapan tenaga kerja sektor pertanian (Tabel 11) yang jauh lebih besar dibanding sektor industri.

Dari penurunan ekspor non migas pada tahun 2012, secara keseluruhan akan menurunkan kesempatan kerja sebesar 548,9 ribu orang. Secara sektoral, akibat turunnya ekspor non migas tersebut, kesempatan sektor pertanian paling terkena dampaknya yaitu turun 210,4 ribu orang. Sektor industri turun 190,7 ribu orang, dan sektor

pertambangan turun sebesar 44,5 ribu orang. Sektor perdagangan akan terkena dampak tidak langsung akibat menurunnya sektor non migas tahun 2012, sehingga kesempatan kerja sektor perdagangan turun sebesar 60,6 ribu orang.

Meskipun secara nilai ekspor pertanian pada tahun 2012 masih menunjukkan peningkatan sebesar 8%, sedangkan sektor pertambangan dan industri mengalami penurunan, namun dilihat dari sisi tenaga kerja terjadi penurunan sebesar 3% pada tahun 2012. Di sisi lain, sektor industri yang mengalami penurunan ekspor sebesar 4,9% pada tahun 2012, jumlah tenaga kerja malah mengalami kenaikan 3,8%. Kondisi ini akan menyebabkan tekanan pada angka pengangguran. Molnar dan Leshner (2009) menyatakan bahwa sektor padat karya seperti sektor manufaktur mengalami pertumbuhan yang lambat. Lambatnya pertumbuhan pada sektor-sektor padat karya telah mengakibatkan tingginya angka pengangguran.

Temuan lain dari Feenstra dan Hong (2007), jumlah tenaga kerja di Cina selama kurun waktu 1997–2005 meningkat sampai 7,5–8 juta orang per tahun. Peningkatan ekspor selama 1997–2002 telah memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 2,5 juta orang per tahun. Kegiatan eksportasi telah menjadi bagian penting dalam penyerapan tenaga kerja di Cina. Dengan menggunakan tabel *input-output* Cina dengan koefisien tenaga kerja statis/konstan pada tahun 2000, diperoleh hasil bahwa untuk USD 1.000 ekspor Cina mampu menyerap 0,44 orang.

Sementara itu, Isabelle dan Rueda (2012) melakukan analisis dengan tabel *input-output* untuk negara-negara yang

tergabung dalam Uni Eropa-27 (EU-27) dan Area/kawasan Eropa (EA) pada rentang waktu tahun 2000-2007. Jumlah orang yang dipekerjakan oleh perusahaan-perusahaan dalam kegiatan ekspor (secara langsung dan tidak langsung) dalam EA tumbuh tingkat rata-rata tahunan dari 2,6%, sedangkan untuk UE-27 tumbuh hanya 1,6%. Namun demikian, dilihat dari intensitas penyerapan tenaga kerja terhadap ekspor di UE-27 dan EA pada tahun 2007 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2000.

Tingginya disparitas upah antara sektor industri dan sektor pertanian telah menyebabkan pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri. Terjadinya kelebihan pasokan (*supply*) tenaga kerja di sektor industri, akan menggeser kurva S1 ke S2 dan upah yang diterima seorang pekerja menjadi lebih rendah, dari W1 ke W2.

Melambatnya ekspor manufaktur akan memberikan tekanan pada penyerapan tenaga kerja. Dengan multiplier tenaga kerja sektor manufaktur yang tinggi, meningkatnya ekspor manufaktur akan mampu menyerap banyak, begitu pula sebaliknya. Hasil penelitian Aswicahyono, Douglas, dan Manning (2011) menyatakan bahwa penyerapan tenaga kerja lebih sedikit diciptakan melalui ekspor di industri manufaktur pada tahun 2005 dibandingkan sebelum krisis, karena pertumbuhan lebih lambat dalam ekspor manufaktur.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Melemahnya perekonomian dunia berimbas pada menurunnya permintaan ekspor non migas Indonesia dan

berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2012, total ekspor mengalami penurunan sebesar 6,6%, dan 5,5%-nya merupakan penurunan ekspor non migas. Penurunan ekspor non migas sebesar 5,5% tersebut secara keseluruhan akan mengakibatkan berkurangnya kesempatan kerja sebesar 549 ribu orang.

Dilihat dari penyerapan tenaga kerja, sektor yang paling terkena dampak dari turunnya ekspor non migas tersebut adalah sektor pertanian. Penyerapan tenaga kerja sektor pertanian turun 210,4 ribu orang, sektor industri turun 190,7 ribu orang, dan sektor pertambangan turun sebesar 44,5 ribu orang. Disisi lain, sektor perdagangan juga akan terkena dampak tidak langsung akibat menurunannya ekspor non migas. Kesempatan kerja sektor perdagangan turun sebesar 60,6 ribu orang.

Dengan *multiplier* tenaga kerja di sektor pertanian sebesar 1,2, berarti jika terjadi penurunan tenaga kerja di sektor pertanian, maka penurunan tersebut tidak berdampak besar terhadap sektor lainnya. Di sisi lain, sektor industri dengan *multiplier* tenaga kerja sebesar 3,9, berarti jika terjadi penurunan di sektor ini akan membawa dampak yang lebih besar terhadap tenaga kerja di sektor lainnya. Sektor pertanian merupakan penyerap tenaga kerja terbanyak (38%), namun mempunyai upah yang paling rendah. Perbaikan upah sektor pertanian perlu mendapat perhatian serius pemerintah. Rendahnya tingkat upah sektor pertanian dibanding sektor lain mengakibatkan terjadinya pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor lain, khususnya sektor jasa. Pangsa kesempatan kerja

sektor pertanian turun sebesar 3,2% dalam lima tahun terakhir.

Daya saing ekspor Indonesia harus ditingkatkan melalui perbaikan iklim investasi, perbaikan infrastruktur, serta peningkatan kapasitas sumberdaya manusia. Perlu adanya peningkatan kesejahteraan pekerja sektor pertanian dengan meningkatkan teknologi sehingga memberikan nilai tambah sektor pertanian khususnya yang berorientasi ekspor. Meningkatnya produktivitas sektor pertanian akan mengurangi tingginya migrasi tenaga kerja sektor pertanian ke sektor lain.

Penelitian ini menggunakan analisis *Input-Output* yang mempunyai keterbatasan bahwa hubungan antara *input* dan *output* pada setiap sektor produksi merupakan fungsi *linier*, kenaikan dan penurunan *output* suatu sektor akan sebanding dengan kenaikan dan penurunan *input* yang digunakan oleh sektor tersebut, serta koefisien teknis diasumsikan tidak berubah selama periode analisis.

DAFTAR PUSTAKA

- Aswicahyono, H., H.B. Douglas, and C. Manning. (2011). ADB Economics Working Paper Series No. 279, Exports and Employment in Indonesia: The Decline in Labor-Intensive Manufacturing and the Rise of Services.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2008a). *Tabel Input Output Indonesia 2005*. Jilid I. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2008b). *Tabel Input Output Indonesia 2005*. Jilid II. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2008-2012). Berita Resmi Statistik (BRS), Keadaan Ketenagakerjaan. Periode (2008 – 2012). Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2013). Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama. Diunduh tanggal 6 Juni 2013 dari http://bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=06¬ab=2
- Boediono. (1999). *Ekonomi Makro*. Yogyakarta: BPFE.
- Feenstra, R.C., and C. Hong. (2007). China's Exports And Employment. Working Paper 13552, *NBER Working Paper Series*. Diunduh tanggal 28 Oktober 2013 dari <http://www.nber.org/papers/w13552>.
- International Labour Organization (ILO). (2008). A Global Policy package to Address the Global Crisis. *Policy Brief*. International Labour Office. Switzerland. pp. 12-15.
- International Labour Organization (ILO). (2011). Building a Sustainable Job – Rich Recovery. International Institute for Labour Studies (IILS). Switzerland. 38 – 47.
- International Labour Organization (ILO). (2011). World of Work Report 2011. Making Markets Work of Jobs. pp. 3-9
- International Labour Organization (ILO). (2013). Trade and Employment: Country Report for Indonesia. Trade and Employment Programme, International Labour Office and ILO Office for Indonesia
- Irawan, T., L. Anggraeni, dan R. Oktaviani. (2011). The Role of Manufacturing Industry to Indonesian Economic Performance: *Input-Output* Analysis. Department of Economics, Faculty of Economics and Management, Bogor Agricultural University. Diunduh tanggal 6 Agustus 2013 dari (http://www.academia.edu/1554270/The_Role_of_Manufacturing_Industry_to_Indonesian_Economic_Performance_Input-Output_Analysis).
- Isabelle, R., and J.M. Rueda. (2012). European Exports 2000-2007: Direct

- and Indirect Effects on Employment and Labour Income in the EU-27 and Euro Area. Euro Stat, Statistics in focus — 36/2012. Diunduh tanggal 29 Oktober 2013 dari <http://ec.europa.eu/eurostat>.
- James.W.E., and N. Fujita. (2000). Employment and Manufacturing Exports in Indonesia: An *Input-Output* Analysis, Working Paper Series Vol. 2000-06, May 2000, The International Centre for the Study of East Asian Development (ICSEAD), Kitakyushu
- Kiyota, K. (2011). Trade and Employment in Japan, OECD Trade Policy Working Papers, No. 127, OECD Publishing. Diunduh tanggal 28 Oktober 2013 dari <http://dx.doi.org/10.1787/5kg3nh62jg0xen>.
- Kompas. (2013, 29 Juli). 44.000 Buruh Sepatu Kena PHK. Diunduh tanggal 3 Agustus 2013 dari <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/07/29/0919198/44.000.Buruh.Sepatu.Kena.PHK>
- Mankiw. G. (2010). *Macroeconomic*. 5 th edition. Worth Publisher
- Molnar, M. and M. Leshner. (2009). Recovery and Beyond: Enhancing Competitiveness to Realise Indonesia's Trade Potential. OECD. Trade Policy Working Paper No. 82
- Oktaviani, R. dan E. Puspitawati. (2004). Produk Pertanian Indonesia Menghadapi Era Globalisasi, *Agrimedia*, Volume 9, No.2 Desember 2004. Diunduh tanggal 15 Oktober 2013 dari (<http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/43794/Rina%20Oktaviani.pdf>).
- Oktaviani, R., Widyastutik, S. Amaliah. (2013). Dampak FTA Asean China Terhadap Ekonomi makro dan Ekonomi Sektoral Indonesia. Diunduh tanggal 15 Oktober 2013 dari http://web.ipb.ac.id/~rks/file_pdf/CAFTA_Rina.pdf.
- Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan. (2008). Diunduh tanggal 12 Juni 2013 dari (<http://pusdatinaker.baliffo.depnakertrans.go.id/>)
- Ravallion, M. (2005). A Poverty-Inequality Trade-off? World Bank Policy Research Working Paper 3579
- Sitepu, R. (2011). Model *Input Output* dan Aplikasinya dengan Software Eviews. Badan Kebijakan Fiskal. Kementerian Keuangan
- World Economic Outlook (WEO) (2012). Global Recovery Stalls, Downside Risks Intensify Update January 2012. Diunduh tanggal 5 Mei 2013 dari (<http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/update/01/>).
- World Economic Outlook (WEO) (2012). Coping with High Debt and Sluggish Growth, October 2012. Diunduh tanggal 5 Mei 2013 dari (<http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/02/index.htm>).
- World Economic Outlook (WEO) (2013). Gradual Upturn in Global Growth During 2013 Update January 2013. Diunduh tanggal 9 Juli 2013 dari <http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/update/01/>.

**IMPLEMENTASI SISTEM RESI GUDANG PADA KOMODITI JAGUNG:
STUDI KASUS DI KABUPATEN TUBAN, PROVINSI JAWA TIMUR**
*The Implementation of Warehouse Receipt System for Corn:
Case Study in Tuban Regency, East Java Province*

Nurlia Listiani¹, Bagas Haryotejo²

¹Pusat Penelitian Ekonomi (P2E) LIPI,

Widya Graha LIPI, Jl Jendral Gatot Subroto Kav.10 Jakarta, iiiiiaa@yahoo.com

²Pusat Pengkajian Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan-RI,

Jl. M. I. Ridwan Rais No.5 Jakarta Pusat, bags9apr@gmail.com, bagas.haryotejo@kemendag.go.id

Naskah diterima: 25 September 2012

Disetujui diterbitkan: 3 Desember 2013

Abstrak

Studi ini bertujuan mengkaji berbagai faktor yang mempengaruhi petani dalam memanfaatkan Sistem Resi Gudang (SRG) dan menganalisis manfaat penerapan SRG di Kabupaten Tuban. Metode yang digunakan adalah model *Decision Matrix Analysis* (DMA) dan Metode *Value Tree Objective*. Hasil analisis DMA menunjukkan bahwa faktor utama pemanfaatan SRG adalah ketersediaan sarana dan prasarana gudang. Manfaat terbesar yang diperoleh petani adalah keuntungan dari adanya selisih harga jual saat panen dengan paska panen. Namun demikian, belum semua petani bersedia menggunakan SRG. Oleh karena itu, penerapan SRG perlu (1) sosialisasi, edukasi, dan *success story* agar dapat diikuti oleh para petani; (2) lembaga seperti koperasi untuk menampung hasil panen; (3) *dryer* khusus untuk komoditas jagung.

Kata kunci: Sistem Resi Gudang, Jagung, *Decision Matrix Analysis*, *Value Tree Objective*

Abstract

This study aims to examine the various factors influencing the farmers in using the warehouse receipt system and to analyze the benefits and costs in applying SRG for corn in Tuban, East Java province. Decision Matrix Analysis model is used to analyze the main factors that control farmers to use the warehouse receipt system, while Value Tree Objective is used to analyze the benefit and cost from using the warehouse receipt system. Based on the DMA model, the main factor influencing the farmers in using the warehouse system is the availability of facilities and infrastructures that support the warehouse. The biggest benefit from using warehouse receipt system is a gain coming from the price difference between sale during harvest time and post harvest. However, there are still many farmers who are reluctant to use the system. In order to encourage farmers, the implementation of SRG needs (1) socialization, education, and presenting success story; (2) the establishment of an institution like cooperative to load the harvest; (3) provision of special drier for corn.

Keywords: Warehouse Receipt System, Corn, *Decision Matrix Analysis*, *Value Tree Objective*.

JEL Classification: Q1, Q14, Q18

PENDAHULUAN

Petani saat ini masih dihadapkan pada permasalahan klasik yaitu dalam memperoleh bantuan pembiayaan bagi kelangsungan usaha taninya dan anjloknya harga hasil panen pada saat panen raya. Akses untuk memperoleh bantuan permodalan dari perbankan khususnya masih sangat sulit karena petani seringkali terbentur dengan agunan yang menjadi prasyarat dalam pembiayaan.

Selain itu, turunnya harga pada komoditas pertanian terutama saat panen raya, telah menjadi masalah laten yang sangat merugikan petani. Bahkan, fenomena tersebut seringkali membuat petani enggan memanen hasil pertaniannya karena biaya panen lebih besar daripada harga jual produknya (Muhi, 2011). Petani sebetulnya dapat saja menyiasatinya dengan melakukan tunda jual untuk menghindari kerugian akibat rendahnya harga saat panen raya. Namun demikian, petani tidak memiliki posisi tawar yang cukup kuat untuk tidak menjual hasil panennya. Kondisi tersebut disebabkan, sebagian besar petani memposisikan hasil panennya sebagai "*cash crop*". Artinya, petani membutuhkan uang tunai dalam waktu cepat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan melakukan usaha tani di musim tanam berikutnya atau untuk mencukupi keperluan hidup rumah tangganya (Ashari, 2011).

Berdasarkan permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan menciptakan salah satu alternatif solusi yaitu Sistem Resi Gudang (SRG). SRG telah disahkan

melalui Undang-undang (UU) No. 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang yang kemudian diamandemen dengan UU No. 9 tahun 2011. Berdasarkan Permendag No. 26/M-DAG/Per/6/2007 terdapat delapan komoditas pertanian¹ yang dapat disimpan di gudang. Dari delapan komoditas tersebut, salah satunya adalah jagung. Hal ini disebabkan komoditi jagung sebagai sumber karbohidrat utama kedua di Indonesia dan semakin meningkatnya kebutuhan akan pangan sehingga membuat jagung menjadi komoditi yang dapat diresigudangkan.

Salah satu daerah penghasil jagung yang dominan adalah provinsi Jawa Timur, provinsi yang turut mendongkrak kenaikan produksi jagung dalam skala nasional. Berdasarkan data dari Berita Resmi Statistik BPS provinsi Jawa Timur (2013), kenaikan produksi jagung di Jawa Timur mencapai 6.295.301 ton dengan produktivitas sebesar 3,28 kuintal per hektar. Kenaikan produksi di Jawa Timur menyebabkan produksi skala nasional mengalami peningkatan sebesar 13,15%. Kabupaten Tuban merupakan salah satu dari lima daerah penghasil jagung dominan di Jawa Timur.

Kementerian Perdagangan yang menginisiasi SRG berharap melalui penerapan SRG stabilitas harga dan stok komoditas dapat terjaga. Selain itu, petani juga dapat menunda waktu penjualan hasil produksi saat panen raya dan menunggu saat yang tepat untuk menjual dengan harga yang lebih baik. Bahkan, menurut Ashari (2011), SRG dapat menjadi salah satu alternatif sumber pembiayaan

¹ Delapan komoditas yang dapat disimpan di gudang adalah gabah, beras, kopi, jagung, karet, lada, rumput laut, dan kakao.

pertanian. SRG dapat dimanfaatkan oleh kelompok tani sebagai bukti kepemilikan komoditas yang dapat dijadikan agunan untuk mendapatkan kredit dari pihak perbankan ataupun non perbankan.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan petani dalam memanfaatkan resi gudang serta manfaat dan biaya dalam penggunaan SRG khususnya pada komoditi jagung di daerah Kabupaten Tuban provinsi Jawa Timur. Kabupaten Tuban merupakan daerah penghasil jagung terbesar kedua di provinsi Jawa Timur setelah Kabupaten Sumenep.

Pada tahun 2011 luas panen Kabupaten Tuban mencapai 92,44 hektar dan total produksi mencapai 518.176 ton (BPS, 2012). Selain itu, di kabupaten Tuban juga sudah terdapat satu gudang milik pemerintah daerah yang telah menggunakan SRG, khususnya untuk jagung. Oleh sebab itu, Kabupaten Tuban dipilih sebagai daerah penelitian dalam studi ini. Metode analisis yang digunakan adalah model *Decision Matrix Analisis* (DMA) dan untuk analisis selanjutnya mengenai implementasi SRG digunakan Metode *Value Tree Objective* (VTO) yang merupakan bagian dari model DMA. Metode ini dapat memberikan gambaran implementasi SRG berdasarkan keuntungan dan kerugian yang diperoleh baik oleh petani/kelompok tani ataupun pengelola gudang dalam implementasi SRG.

Pada bagian awal tulisan ini dibahas mengenai perkembangan pelaksanaan SRG khususnya pada komoditi jagung. Kemudian, dilanjutkan dengan pembahasan berbagai faktor yang mempengaruhi pemilihan penggunaan

SRG bagi petani. Berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan SRG serta sejauh mana efektivitas pelaksanaannya juga dibahas pada studi ini. Pada bagian terakhir disampaikan suatu konsep atau mekanisme SRG yang relatif efektif sehingga diharapkan SRG dapat berjalan sesuai dengan tujuan awal, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan kemajuan perekonomian nasional.

TINJAUAN PUSTAKA

Dasar Hukum Resi Gudang

Berdasarkan UU No. 9 Tahun 2006. UU tentang SRG tersebut dapat dikatakan sebagai suatu terobosan baru yang melengkapi hukum penjaminan seperti gadai (Ashari, 2011). Maksud pembentukan UU SRG adalah menciptakan sistem pembiayaan perdagangan yang diperlukan oleh dunia usaha, terutama usaha kecil dan menengah termasuk petani. Selain itu UU SRG dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, menjamin dan melindungi kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang, efisiensi biaya distribusi barang, serta mampu menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendorong laju pembangunan nasional.

Resi Gudang yang diperdagangkan di Indonesia wajib untuk melalui suatu proses penilaian yang dilakukan oleh suatu lembaga terakreditasi yang disebut "Lembaga Penilaian Kesesuaian" yang berkewajiban untuk melakukan serangkaian kegiatan guna menilai atau membuktikan bahwa persyaratan tertentu yang berkaitan dengan produk, proses, sistem, dan/ atau personel terpenuhi. Sedangkan yang memperoleh kewenangan guna melakukan penatausahaan resi gudang

dan *derivatif* resi gudang di Indonesia yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindah bukuan kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan, serta penyediaan sistem dan jaringan informasi adalah Pusat Registrasi Resi Gudang yang merupakan suatu badan usaha yang berbadan hukum.

Perundangan turunan untuk pelaksanaan SRG yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 9 tahun 2006 tentang SRG. Kemudian, untuk komoditas pertanian yang dapat diresigudangkan diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 26/M-DAG/PER/6/2007. Menurut Permendag No. 26 Tahun 2007, persyaratan komoditas yang ditetapkan untuk dapat dimasukkan ke dalam SRG dan diterbitkan resi gudangnya yaitu: (a) memiliki daya simpan paling sedikit tiga bulan, (b) memenuhi standar mutu tertentu, dan (c) jumlah minimum barang yang disimpan. Sedangkan jika dilihat ketentuan dari perdagangan berjangka komoditas, persyaratan komoditas yang dapat diperdagangkan berjangka adalah: (a) memiliki harga yang berfluktuasi, (b) tidak ada intervensi pemerintah, semata-mata atas dasar permintaan dan pasokan, dan (c) tersedia dalam jumlah yang cukup, bersifat homogen, dan tidak dimonopoli oleh kelompok tertentu, dan (d) merupakan komoditas potensial dan sangat berperan dalam perekonomian daerah setempat dan nasional karena menyangkut ketahanan pangan dan ekspor. Kemudian, untuk peraturan teknis penyelenggaraan SRG diatur oleh Peraturan Kepala Bappebti dan untuk penilaian kualitas aktiva bank umum berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 9/6/PBI/2007.

Definisi Resi Gudang dan Sistem Resi Gudang

Definisi resi gudang (RG) menurut UU No. 9 Tahun 2011 adalah bukti kepemilikan barang yang disimpan di suatu gudang dan diterbitkan oleh pengelola gudang. Sedangkan SRG adalah kegiatan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi resi gudang.

Jenis resi gudang ada dua. Pertama, resi gudang yang dapat diperdagangkan. Artinya resi gudang memuat perintah penyerahan barang kepada siapa saja yang memegang resi gudang tersebut atau atas suatu perintah pihak tertentu. Kedua, resi gudang yang tidak dapat diperdagangkan, yaitu resi gudang yang memuat ketentuan bahwa barang yang dimaksud hanya dapat diserahkan kepada pihak yang namanya telah ditetapkan.

Dokumen RG dapat diperdagangkan sehingga terdapat transaksi *derivatifnya*, yaitu kontrak berjangka RG, opsi atas RG, surat berharga diskonto RG, dan sebagainya. Instrumen keuangan *derivatif* RG hanya dapat diterbitkan oleh bank, lembaga keuangan non-bank.

Kelembagaan Sistem Resi Gudang

Dalam UU No. 9 tahun 2006 telah diatur kelembagaan SRG, yaitu terdiri dari badan pengawas resi gudang, pengelola gudang, lembaga penilaian kesesuaian, pusat registrasi, termasuk juga harmonisasi hubungan pemerintah pusat dan daerah. Namun demikian, terdapat kendala yang menghambat perkembangan karena belum adanya lembaga jaminan RG. Untuk itu, UU No. 9 Tahun 2006 diamandemen menjadi UU

No.9 Tahun 2011 dengan ditambahkan lembaga jaminan resi gudang. Dengan adanya lembaga jaminan tersebut maka diharapkan kepercayaan pelaku usaha yaitu pemegang RG, bank, pengelola gudang menjadi semakin percaya terhadap RG.

Potensi dan Kendala SRG sebagai Pembiayaan Usaha

SRG merupakan suatu terobosan baru sebagai pembiayaan usaha bagi petani dengan jaminan komoditas yang tersimpan di gudang. Selain itu dengan adanya SRG akan semakin meningkatkan produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkan petani. Bahkan, apabila SRG dapat diterapkan dengan baik akan menjadikan manajemen usaha petani menjadi lebih tertata karena petani menetapkan strategi jadwal tanam dan pemasarannya.

Menurut BRI (2008) dalam Ashari (2011), Hollinger Rutten & Krassimune, et al (2009), penerapan SRG khususnya di sektor pertanian dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain: (1) penjualan produk tidak langsung pada saat panen raya sehingga petani dapat memiliki keuntungan relatif lebih baik; (2) meminimalisasi penimbunan barang oleh pedagang pengumpul; (3) petani dapat menggunakan RG untuk memperoleh dana tunai dari perbankan atau non perbankan untuk kebutuhan modal usaha berikutnya dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya SRG masih terdapat beberapa kendala yang ditemukan di lapangan. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Riana (2010), SRG belum banyak

digunakan oleh sektor perbankan sebagai hak jaminan. Kondisi tersebut disebabkan masih terdapatnya beberapa masalah seperti pembiayaan yang diberikan dalam waktu pendek, belum meratanya pembangunan fasilitas pendukung, dan terdapat keraguan perbankan untuk menggunakan SRG karena kurangnya pemahaman terhadap SRG.

Kemudian, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh iPasar (2011) sebagaimana dikutip oleh Ashari (2011), kendala dalam implementasi SRG mayoritas adalah permasalahan operasional. Permasalahan tersebut diantaranya: (1) belum tersedianya gudang SRG di seluruh daerah sentra produksi karena biaya investasi gudang yang relatif tinggi; (2) biaya operasional pengelolaan yang ditanggung oleh pengelola gudang tinggi; (3) pemahaman pelaku usaha terhadap SRG masih rendah dan kurang sosialisasi sehingga minim partisipasi; (4) komoditas yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar SNI; (5) petani tidak bersedia membayar biaya penyimpanan barang kepada pengelola barang di awal penyimpanan karena keterbatasan ekonomi; (6) petugas uji mutu barang belum tersedia di seluruh wilayah; (7) sistem informasi resi gudang belum cukup handal.

Kendala perkembangan SRG juga tidak terlepas dari akibat kebijakan yang sedang dijalankan pemerintah. Salah satunya adalah kebijakan penetapan harga dasar oleh pemerintah yang menyebabkan harga antara panen dan masa sesudah panen menjadi tetap dan seragam di seluruh wilayah Indonesia. Seharusnya, terdapat pengecualian harga terhadap komoditas barang yang dapat diresigudangkan, dengan tidak

di atur stabil setiap tahunnya. Hal ini disebabkan, apabila harga relatif stabil maka sangat tidak menarik bagi petani untuk meresigudangkan hasil panennya karena margin yang didapat tidak ada, bahkan petani akan rugi karena harus mengeluarkan biaya operasional (Ashari, 2011).

Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai SRG khususnya membahas baik terhadap kelembagaan SRG dan mengenai potensi dan kendala yang ada dalam pelaksanaannya sudah cukup banyak dilakukan. Salah satunya adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Lacroix dan Panos (1996) mengenai penggunaan SRG di negara-negara berkembang. Menurut mereka, belum begitu banyak negara berkembang yang menggunakan SRG. Di Indonesia, SRG relatif cukup berkontribusi positif bagi petani. Petani dapat menurunkan biaya operasionalnya karena hasil panennya dijual dengan harga yang relatif lebih baik. Selain itu, resi atau bukti penyimpanan barang di gudang dari bank juga dapat diagunkan di bank sehingga petani mendapatkan bantuan dana untuk modal usaha berikutnya. Namun, Lacroix dan Panos (1996) menyebutkan bahwa di Indonesia implementasi SRG belum dirasakan cukup optimal dan efisien. Hal tersebut dikarenakan disharmonisasi kebijakan antara berbagai lembaga yang terlibat dalam SRG seperti Kementerian Koperasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Perbankan, dan Pemda masih terjadi dan kurangnya sosialisasi mengenai SRG.

Sejalan dengan penelitian tersebut, Hasan (2008) menyatakan bahwa

peraturan perundang-undangan SRG memiliki implikasi makro dan mikro yang menuntut koordinasi lintas instansi. Pada aspek makro, arah kebijakan pengendalian stok dan harga komoditas dalam kerangka penataan sistem perdagangan yang efektif dan efisien harus terintegrasi dengan program lainnya. Misalnya, dalam kerangka program ketahanan pangan nasional, peningkatan kesejahteraan petani, penguatan perbankan mikro dan peran Pemda untuk mengembangkan produk-produk unggulan yang dapat diresigudangkan. Sementara dari aspek mikro, pembiayaan resi gudang tidak akan efektif dan efisien apabila dilakukan secara individual, melainkan harus secara berkelompok dan berbadan hukum, misalnya dengan kelompok tani yang tergabung dalam koperasi tani. Kemudian, belum ada jaminan akan terciptanya stabilitas harga suatu komoditas melalui mekanisme pengendalian stok. Oleh sebab itu, Hasan (2008) menyarankan sebaiknya penerbitan dan pembiayaan SRG harus langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha, dari pada mengembangkan *derivatif* resi gudang yang akan lebih banyak berhubungan dengan kepentingan pelaku pasar dan spekulasi di bursa. Agenda mendesak yang harus dilakukan adalah meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat, sektor perbankan, dan Pemda dalam rangka sosialisasi dan implementasi SRG di daerah.

Sementara itu, menurut Aviliani dan Hidayat (2005), secara kelembagaan sebenarnya infrastruktur untuk mendukung SRG telah cukup memadai. Namun, permasalahannya adalah

bagaimana hubungan kelembagaan tersebut terbentuk secara optimal, efisien, dan berdaya guna tanpa harus melakukan penyesuaian terhadap regulasi yang sudah ada. Untuk itu, langkah penting yang harus dilakukan adalah menyamakan persepsi antar lembaga dan meletakkan program aksi sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Aviliani dan Hidayat (2005) juga menyatakan bahwa karena SRG ini dapat memberikan manfaat yang cukup besar dalam pembiayaan usaha pertanian, maka sudah seharusnya memperoleh fasilitas utama dari pemerintah dan Bank Indonesia. Kementerian Perdagangan seharusnya dapat menetapkan prioritas program dan sasaran yang hendak dicapai secara nasional. Contohnya, SRG sebagai salah satu instrumen program pengendalian stok bahan pangan, stabilisasi harga produk pertanian dan akses permodalan bagi petani. Adanya langkah tersebut memerlukan koordinasi lintas Kementerian termasuk Bank Indonesia juga diperlukan kesamaan persepsi bahwa SRG tidak dilihat semata sebagai produk pembiayaan perbankan tetapi memiliki arti yang strategis. Bahkan di negara lain, pemerintah berperan sebagai penjamin pelunasan resi gudang bila debitor mengingkari janji atau terdapat kejadian *force majeure*.

Hasil studi yang dilakukan oleh Ashari (2011) menunjukkan bahwa dalam implementasi SRG terlihat bahwa SRG memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan, terutama dalam mendukung pembiayaan usaha pertanian, meminimalisasi fluktuasi harga, memperbaiki pendapatan petani, memobilisasi kredit, dan sebagainya.

Akan tetapi, masih terdapat beberapa kendala dalam implementasi SRG. Kendala tersebut seperti besarnya biaya transaksi, inkonsistensi kuantitas dan kualitas produk pertanian, kurangnya dukungan perbankan, dan masih lemahnya kelembagaan petani. Dengan masih lemahnya kelembagaan petani, banyak petani yang beranggapan bahwa peraturan SRG masih sangat rumit sehingga diperlukan penyederhanaan prosedur. Di samping itu, sosialisasi keberadaan SRG juga harus lebih dioptimalkan lagi.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam mengkaji dan menjelaskan faktor-faktor yang menentukan penerapan SRG dilakukan dengan menggunakan model *Decision Matrix Analysis* (DMA). DMA atau juga disebut sebagai *Grid Analysis* merupakan teknik kuantitatif yang dipakai dalam proses pengambilan keputusan, berupa opsi/pilihan diambil berdasarkan beberapa pertimbangan/faktor yang menentukan (Tague, 2005). Faktor-faktor tersebut dengan nilai tertentu akan menentukan pengambilan keputusan dalam mengambil suatu pilihan kebijakan.

Berdasarkan hasil studi literatur dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang cukup mempengaruhi petani dalam menerapkan SRG. Faktor-faktor tersebut yaitu harga komoditas, sarana dan prasarana gudang, biaya terkait resi gudang, dukungan pemerintah, dan manfaat ekonomi dari pemanfaatan resi gudang. Oleh sebab itu, dalam kajian ini keputusan untuk menerapkan/tidak menerapkan SRG dipengaruhi oleh:

- X_1 = Harga Komoditas²
 X_2 = Sarana dan Prasarana Gudang³
 X_3 = Biaya Terkait Resi Gudang⁴
 X_4 = Dukungan Pemerintah⁵
 X_5 = Pemanfaatan Resi Gudang⁶

Selanjutnya, untuk menganalisa keuntungan dan biaya dari penggunaan SRG digunakan metode *Value Tree Objective* (Metode Pohon Keputusan). Metode ini dikembangkan berdasarkan teori Graf untuk mengidentifikasi dan melihat hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi suatu masalah

sehingga dapat ditemukan solusi terbaik (Santosa, 2007). Oleh sebab itu, metode ini banyak digunakan untuk pengambilan suatu keputusan. Lebih lanjut, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *Department for Communities and Local Development* (2009), seluruh keputusan yang diberikan oleh responden dalam penelitian diberi penilaian. Skala penilaian dimulai dari (5) sangat berpengaruh sampai tidak berpengaruh (1). Perspektif manfaat dan biaya terhadap SRG dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Perspektif Manfaat dan Biaya terhadap Sistem Resi Gudang

Perspektif	Variabel	Nilai (1 – 5)
Manfaat (Benefit) <i>Manfaat ekonomis</i>	● Keuntungan petani	
	● Bentuk pembiayaan lainnya yang cepat dan mudah	
<i>Manfaat non ekonomis</i>	● Dapat diagunkan/jaminan	
	● Kekuatan Tawar	
Biaya (Cost) <i>Biaya ekonomis</i>	● Kepastian kualitas dan kuantitas atas barang yang disimpan	
	● Dapat dijadikan alat tukar barang	
<i>Biaya non ekonomis</i>	● Biaya Adm dan Penyimpanan	
	● Margin yang kecil	
<i>Biaya non ekonomis</i>	● Jaminan stok gudang tidak layak krn biaya suku bunga lebih tinggi	
	● Waktu pengurusan dan Prosedur yang berbelit	
<i>Biaya non ekonomis</i>	● Fasilitas gudang belum memadai	
	● Hasil produksi tidak memenuhi kuantitas dan kualitas yang dapat digudangkan	

Sumber: Hasil berbagai studi literatur

Keterangan: Nilai 1 – tidak berpengaruh, dan 5 – sangat berpengaruh

- ² Faktor X_1 – Harga Komoditas. Dimana kondisi harga suatu komoditas berupa volatilitas/fluktuasi, harga pada saat panen, informasi harga pasar suatu daerah dan penyusutan harga suatu komoditas pada saat panen dan pasca panen.
- ³ Faktor X_2 – Sarana dan Prasarana Gudang. Kondisi kelayakan dari sisi kapasitas penyimpanan, jarak gudang ke sentra-sentra petani/ pedagang penghasil komoditas, fasilitas penunjang seperti blower, dryer dan mesin pengayak, dan pelayanan operasional dan manajemen gudang.
- ⁴ Faktor X_3 – Biaya Terkait Resi Gudang. Komponen biaya yang dibebankan kepada pengguna gudang dalam rangka resi gudang antara lain biaya penyimpanan, administrasi, angkut dan bongkar muat dan biaya penyusutan komoditas yang disimpan di gudang.
- ⁵ Faktor X_4 – Dukungan Pemerintah. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan untuk mendorong pemanfaatan SRG, berupa kemudahan akses terhadap kredit dari sektor perbankan, sosialisasi dan penyuluhan kepada petani, bantuan pembangunan fisik gudang dan pendampingan bagi petani dalam menerapkan SRG.
- ⁶ Faktor X_5 – Pemanfaatan Resi Gudang. Penggunaan Resi Gudang oleh petani/ pedagang baik untuk jaminan/ agunan di bank, dijual/dipindahtangankan ke pihak lain, dijual di pasar lelang maupun disimpan dalam rangka mengharapkan harga yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi saat ini.

Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi pustaka dan kajian terkait dengan implementasi SRG. Sedangkan data primer diperoleh dari hasil survei lapangan di daerah dan wawancara mendalam dengan responden petani, pengelola gudang, dinas yang membidangi perdagangan, dan perwakilan Bank Jawa Timur (Jatim). Pelaksanaan survei dilakukan terhadap 18 responden yang terdiri dari sembilan responden yang sudah memanfaatkan SRG dan sembilan responden yang belum memanfaatkan SRG. Seluruh responden tersebut merupakan petani jagung yang berlokasi di kabupaten Tuban, provinsi Jawa Timur. Untuk petani jagung yang sudah memanfaatkan SRG mayoritas adalah petani yang berlatar belakang pedagang dan memiliki minimal satu hektar luas lahan kebun. Sebaliknya, untuk petani yang belum memanfaatkan SRG adalah mayoritas petani kecil dengan hasil produksinya tidak lebih dari 3 ton.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Pemanfaatan SRG Jagung secara Keseluruhan

Sejak diluncurkan tahun 2008, SRG baru menerbitkan 931 resi dengan total volume komoditas yang dijaminakan sebesar 37.251 ton yang setara dengan Rp 179,95 miliar (Kompas, 2013). SRG dapat digunakan sebagai alternatif sistem pembiayaan dan tunda jual sampai pada tingkat harga yang tepat sehingga petani memperoleh harga yang lebih baik. Petani pun tidak

khawatir dengan pemenuhan modal usaha atau pun pemenuhan kebutuhan hidup karena resi dapat dijadikan sebagai jaminan kredit di bank. Namun demikian, dalam implementasinya, SRG memiliki banyak tantangan antara lain, peminatnya masih minim. Contohnya, dibandingkan nilai perdagangan komoditas jagung yang mencapai Rp 54 triliun per tahun (Kompas, 2013), barang yang dijaminakan melalui SRG nilainya tidak mencapai Rp 1 miliar, yaitu sebesar Rp 920,220,310.

Berdasarkan informasi pada Harian Kompas, Sabtu 13 Juli 2013, terdapat berbagai alasan yang menyebabkan rendahnya minat petani menggunakan SRG. Alasan tersebut antara lain: belum semua petani mengenal SRG, ketidakjelasan mekanisme dan analisis usaha, tidak adanya jaminan harga jual di pasar, dan masih terbatasnya sarana pergudangan yang dapat diakses oleh petani. Selain itu, petani masih menganggap bahwa perbankan mempersulit nasabah dalam pengajuan kredit, dan terbatasnya lahan garapan petani jagung yang kurang dari 0,5 hektar.

Jagung sendiri di Indonesia merupakan komoditas pangan terpenting kedua setelah padi/beras. Selain sebagai sumber pendapatan dan lapangan kerja, komoditas ini juga dapat menghasilkan devisa negara melalui ekspor. Di masa datang terdapat indikasi kuat bahwa tingkat permintaan jagung oleh industri akan terus meningkat, seiring dengan penambahan penduduk dan peningkatan kebutuhan pakan ternak. Produksi jagung pada tahun 2012 mencapai 19,38 juta ton pipilan kering, meningkat 1,73 juta ton atau 9,83%,

dibanding realisasi produksi 2011 yang sebanyak 17,64 juta ton. Peningkatan produksi jagung diperkirakan karena adanya pertambahan areal panen seluas 95,22 ribu hektar atau 3,4%, dan kenaikan produktivitas sebesar

3,28 kwintal per hektar atau melonjak 7,19% (Badan Pusat Statistik, 2012). Berdasarkan gambaran tersebut, dapat terlihat bahwa potensi resi gudang untuk komoditas jagung adalah sangat besar.

Tabel 2. Rekapitulasi Resi Gudang, 2008–2013

Pengelola Gudang/Gudang	Jumlah Resi Gudang	Jumlah Komoditi (Ton)	Nilai Barang
Gudang Nganjuk	2	43	170,612,500
Gudang Tulungagung	2	129	299,500,000
Gudang Lombok Timur	3	227	550,175,000
Gudang Sampang Sakobanah	3	72	220,800,000
Gudang Sampang Banyuades	1	16	44,800,000
Gudang Pasaman Barat	3	42	144,455,800
Gudang Gowa	4	62	115,431,000

Sumber : BAPPEBTI (2013)

Komoditas jagung tersebar di beberapa daerah di Indonesia mulai dari bagian barat hingga Indonesia bagian timur. Berdasarkan data dari BAPPEBTI tahun 2008–2013 (lihat Tabel 2), wilayah Jawa Timur sebagai sentra penghasil jagung merupakan daerah yang paling banyak memanfaatkan Resi Gudang untuk dijadikan pembiayaan melalui Bank BRI dan Bank Jatim. Pengelola gudang dengan aset gudang yang dikelola terbanyak adalah PT. Pertanian dengan enam gudang penyimpanan jagung, diikuti oleh PT. Bhandha Ghara Reksa dan PT. Petindo Daya Mandiri

dengan masing-masing mengelola satu gudang.

Analisis Faktor Penentu dalam Penerapan SRG Jagung

Kabupaten Tuban merupakan salah satu dari lima daerah penghasil jagung dominan di Jawa Timur. Kabupaten Tuban berada pada peringkat kedua sebagai daerah penghasil jagung terbesar di Jawa Timur setelah Kabupaten Sumenep. Selain itu, di kabupaten Tuban juga sudah terdapat satu gudang milik pemerintah daerah yang telah menggunakan SRG, khususnya untuk jagung.

Tabel 3. Hasil Analisa Faktor Penentu Penerapan SRG Jagung, DMA di Jawa Timur

Responden	Pilihan	X1	X2	X3	X4	X5	Total
P1	Menerapkan SRG	12,2	14,4	10,7	16,8	11,4	65,5
P2		12,2	14,4	11,6	17,8	11,4	67,4
P3		17,8	18,2	15,1	13,8	11,4	76,3
P4		11,3	13,4	13,3	14,8	11,4	64,2
P5		15,0	18,2	15,1	14,8	11,4	78,3
P6		12,2	15,3	12,4	16,8	15,2	71,9
P7		12,2	13,4	10,7	14,8	16,1	67,2
P8		11,3	11,5	9,8	13,8	15,2	61,6
P9		11,3	11,5	9,8	13,8	9,5	55,9
TOTAL		115,5	130,3	108,5	137,2	116,8	608,3
P1	Tidak Menerapkan SRG	16,8	15,3	14,2	16,9	19,0	82,2
P2		15,8	15,3	16,0	15,9	17,1	80,1
P3		15,8	15,3	14,2	18,8	19,0	83,1
P4		15,8	15,3	14,2	15,0	15,2	75,5
P5		15,8	15,3	10,7	15,0	15,2	72,0
P6		15,8	15,3	14,2	15,0	15,2	75,5
P7		15,8	15,3	14,2	18,8	19,0	83,1
P8		15,8	15,3	10,7	11,3	11,4	64,5
P9		15,8	11,5	10,7	11,3	11,4	60,7
TOTAL		143,2	133,9	119,1	138,0	142,5	676,7
Grand Total		258,7	264,2	227,6	275,2	259,3	1285,0

Sumber: Hasil Survei (2013), diolah

Berdasarkan hasil survei di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, diperoleh gambaran mengenai pertimbangan petani jagung dalam menerapkan SRG. Pada Tabel 3, faktor utama yang cukup mempengaruhi petani untuk menerapkan SRG adalah dukungan pemerintah (X4) dengan nilai total 137, 2. Menurut para petani yang sudah memanfaatkan SRG yang menjadi alasan utama untuk menunda jual hasil panennya adalah adanya himbauan langsung dari Bupati untuk menggunakan SRG di awal tahun 2013, walaupun kondisi harga jagung pada saat itu cukup tinggi yaitu Rp 3.400 per kg. Tingginya harga jagung di kabupaten Tuban pada saat itu karena panen raya tidak terjadi serentak,

ketika terjadi panen jagung di Kabupaten Tuban belum tentu di daerah lainnya juga ada panen karena perbedaan jenis sawah yang berpengaruh terhadap sistem irigasi sawah.

Faktor lain yang cukup berpengaruh terhadap pilihan petani jagung untuk menerapkan SRG adalah sarana dan prasarana gudang (X2) dengan nilai total 130,3. Menurut salah satu petani yang memanfaatkan SRG, pelayanan pengelola gudang di Kabupaten Tuban sudah sangat bagus dan responsif, pihak pengelola gudang selalu memberitahukan jika ada yang berminat membeli jagungnya, pihak pengelola juga selalu memberitahukan kondisi jagung yang disimpan di gudang.

Alasan utama bagi petani yang belum tertarik menerapkan SRG adalah fluktuasi harga jagung (X1). Ketika terjadi panen di Kabupaten Tuban, harga jagung yang diperoleh petani cenderung tinggi. Hal ini dikarenakan panen yang tidak merata di provinsi Jawa Timur. Selain itu produksi jagung yang dihasilkan petani rata-rata di bawah 3 ton sehingga jumlah tersebut tidak memenuhi syarat untuk diresigudangkan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasan (2008), bahwa pembiayaan resi gudang tidak efektif dan efisien jika hanya dilakukan untuk hasil panen yang jumlahnya kecil. Oleh karena itu diperlukan kelompok tani yang dapat menampung seluruh hasil panen para petani yang belum memenuhi batas minimal penyimpanan di gudang.

Ketidaktahuan mengenai informasi SRG dan ketidakberanian untuk mencoba sistem yang relatif baru bagi para petani juga menjadi kendala dalam pemanfaatan SRG. Mayoritas petani tersebut juga ingin melihat contoh sukses dari petani yang telah memanfaatkan SRG terlebih dahulu, jika memang sistem tersebut berhasil dan memberikan keuntungan bagi petani maka mereka tertarik untuk menggunakan SRG.

Faktor lain yang cukup berpengaruh terhadap pertimbangan untuk tidak menerapkan SRG petani jagung di Kabupaten Tuban adalah, faktor X4 (dukungan pemerintah) dengan nilai total 142,5. Mayoritas dari petani berpendapat bahwa sosialisasi mengenai SRG masih sangat jarang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Satu-satunya acara yang menginformasikan mengenai SRG adalah acara yang dilakukan oleh Bupati Tuban dan mengundang langsung

para petani jagung untuk menghimbau penggunaan SRG. Oleh sebab itu, masih banyak petani yang belum mengetahui informasi mengenai SRG. Padahal seperti yang disebutkan dalam hasil penelitian Lacroix dan Panos (1996), sosialisasi SRG penting dilakukan agar petani paham dan tertarik menggunakan sistem tersebut.

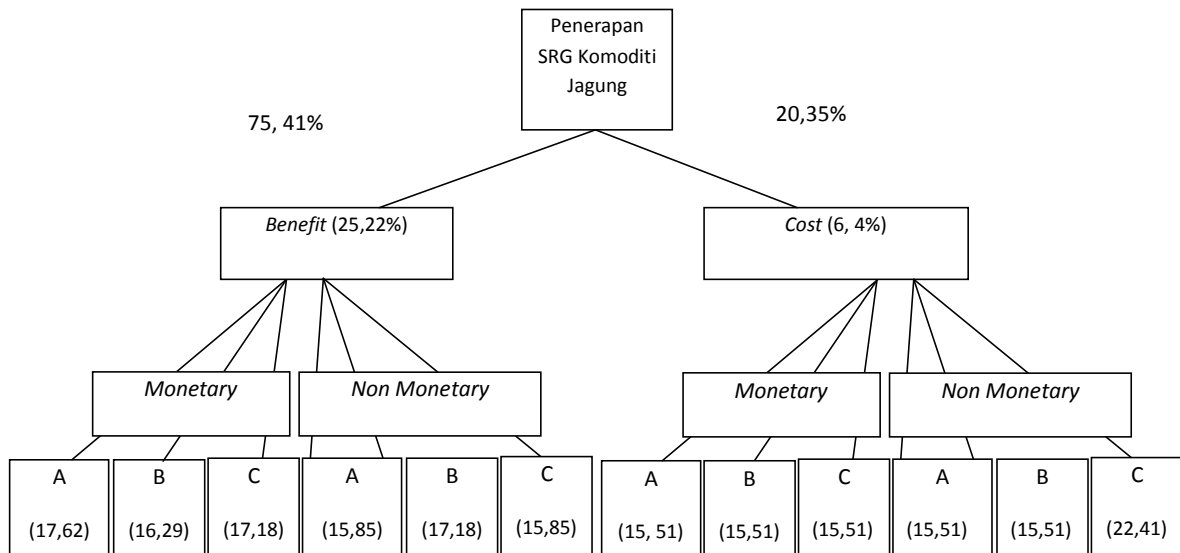
Berdasarkan gambaran di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas petani yang mengetahui dan memahami konsep SRG masih sangat terbatas dan mayoritas dari petani jagung bahkan tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan SRG. Khususnya untuk Kabupaten Tuban yang notabene adalah daerah penghasil jagung tertinggi kedua sudah seharusnya pemerintah daerahnya lebih agresif lagi dalam mensosialisasikan SRG sehingga informasi SRG ini diketahui dan dipahami oleh seluruh petani jagung.

Gambar 1 menunjukkan persentase manfaat dan biaya berdasarkan persepsi dari responden yang sudah memanfaatkan SRG. Pada umumnya, penerapan SRG di kabupaten Tuban lebih menggambarkan persepsi keuntungan dibandingkan persepsi biaya. Hal tersebut terlihat dari nilai persentase persepsi manfaat yang lebih tinggi yaitu 75,41% dibandingkan dengan nilai persentase biaya (20,35%). Untuk persepsi keuntungan ataupun biaya terbagi menjadi sisi keuangan (ekonomi) ataupun non keuangan.

Terdapat tiga persepsi manfaat dari sisi keuangan yaitu keuntungan petani, bentuk pembiayaan lain yang mudah dan cepat, serta resi dapat diagunkan dan diperjualbelikan. Persepsi pertama, keuntungan petani, memiliki nilai sebesar 17,62% Hal ini mengindikasikan

bahwa terdapat sebanyak 17,62% petani yang beranggapan bahwa menunda penjualan akan memberikan keuntungan lebih baik bagi mereka daripada menjualnya langsung pada waktu panen. Menurut petani, dengan

menunda jual hasil panennya mereka memperoleh margin keuntungan antara Rp 100-200/kg. Keuntungan tersebut diperoleh petani dengan menunda jual sekitar dua minggu sampai dengan dua bulan disimpan di gudang.



Gambar 1. Value Tree Objective Benefit and Cost Persepsi Petani, Jawa Timur

Sumber: Hasil Survei (2013), diolah

- Keterangan: Manfaat Ekonomi —> A. Keuntungan petani; B. Bentuk pembiayaan lainnya yang cepat dan mudah; C. Dapat diagunkan
 Manfaat Non ekonomi —> A. Kekuatan Tawar; B. Kepastian kualitas dan kuantitas barang yang dijaminakan; C. Dapat dijadikan alat tukar barang
 Biaya Ekonomi —> A. Biaya administrasi dan penyimpanan; B. Margin yang kecil; C. Jaminan stok gudang tidak layak karena suku bunga lebih tinggi
 Biaya Non Ekonomi —> A. Waktu pengurusan dan prosedur yang berbelit; B. Fasilitas gudang tidak memenuhi standar; C. Hasil produksi yang tidak memenuhi persyaratan untuk digudangkan.

Persepsi kedua, yaitu resi gudang sebagai bentuk pembiayaan yang mudah dan cepat memiliki nilai sebesar 16,29. Artinya, sebanyak 16,29% petani berpendapat bahwa prosedur dan mekanisme resi gudang bukanlah hal yang rumit. Dalam pola resi gudang, petani membawa jagungnya ke gudang untuk dilakukan pengecekan apakah jagungnya layak atau tidak untuk di

simpan dalam gudang. Berdasarkan pemaparan salah satu petani, ketika ada petani yang akan menyimpan barangnya maka pihak pengelola gudang langsung menghubungi Unit Pengolahan Terpadu (UPT) pengujian sertifikasi mutu barang untuk mengecek persentase kadar air, butir rusak, butir warna lain, butir pecah, dan kotoran. Dari hasil pengujian tersebut akan diketahui jagung tersebut

berada pada mutu atau kualitas sangat baik, baik, atau cukup. Hal ini disebabkan mutu atau kualitas jagung sangat mempengaruhi penetapan besaran harga yang tertulis dalam resi. Untuk kualitas sangat baik maka harga yang diberikan adalah harga tertinggi di pasar misalnya pada bulan Mei yaitu Rp 3.400,-/kg. Setelah jagung yang akan disimpan lolos uji, maka pada hari berikutnya akan dilakukan survei oleh pihak bank dan dua hari kemudian akan terbit resi dan pencairan dana. Dengan demikian, total waktu yang diperlukan adalah lima hari kerja paling cepat. Jika lebih dari pada lima hari kerja dana belum juga cair maka pihak pengelola gudang akan terus menanyakan hal tersebut kepada pihak perbankan. Petani mendapatkan dana senilai 70% dari total harga jagung yang dititipkan di gudang dengan harga yang berlaku di pasar pada saat itu.

Persepsi ketiga, resi dapat diagunkan dan diperjualbelikan memiliki nilai 17,18. Berdasarkan nilai tersebut, dapat diasumsikan terdapat 17,18% petani yang beranggapan bahwa dengan memiliki resi atas hasil panen yang disimpan di gudang, petani merasa aman. Hal ini disebabkan resi dapat dijadikan sebagai jaminan ke bank untuk memperoleh dana tunai yang dapat digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari dan untuk memulai usaha pertanian berikutnya.

Selain manfaat ekonomi, keuntungan lain yang diperoleh dengan memanfaatkan SRG adalah kekuatan posisi tawar petani, kepastian kualitas

dan kuantitas hasil panen yang dihasilkan dan resi gudang dapat ditukarkan barang. Dalam hal kekuatan posisi tawar, terdapat 15,85% petani yang berpendapat bahwa posisi tawar petani menjadi lebih kuat bila dibandingkan tidak menggunakan SRG. Hal tersebut disebabkan petani menyadari bahwa terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar hasil panennya dapat disimpan dalam gudang SRG dan kemudian diresigudangkan. Syarat utamanya⁷ adalah kadar air jagung yang tidak boleh melebihi 17. Untuk menjaga hal tersebut maka petani berupaya untuk dapat memproduksi hasil panen yang berkualitas. Hal tersebut disebabkan barang yang disimpan dalam SRG dijamin oleh bank dengan harga pasar yang relatif lebih baik daripada harga tengkulak. Oleh sebab itu, barang yang disimpan dalam SRG harus sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Permendag No. 26 Tahun 2007.

Kondisi tersebut didukung dari adanya 17,18% petani yang berpendapat bahwa kualitas dan mutu hasil panen yang dihasilkan menjadi lebih baik dan lebih pasti. Selain karena adanya usaha keras dari petani agar menghasilkan hasil panen yang baik, juga dikarenakan ketika hasil panen akan disimpan di gudang maka akan ada tim penilai khusus yang akan mengukur persentase kadar air, butir rusak, butir warna lain, butir pecah, dan kotoran. Gudang penyimpanan yang sudah memenuhi persyaratan SNI serta pemeriksaan rutin mengenai kondisi barang yang disimpan di gudang oleh pengelola gudang juga memberikan

⁷ Persyaratan lain yang harus penuhi oleh petani jika ingin memanfaatkan SRG adalah sak atau karung yang digunakan harus seragam dan harus dijahit dengan mesin bukan dengan tangan (Hasil wawancara dengan pengelola gudang, 2013)

jaminan adanya kepastian kualitas dan kuantitas hasil panen yang disimpan. Dengan demikian, mutu, kualitas, dan kuantitas jagung dapat dipastikan berada pada posisi baik, sangat baik atau cukup. Keuntungan lainnya adalah resi gudang dapat diagunkan untuk mendapatkan bantuan permodalan yang nantinya digunakan petani untuk melakukan usaha pertanian jagung berikutnya, seperti pembelian pupuk, bibit, dan sebagainya. Terdapat 15,85% petani yang berpendapat resi gudang membantu memudahkan petani untuk mendapatkan pupuk, alat-alat pertanian, bibit dan sebagainya yang diperlukan untuk memulai usaha pertanian. Hal tersebut sejalan dengan Ashari (2011) yang mengatakan bahwa salah satu manfaat SRG adalah sebagai salah satu aset petani yang dapat agunkan untuk mendapatkan bantuan dana tunai. Dana tersebut bisa digunakan untuk modal usaha tani pada periode berikutnya ataupun untuk memenuhi kebutuhan petani lainnya.

Sementara itu terdapat tiga persepsi biaya dari segi keuangan dan non keuangan. Dari sisi keuangan, persepsi pertama adalah biaya administrasi dan penyimpanan, selisih margin sangat kecil atau bahkan tidak ada, dan jaminan stok gudang tidak layak karena suku bunga lebih tinggi. Nilai persentase untuk persepsi biaya dari sisi keuangan relatif sama yaitu 15,51. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa terdapat 15,51% petani berpendapat bahwa dari sisi keuangan SRG tidak memberatkan petani. Pada dasarnya besaran biaya simpan untuk jagung adalah Rp 150/kg selama 4 bulan, sebulan sekitar Rp 37/kg. Biaya

tersebut sudah termasuk asuransi dari PT Sinarmas. Namun demikian, sampai dengan saat ini khususnya di kabupaten Tuban, pemerintah daerah juga memberikan subsidi bagi petani yang memanfaatkan SRG sehingga petani tidak dibebankan biaya penyimpanan. Akibatnya, petani tidak merasa terbebani dengan biaya administrasi dan penyimpanan di gudang. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Tuban dalam rangka mendukung pelaksanaan SRG agar petani tertarik untuk memanfaatkan SRG. Bahkan, terdapat truk pengangkut khusus yang disediakan pemerintah daerah untuk membawa barang dari lokasi pertanian untuk dibawa ke gudang dan tidak ada biaya tambahan jika menggunakan angkutan tersebut.

Selanjutnya, menurut petani yang sudah memanfaatkan SRG, dengan menunda jual hasil panen jagungnya, petani mendapatkan margin keuntungan yang cukup tinggi yaitu antara Rp 100–200/kg. Margin tersebut dirasakan petani cukup menguntungkan apalagi jika memang kualitas jagung yang disimpan termasuk kualitas sangat baik, karena nilai pasar yang tertera di resi adalah harga terbaik di pasar, mencapai Rp 3.400/kg. Hal tersebut disebabkan sebelum hasil panen disimpan dalam gudang, harus lolos uji persyaratan dari UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang.

Kemudian petani juga beranggapan bahwa biaya suku bunga yang digunakan juga relatif sudah wajar. Untuk daerah Jawa Timur, bank yang ditunjuk sebagai pelaksana penyalur kredit resi gudang adalah Bank Jatim. Masa kredit maksimal untuk jagung adalah 4 bulan dan tidak dapat diperpanjang. Plafon

kredit yang akan diberikan perbankan adalah maksimal 70% dari nilai resi gudang dan paling tinggi sebesar Rp 75 juta per petani. Suku bunga yang diberikan adalah 10,50% pa (per annum) efektif, dimana sebesar 4,50% disubsidi pemerintah dan 6% menjadi beban debitor (petani).

Dari sisi non keuangan, persepsi biaya yang dirasakan petani relatif cukup memberatkan adalah hasil produksi petani terkadang tidak dapat memenuhi kuantitas dan kualitas yang disyaratkan oleh pengelola gudang. Hal tersebut terlihat dari mayoritas persepsi petani yaitu 22,41% yang berpendapat bahwa terkadang persentase kadar air pada jagung yang dihasilkan belum mampu memenuhi batas kualitas sangat baik yaitu kadar air 17%. Mayoritas kadar air jagung hasil panen petani berkisar antara 15-16%. Namun demikian, dengan kondisi kadar air tersebut tetap diperbolehkan untuk disimpan di gudang hanya jagung yang tidak termasuk dalam kualitas yang paling tinggi. Kemudian, bagi petani yang hanya menghasilkan panen di bawah 3 ton dipastikan tidak dapat menyimpan jagungnya di gudang. Untuk itu diperlukan suatu wadah seperti koperasi yang dapat menampung seluruh hasil panen dan mengatasnamakan kelompok untuk menyimpan jagung di gudang.

Selanjutnya, untuk fasilitas gudang dan prosedur SRG yang berbelit bukan menjadi suatu kendala yang cukup berarti dalam pelaksanaan SRG menurut para petani yang sudah memanfaatkannya. Hal ini terlihat dari nilai persentase persepsi yang relatif kecil yaitu 15,51%. Dari segi fasilitas gudang dan pelayanan pengelola

gudang sudah sangat baik. Gudang juga sudah dilengkapi dengan alat pengering (*dryer*), tetapi alat pengering tersebut hanya dapat digunakan untuk gabah saja. Sedangkan untuk mesin pengering khusus jagung belum tersedia dan baru akan dianggarkan pada tahun 2014. Kemudian, pihak pengelola gudang juga dapat membantu dalam memasarkan barang yang disimpan di gudang ke pembeli. Biasanya pembeli langsung datang ke gudang dan menanyakan langsung kepada pihak pengelola gudang apakah tersedia jagung yang dibutuhkan atau tidak. Jika pembeli merasa cocok dengan harga dan barang yang ada maka pihak pengelola gudang langsung menghubungi pemilik barang untuk menanyakan apakah barang tersebut mau dijual atau tidak. Pembeli biasanya adalah para tengkulak atau pedagang besar yang masuk pabrik pakan ternak.

Kemudian, untuk prosedur dan mekanisme pemanfaatan SRG juga dirasakan petani tidak sulit. Dalam pola resi gudang, petani membawa jagungnya ke gudang untuk dilakukan pengecekan apakah jagungnya layak atau tidak untuk disimpan dalam gudang. Ketika ada petani yang akan menyimpan barangnya maka pihak pengelola gudang langsung menghubungi UPT Penguji Sertifikasi Mutu Barang untuk mengecek persentase kadar air, butir rusak, butir warna lain, butir pecah, dan kotoran. Dari hasil pengujian tersebut akan diketahui jagung tersebut berada pada mutu atau kualitas sangat baik, baik, atau cukup. Hal ini disebabkan mutu atau kualitas jagung sangat mempengaruhi penetapan besaran harga yang tertulis dalam resi. Untuk kualitas sangat baik

harga yang diberikan adalah harga tertinggi di pasar misalnya pada bulan Mei yaitu Rp 3.400/kg. Setelah jagung yang akan disimpan lolos uji, pada hari berikutnya akan dilakukan survei oleh pihak bank dan dua hari kemudian akan terbit resi dan pencairan dana. Dengan demikian, total waktu yang diperlukan adalah lima hari kerja paling cepat. Jika lebih daripada lima hari kerja dana belum juga cair maka pihak pengelola gudang akan terus menanyakan hal tersebut kepada pihak perbankan.

Berdasarkan perbandingan nilai persentase manfaat dan biaya dan pengalaman petani yang telah memanfaatkan SRG, dapat disimpulkan bahwa pola resi gudang telah dirasakan manfaatnya oleh petani, yaitu terpenuhinya kebutuhan uang tunai serta keuntungan yang cukup layak dari usaha tani jagung. Pola resi gudang juga cukup memiliki peluang dan prospektif sebagai salah satu model pemasaran terutama saat harga sedang berada pada level terendah.

Dalam skala nasional adanya resi gudang juga dapat menjamin ketersediaan bahan pakan ternak. Jagung pipilan yang disimpan di gudang dapat menjadi cadangan dan penyangga pada saat paceklik sehingga pemerintah tidak perlu tergantung kepada impor jagung pipilan untuk pakan ternak. Jika dilakukan secara masal, maka pola resi gudang berpotensi sekaligus sebagai stabilisator harga pangan ternak, khususnya yang berbahan dasar jagung.

Berdasarkan pada pengalaman Kabupaten Tuban secara konseptual, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar pola resi gudang

bisa berjalan secara optimal, yaitu: (1) komoditas yang disimpan rentan terhadap fluktuasi harga, tetapi pada saat-saat tertentu harga dapat naik; (2) komoditas memiliki daya tahan cukup lama seperti jagung dan gabah; (3) gudang harus memenuhi persyaratan SNI; (4) komoditas yang disimpan mudah ditaksir dan harus ada yang ahli menaksir, dan (5) pengawas atau pemegang kunci gudang harus orang yang dapat dipercaya. Dua faktor terakhir terkait dengan mutu barang dan untuk menghindari kecurangan sehingga barang yang disimpan benar-benar terjamin kualitasnya dan sesuai dengan standar. Hal ini sangat penting sebab menyangkut dengan nilai-nilai kepercayaan yang sangat diperlukan untuk menarik minat pihak perbankan sebagai penyandang dana.

Selain itu, faktor lainnya yang juga menjadi dasar pemilihan menggunakan SRG atau tidak bagi petani adalah pelayanan gudang, fasilitas gudang, jarak gudang, dan kapasitas gudang. Namun demikian, Pemerintah Daerah Tuban seharusnya lebih sering melakukan sosialisasi mengenai SRG kepada para petani di desa-desa, sehingga informasi mengenai SRG dapat diketahui dan dipahami oleh seluruh petani di Kabupaten Tuban.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan analisis DMA, faktor utama yang menjadikan pertimbangan dalam menerapkan SRG bagi petani di Kabupaten Tuban khususnya dan di provinsi Jawa Timur pada umumnya adalah tersedianya sarana dan prasarana gudang yang mendukung

serta pengelolaan gudang yang relatif sudah baik, yaitu dikelola oleh PT. Pertani. Selain itu adanya himbauan langsung dari Bupati Kabupaten Tuban bagi para petani jagung yang potensial untuk memanfaatkan gudang penyimpanan (dukungan pemerintah daerah) menjadikan penerapan SRG menjadi lebih berdayaguna. Namun demikian, pada prakteknya mayoritas petani jagung di Kabupaten Tuban masih relatif enggan untuk memanfaatkan SRG. Hal tersebut disebabkan SRG adalah suatu sistem baru dan para petani memerlukan bukti nyata kesuksesan bahwa dengan memanfaatkan sistem tersebut akan memperoleh keuntungan yang lebih tinggi.

Selanjutnya, berdasarkan analisis persepsi manfaat dan biaya, terlihat bahwa manfaat terbesar yang dirasakan oleh petani dari adanya SRG adalah memperoleh keuntungan yang lebih tinggi karena adanya selisih harga jual akibat menunda jual pada saat panen. Kemudian, resi gudang dapat dijadikan sebagai jaminan di lembaga keuangan seperti bank juga memberikan nilai lebih tersendiri bagi petani. Sebab, petani selain memperoleh jaminan kualitas mutu hasil panennya dengan harga yang relatif tinggi, juga memperoleh bantuan permodalan usaha untuk memulai usaha pertanian berikutnya. Sedangkan dari sisi persepsi biaya tidak terdapat kendala yang berarti karena mayoritas petani memperoleh subsidi dari Pemerintah Daerah baik untuk biaya administrasi ataupun untuk alat angkut dari kebun ke gudang sudah disediakan oleh pemda.

Berdasarkan kondisi tersebut, beberapa hal yang dapat diusulkan sebagai rekomendasi kebijakan bagi

Pemerintah Daerah Tuban antara lain 1). Perlunya dukungan pemerintah dalam hal sosialisasi dan edukasi, serta penyampaian *success stories* atau bukti nyata kesuksesan bahwa dengan memanfaatkan sistem tersebut petani akan memperoleh keuntungan yang lebih tinggi, 2). Perlunya membentuk lembaga seperti koperasi yang dapat menampung seluruh hasil panen khususnya bagi petani dengan jumlah produksi panennya dibawah 3 ton, sehingga para petani tersebut juga dapat menyimpan jagungnya di gudang dengan atas nama kelompok, dan 3) Perlunya penyediaan dryer khusus untuk komoditas jagung di gudang penyimpanan karena dryer yang ada tidak cocok apabila digunakan untuk mengeringkan jagung.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashari. (2011). Potensi dan Kendala Sistem Resi Gudang (SRG) Untuk Mendukung Pembiayaan Usaha Pertanian di Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. Vol. 29 (2). Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Aviliani dan U. Hidayat. (2005). *Menuju Skim Pembiayaan Resi Gudang yang Atraktif*. Diunduh tanggal 17 April 2013 dari <http://www.indef.or.id/xplod/upload/arts/Resipersen20Gudang.HTM>
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas (BAPPEBTI). (2013). *Laporan Rekapitulasi Resi Gudang*. Jakarta: Kementerian Perdagangan.
- BPS. (2012). *Kabupaten Tuban Dalam Angka*. BPS Kabupaten Tuban.
- BPS. (2013). *Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Timur 2013*. BPS Provinsi Jawa Timur. No. 20/03/35/Th.XI, 1 Maret 2013.
- Departement for Communities and Local Government. (2009). *Multi-Criteria Analysis: a Manual*. Communities and Local Government. London. Diunduh

- tanggal 15 September 2013 dari https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/7612/1132618.pdf
- Hasan, F. (2008). Potensi Penerapan Sistem Resi Gudang di Indonesia. Institute for Development of Economic and Financing (INDEF). *Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Sistem Resi Gudang, Pengembangan Alternatif Pembiayaan melalui Sistem Resi Gudang*. Hotel Borobudur: tanggal 4 November 2008. Jakarta.
- Hollinger, F, Rutten, L, and Krassimir, K. (2009). The Use of Warehouse Receipt Finance in Agriculture in Transition Countries. *Working paper disampaikan pada World Grain Forum 2009*. St. Petersburg/Russian Federation: tanggal 6-7 Juni 2009.
- Kompas. (2013, 13 Juli). Makna Resi Gudang.
- Lacroix, R dan Panos, V. (1996). Using Warehouse Receipts in Developing Countries and Transition Economies. *Journal Finance and Development*. Vol. 33, No. 3, September.
- Muhi, H.A. (2011). *Fenomena Pembangunan Desa*. Institute Pemerintahan Dalam Negeri. Jatinangor, Jawa Barat.
- Peraturan Bank Indonesia (BI) No. 9/6/PBI Tahun 2007. *Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Konvensional*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Peraturan Menteri Perdagangan No. 26/M-DAG/PER/6/2007. *Barang yang dapat disimpan di gudang dalam penyelenggaraan Sistem Resi Gudang*. Jakarta: Kementerian Perdagangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007. *Pelaksanaan Undang-undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Riana, D. (2010). *Penggunaan Sistem Resi Gudang Sebagai Jaminan Perbankan di Indonesia*. Tesis Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia
- Santosa, Budi. (2007). *Data Mining: Teknik Pemanfaatan Data untuk keperluan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tague, N. (2005). *The Quality Toolbox*. Second Edition, ASQ Quality Press.

**FASILITAS BEBAS BEA MASUK BAGI LEAST DEVELOPED COUNTRIES DAN
MANFAATNYA BAGI INDONESIA**
*Duty Free Facility for Least Developed Countries and
Their Benefits for Indonesia*

Adrian D. Lubis

Pusat Pengkajian Kebijakan Perdagangan Internasional, Badan Pengkajian dan Pengembangan
Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan-RI,

Jl. M. I. Ridwan Rais No.5 Jakarta Pusat, adrian.lubis@kemendag.go.id

Naskah diterima: 14 Januari 2013

Disetujui diterbitkan: 12 November 2013

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mengkaji manfaat pemberian fasilitas bebas bea masuk bagi negara penerima yang dikelompokkan ke dalam LDC dan manfaatnya bagi Indonesia sebagai negara pemberi. Metode yang digunakan adalah Indeks Spesialisasi Perdagangan, Indeks *Intra Industry Trade*, Uji Beda dan Model Keseimbangan Umum GTAP. Hasil analisis yang diperoleh menunjukkan bahwa fasilitas bantuan akses pasar tersebut tidak merugikan industri nasional dan merupakan sumber alternatif untuk memperoleh bahan baku. Hal tersebut akan semakin kuat jika Indonesia memanfaatkan fleksibilitas sebagai negara berkembang yang tidak diwajibkan untuk menghapus bea masuk seluruh pos tarif yang dikenakan kepada negara-negara LDC. Namun, dalam pelaksanaannya fasilitasi tersebut harus diikuti dengan pemberlakuan surat keterangan asal yang ketat untuk meminimalkan kemungkinan penyelundupan dari negara bukan anggota LDC.

Kata kunci : Bebas Bea Masuk, Least Developed Countries, Akses Bahan Baku, Manfaat

Abstract

This study is conducted to investigate the benefits of the duty-free facility for the Least Developed Countries (LDC) as receivers and the benefits for Indonesia as a donor. The methods of analysis used in this study are Trade Specialization Index, Index of Intra Industry Trade, Differential Test and General Equilibrium Model of GTAP. The study found that the duty-free facility is not detrimental to the national industry and as an alternative source of obtaining raw materials. It will be stronger if Indonesia utilizing the flexibility as developing country with no obligation to remove all import duties charged to LDC countries. However, in practice, such kind of facilitation should be followed by the application of strict certificate of origin to minimize the possibility of smuggling from countries other than the members of the LDC.

Keywords: *Duty Free, Least Developed Countries, Access for Raw Material, Benefits*

JEL Classification : F1, F13, F17

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara anggota G20 memiliki kewajiban untuk melaksanakan kesepakatan yang telah disetujui salah satunya dalam pertemuan pimpinan kelompok tersebut di Seoul tahun 2011. Adapun salah satu kesepakatan dalam pertemuan tingkat tinggi tersebut adalah memberikan bantuan akses pasar kepada negara paling tidak berkembang (*Least Developed Countries/ LDC*) berupa penghapusan kebijakan kuota dan tarif. Adapun kesepakatan tersebut merujuk pada Deklarasi Para Menteri di Hongkong, Desember 2005.

Usulan dalam deklarasi tersebut adalah memberikan akses pasar terhadap 97% dari total pos tarif atau volume impor negara bersangkutan terhadap impor dari negara-negara LDC. Dalam pemberian akses pasar tersebut, setiap negara yang masih tergolong negara berkembang seperti Indonesia diberikan fleksibilitas dalam pelaksanaannya.

Pemberian akses pasar kepada negara-negara LDC bertujuan untuk mengurangi kemiskinan (*reducing poverty*) dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*enhancing economic growth*) bagi negara LDC. Adapun negara-negara yang termasuk kedalam LDC adalah Angola, Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Burundi, Chad, Congo Djibouti, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Kamboja, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambik, Myanmar, Nepal, Nigeria, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Solomon Island, Tanzania, Togo, Uganda, dan Zambia. Kelompok negara LDC tersebut didasarkan pada pengelompokan

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas negara yang diyakini sangat sulit melepaskan diri dari kemiskinan akibat rendahnya pendapatan per kapita, terbatasnya sumber daya manusia, dan kerentanan perekonomian mereka berdasarkan *Economic Vulnerability Index* (UNCTAD, 2012).

Salah satu kasus manfaat pemberian akses pasar bagi negara LDC dapat dilihat dari temuan Bouet, et al (2010). Menurut Bouet, et al (2010), pemberian akses pasar melalui kebijakan bebas bea masuk oleh negara maju disertai negara ekonomi kuat lain seperti Brazil, Cina, India, dan Rusia diperkirakan memberikan dampak positif bagi perekonomian negara LDC. Sebaliknya dampak bagi negara pemberi bebas bea masuk tidak signifikan karena pangsa impor dari LDC relatif kecil.

Namun, di Indonesia masih terdapat kekhawatiran bahwa pemberian bebas bea masuk akan merugikan produsen domestik karena produk LDC merupakan produk substitusi bagi produk nasional. Hal ini disebabkan pemberian fasilitas bebas bea masuk tersebut hanya satu arah, dari Indonesia kepada negara-negara LDC, tidak timbal balik. Oleh karena itu pertimbangan utama dalam pemberian fasilitas adalah peningkatan akses pasar bagi LDC. Menyadari permasalahan tersebut, perlu dilakukan kajian mengenai manfaat pemberian bebas bea masuk bagi negara yang dikelompokkan ke dalam LDC tersebut bagi Indonesia, khususnya produsen domestik, dan sektor industri. Selanjutnya, berdasarkan temuan tersebut akan diusulkan rumusan pelaksanaan kebijakan tersebut yang bisa memberikan manfaat bagi Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Liberalisasi

Liberalisasi sering diidentikkan sebagai keterbukaan dalam perekonomian. Liberalisasi ekonomi/perdagangan dicirikan dengan penghapusan atau pengurangan berbagai hambatan yang terjadi dalam perdagangan antar-negara, baik hambatan berupa tarif atau non-tarif. Penghapusan/pengurangan berbagai hambatan perdagangan tersebut berangkat dari argumen/landasan teori perdagangan internasional yang menyatakan bahwa hambatan perdagangan menyebabkan distorsi bagi perekonomian sehingga sumber daya yang tersedia tidak dialokasikan secara efisien.

Penghapusan berbagai hambatan perdagangan akan meningkatkan manfaat dari perdagangan internasional yaitu memberikan akses terhadap barang yang lebih murah bagi konsumen serta meningkatkan pendapatan bagi pemilik sumber daya (*resources*) karena menurunkan biaya produksi (Salvatore, 1997).

Kerangka Teori Dampak Penurunan Tarif terhadap Kinerja Perdagangan dan Industri Nasional

Salah satu hambatan perdagangan internasional adalah hambatan tarif (Salvatore, 1997). Tarif merupakan salah satu instrumen kebijakan perdagangan luar negeri yang paling sering digunakan yang bertujuan untuk membatasi arus perdagangan internasional. Tarif adalah suatu pembebanan atas barang yang melintasi daerah pabean (daerah geografis). Tarif adalah pajak atau cukai yang dikenakan untuk suatu komoditi yang diperdagangkan lintas batas

teritorial. Pengenaan tarif dimaksudkan untuk memproteksi produk dalam negeri. Dengan adanya tarif harga barang impor dalam mata uang nasional meningkat sehingga permintaan di pasar dalam negeri menurun dan hal tersebut mendorong produksi dalam negeri karena adanya kenaikan permintaan domestik atas barang hasil dalam negeri. Ada tiga macam jenis tarif yang biasa digunakan dalam perdagangan internasional yaitu :

1. Bea Ekspor (*export duties*) adalah pajak yang dikenakan terhadap barang yang diangkut atau diekspor menuju negara lain.
2. Bea Transito (*transit duties*) adalah pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang melalui wilayah suatu negara dengan ketentuan bahwa barang tersebut sebagai tujuan akhirnya adalah negara lain.
3. Bea Impor (*import duties*) adalah pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang masuk ke dalam suatu negara dengan ketentuan bahwa negara tersebut sebagai tujuan akhir.

Beberapa studi menunjukkan bahwa pemberian akses bebas bea masuk pada LDC akan meningkatkan kinerja perdagangan LDC namun tidak memberikan dampak negatif signifikan terhadap *preference-giving countries*. Penghapusan tarif memiliki dampak berbeda antar negara. Studi Li dan Carter (2009) dengan Tobit model menemukan bahwa penurunan tarif dan kuota impor untuk negara paling tidak berkembang dapat meningkatkan akses pasar namun relatif kecil. Hal ini dikarenakan proteksi

terhadap beberapa komoditas tidak diikuti dengan peningkatan produksi dan kemampuan ekspor komoditas tersebut dari negara paling tidak berkembang.

Berisha-Krasniqi, et al (2008) menggunakan CGE MIRAGE model yang menunjukkan bahwa pemberian 97% bebas bea masuk hanya memberikan manfaat minimal pada ekspor negara LDC, namun pemberian tersebut berdampak positif bagi peningkatan akses pasar produk pertanian Afrika ke Brazil, Meksiko dan Turki. Pemberian akses 100% bebas bea masuk akan memberikan dampak yang lebih besar karena akan meningkatkan akses pasar dua kali lipat, khususnya pada negara LDC di Asia.

Studi Bouet, et al (2010) menunjukkan bahwa pemberlakuan kebijakan 100% bebas bea masuk bagi LDC akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian negara tersebut. Perubahan ekspor dan *welfare* positif terjadi pada Malawi sebagai negara eksportir tembakau dan selama ini dikenakan tarif 350% di pasar Amerika. Peningkatan kinerja perdagangan juga terjadi pada negara LDC di Asia Tenggara dari peningkatan ekspor produk tekstil Kamboja ke pasar Amerika. Sebaliknya, Madagaskar merupakan negara yang akan mengalami penurunan ekspor dan kesejahteraan setelah pemberlakuan bebas bea masuk. Dampak kebijakan tersebut akan semakin signifikan jika Brazil, Cina dan India juga mendukung kebijakan ini. Kebijakan ini memberikan dampak yang relatif kecil terhadap kesejahteraan, ekspor dan produksi domestik dari *preference-giving countries*.

Berdasarkan MIRAGE model, Bouet (2008) menunjukkan bahwa

pasar bebas global akan meningkatkan pendapatan nasional LDC sebesar 0,8%. Pembebasan 100% akses pasar untuk LDC akan memberikan peningkatan kesejahteraan yang lebih besar dibandingkan pasar bebas global, khususnya pada Malawi, Asia Tenggara, Bangladesh dan Ethiopia.

Hasil studi dampak penghapusan bebas bea masuk terhadap Malawi oleh Douillet (2012) juga mendapatkan hasil yang sama. Kebijakan ini akan memberikan dampak yang lebih besar terhadap pertumbuhan GDP dan pengentasan kemiskinan di Malawi. Walaupun komoditas tembakau dibudidayakan oleh sebagian besar petani, namun peningkatan akses pasar terutama akan lebih dinikmati oleh petani tembakau skala besar yang memiliki akses pada pasar internasional.

Penurunan tarif multilateral akan menyebabkan perubahan harga dan kinerja perdagangan yang berbeda antar negara berkembang. Penurunan tarif pada Kolombia akan menyebabkan penurunan relatif dalam harga ekspor di sepuluh sektor perdagangan dengan penurunan tertinggi pada kendaraan bermotor dan suku cadang (2,7%). Sebaliknya di Chile, terjadi peningkatan harga khususnya komoditas pangan impor yang rata-rata harganya naik sebesar 4,22%. Hoekman, Ng, and Olarreaga (2002), menyatakan penurunan tarif impor pada produk pertanian di negara berkembang menyebabkan tingkat harga komoditas ini menjadi sangat *volatile*. Kebijakan domestic support diperlukan jika negara berkembang melakukan penurunan tarif untuk menstabilkan tingkat harga domestik.

Biaya pemberian akses pasar bebas bea masuk oleh *preference-giving countries* relatif kecil dibandingkan manfaat yang dirasakan LDC. Elliot (2012) menggunakan CGE model menunjukkan bahwa pemberian akses pasar penuh pada LDC hanya akan mengurangi produksi tekstil Amerika sebesar 0,03%. Pada kasus Selandia baru, analisis CGE dinamis menunjukkan bahwa penghapusan tarif impor memiliki dampak yang sangat kecil terhadap GDP dan efisiensi alokatif pada negara tersebut. Kebijakan tersebut juga dapat menurunkan tingkat *welfare loss* (NZIER Viewpoint, 2010).

Dampak Penghapusan Tarif Terhadap Perekonomian Indonesia

FAO (2004) menyatakan bahwa negara paling tidak berkembang dan negara terbuka kecil pada umumnya adalah eksportir bahan mentah (terutama komoditas pangan), yang memiliki tren harga barang mentah cenderung menurun. Hal ini menyebabkan pendapatan nasional negara-negara tersebut turun. Sebagian besar negara LDC merupakan net *food importers* bahkan banyak yang menghabiskan lebih dari sebagian pendapatan ekspor untuk membeli bahan pangan impor untuk menutupi penurunan produksi pangan domestik.

Kebijakan bebas bea masuk bagi LDC sebaiknya difokuskan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku murah bagi Industri domestik di negara pemberi fasilitas. Indonesia memiliki ketergantungan terhadap bahan baku impor karena harga bahan baku domestik jauh lebih tinggi dari pada produk

impornya. Hal ini diduga disebabkan buruknya kondisi infrastruktur Indonesia sehingga meningkatkan biaya transportasi dan membuat barang domestik termasuk bahan baku menjadi lebih mahal (Adiningsih et al, 2009).

Salah satu industri yang memiliki ketergantungan impor tinggi terhadap bahan baku adalah industri garmen dan tekstil. Sejak tahun 1980 ketergantungan industri terhadap bahan baku impor bisa mencapai 100%. Ketergantungan tersebut berkurang saat krisis, namun masih tetap tinggi (Robertson et al, 2003). Ketergantungan industri tekstil dan garmen terhadap bahan baku impor dipenuhi oleh Amerika, Eropa dan Vietnam (Drajat, 2008). Hal tersebut menyebabkan pertumbuhan industri garmen dan tekstil Indonesia masih lambat, ditambah semakin banyaknya negara produsen pesaing (India, Sri Lanka dan Bangladesh) serta tingginya impor ilegal (Drajat, 2008). Hermawan (2011) menyatakan penurunan tarif impor garmen hingga 0% akan meningkatkan impor garmen Indonesia sebesar 179,89%, namun meningkatkan produksi garmen Indonesia sebesar 21,95%.

Walaupun terdapat potensi peningkatan impor Indonesia akibat penurunan tarif impor, akan tetapi banyak pihak yang optimis bahwa kenaikan impor bahan baku Indonesia akan menyebabkan produksi industri tekstil dan garmen akan meningkat (*Indotextiles*, 2012). Hal serupa terjadi untuk kasus India, Goldar (2005) menyatakan adanya penurunan tarif impor untuk bahan baku industri tekstil sejak tahun 2000 cenderung mengakibatkan kenaikan impor (bahan baku), namun dikompensasi dengan

peningkatan ekspor produk tekstil sehingga memperkuat posisi India sebagai salah satu eksportir tekstil terbesar di dunia.

Penghapusan tarif impor pada komoditas pertanian yang tidak memiliki keunggulan komparatif dapat memberikan dampak negatif terhadap surplus perdagangan. Studi Haryadi (2010) menyatakan bahwa penghapusan tarif impor pada komoditas pangan seperti padi, gandum, jagung, kedele, gula akan menurunkan ekspor dan sebaliknya meningkatkan kinerja impor. Komoditas yang paling sensitif terhadap penghapusan tarif dan paling turun ekspornya adalah padi (467%). Penurunan ekspor yang besar menunjukkan bahwa komoditas ini kalah bersaing dibandingkan produk impor dari negara lain (Haryadi, 2010). Peningkatan impor setelah penurunan tarif impor juga akan terjadi pada komoditas tanaman sayur dan buah-buahan (Firmansyah, 1998).

Menurut Rachbini (2008), adanya penurunan tarif impor hingga 0% menjadikan kedelai sebagai tanaman pangan yang tidak menguntungkan secara ekonomi untuk dibudidayakan oleh petani. Hal tersebut akan menurunkan produksi domestik dan meningkatkan ketergantungan pada kedelai impor yang membanjiri pasar. Hal serupa juga terjadi pada komoditas jagung yang tidak memiliki keunggulan komparatif namun dibutuhkan sebagai bahan baku industri nasional. Impor jagung akan terus berlangsung dan cenderung terus meningkat seiring dengan penghapusan tarif impor (Siregar dan Suryadi, 2006).

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Penelitian dilakukan dengan menggunakan tiga metode yaitu dua indeks daya saing yaitu *Grubel Lloyd–Intra Industry Trade* dan Spesialisasi Perdagangan, metode uji beda dan model keseimbangan umum GTAP versi 8.

A. Indeks Spesialisasi Perdagangan

Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP) untuk menganalisis posisi atau tahapan perkembangan suatu produk. ISP ini dapat menggambarkan apakah untuk suatu jenis produk, Indonesia cenderung menjadi negara eksportir atau importir. Secara matematika, ISP dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ISP = \frac{(X_{ia} - M_{ia})}{(X_{ia} + M_{ia})}$$

Di mana X dan M masing-masing adalah ekspor dan impor, serta i dan a masing-masing adalah barang jenis i dan negara a. Secara implisit, indeks ini mempertimbangkan sisi permintaan dan sisi penawaran, dimana ekspor identik dengan suplai domestik dan impor adalah permintaan domestik dan selanjutnya ekspor terjadi apabila ada kelebihan atas barang tersebut di pasar domestik.

B. *Intra Industry Trade* (IIT indeks)

Untuk menggambarkan keterkaitan perdagangan kedua negara dilakukan analisis *Intra-Industry Trade* (IIT). IIT indeks digunakan untuk menganalisis tingkat integrasi dalam suatu kawasan tertentu. Integrasi yang tinggi menunjukkan kedekatan perdagangan

diantara negara-negara di kawasan tersebut. IIT indeks yang umum

digunakan adalah Grubel-Lloyd Indeks dengan rumus:

$$IIT = \frac{\sum(X + M) - \sum|X - M|}{\sum(X + M)} \times 100 \text{ atau } 1 - \frac{\sum|X - M|}{\sum(X + M)} \times 100$$

dimana:

X = ekspor M = impor

Nilai Grubel Lloyd indeks berkisar antara 0 sampai 100. Jika jumlah yang diekspor sama dengan jumlah yang diimpor untuk suatu produk, maka indeksnya akan bernilai 100, mengindikasikan kegiatan perdagangan antar industri di kedua negara. Sebaliknya apabila perdagangan suatu negara hanya melibatkan satu pihak saja (ekspor atau impor saja) maka nilai indeksnya adalah 0, yang mengindikasikan tidak adanya

perdagangan timbal balik atau dikenal dengan *interindustry trade*. Data tersebut menggunakan data ekspor dan impor tahun 2006 sampai 2011 yang berasal dari Pusdatin, BPPKP, Kemendag.

C. Uji Beda

Uji beda nilai tengah membandingkan apakah terdapat perbedaan posisi tahap perdagangan dan keterkaitan perdagangan antar Indonesia dan LDC setelah liberalisasi perdagangan.

$$Z = \frac{X - \mu_0}{(S / \sqrt{n})}$$

dimana : Z = Nilai perbedaan yang dicari, X = Nilai rata-rata sampel; μ_0 = Nilai rata-rata populasi, S = Standar deviasi populasi; n = besar sampel.

data SAM tahun 2007-2008, dan untuk selanjutnya akan dikenal sebagai GTAP versi 8. Adapun beberapa persamaan yang relevan dengan hasil yang ditampilkan adalah sebagai berikut:

D. Global Trade Analysis Project (GTAP)

Persamaan dalam model GTAP dalam paper ini berdasarkan pada persamaan yang dapat dilihat dalam *main table* GTAP versi 6, yang dapat dipelajari lebih lanjut dalam Francois, McDonald dan Nordström (1996), Siriwardana (2000), dan Nicita (2005). Selanjutnya data sosial accounting matriks (SAM) GTAP versi 6 diperbaharui dengan

Trade Balance (DTBALi)

Persamaan ini menunjukkan perubahan neraca perdagangan yang disebabkan oleh 1) VXW (i,r): perubahan ekspor, 2) vxwfob (i,r) : perubahan harga FOB, 3) VIW (i,r): perubahan impor berdasarkan harga CIF, 4) Viwcif (i,r) : perubahan harga CIF, dan 5) i, r: negara atau region. Adapun persamaan tersebut dirumuskan dengan:

$$DTBALi(i,r) = [VXW(i,r) / 100] * vxwfob(i,r) - [VIW(i,r) / 100] * viwcif(i,r)$$

Kesejahteraan (EV) Persamaan ini menunjukkan perubahan kesejahteraan yang disebabkan oleh: 1) INCOME_{EV}(r): perubahan pendapatan

regional dan 2) $y_{ev}(r)$: perubahan pendapatan rumah tangga. Adapun persamaan tersebut dirumuskan dengan:

$$EV(r) = [INCOME_{EV}(r) / 100] * y_{ev}(r)$$

Permintaan Tenaga Kerja (qfe)

Persamaan ini menunjukkan perubahan permintaan tenaga kerja yang disebabkan oleh: 1) $q_{fe}(i,j,r)$: perubahan permintaan kepemilikan faktor produksi/bahan baku terkait, 2) $a_{fe}(i,j,r)$: perubahan harga faktor produksi, 3) $q_{va}(j,r)$: perubahan

permintaan faktor produksi komposit, 4) $ESUBVA(j)$: elastisitas substitusi dari faktor produksi berdasarkan nilai tambah, 5) $p_{fe}(i,j,r)$: perubahan harga dan permintaan faktor produksi domestik dan 6) $p_{va}(j,r)$: perubahan nilai tambah industri. Adapun persamaan tersebut dirumuskan dengan:

$$q_{fe}(i,j,r) = -a_{fe}(i,j,r) + q_{va}(j,r) - ESUBVA(j) * [p_{fe}(i,j,r) - a_{fe}(i,j,r) - p_{va}(j,r)]$$

Simulasi kebijakan yang digunakan bertujuan untuk melihat dampak pemberian akses pasar bebas tarif dan kuota pada LDC terhadap perekonomian nasional. Adapun dampak liberalisasi tersebut yang dianalisis mencakup dampak liberalisasi terhadap perubahan kesejahteraan, indeks volume dan indeks harga, pendapatan nasional (GDP), perubahan output nasional, perubahan impor, perubahan ekspor dan perubahan surplus perdagangan.

Jepang, Korea, Selandia Baru), dan b) LDC + Mitra FTA. Adapun negara yang dikelompokkan ke dalam LDC adalah Bangladesh, Kamboja, Madagaskar, Malawi, Mauritania, Mozambik, Nepal, Nigeria, Senegal, Tanzania, Uganda, Zambia, dan sisanya dikelompokkan kedalam Afrika Barat Lainnya, Afrika Selatan lainnya, Afrika Tengah, Afrika Tengah Selatan, Afrika Utara Lainnya, Oseania Lainnya, Asia Tenggara Lainnya, dan Karibia.

Data

Data yang digunakan dalam studi ini adalah data perdagangan Indonesia dengan LDC diperoleh dari Statistik Indonesia yang dihasilkan Pusat Data dan Informasi, BPPKP, Kemendag, serta data GTAP khususnya GTAP versi 8. Sektor yang digunakan sesuai dengan standar GTAP versi 8, namun untuk agregasi negara menggunakan dua pengelompokan yaitu a) mitra FTA (ASEAN, Australia, China, India,

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Dan Keterkaitan Perdagangan Indonesia Dengan Negara Paling Tidak Berkembang

Tabel 1 menunjukkan kinerja perdagangan Indonesia dengan negara paling tidak berkembang pada periode 2006-2011. Pada tahun 2010, nilai total ekspor Indonesia ke LDC sebesar USD 2.745,73 juta. Tren positif kinerja ekspor Indonesia ke LDC terlihat dari pertumbuhan sebesar 17,32% pada

periode 2006-2010. Pada periode 2010-2011, kinerja ekspor semakin meningkat dengan pertumbuhan 35,01%. Pangsa total ekspor Indonesia ke LDC relatif kecil namun memiliki tren yang meningkat. Pada tahun 2006, pangsa

ekspor Indonesia ke LDC hanya 1,36% dari total ekspor Indonesia ke dunia. Kinerja ekspor semakin meningkat sehingga pada tahun 2011, pangsa ekspor Indonesia ke LDC meningkat menjadi 1,82 %.

Tabel 1. Kinerja Perdagangan Indonesia dan LDC, 2006-2011

Uraian	Nilai (USD Juta)				Jan-Des		Perubahan (%)	Trend (%)
	2006	2007	2008	2009	2010	2010	2011	11/10 6/10
Total Ekspor Indonesia ke Negara LDC	1.38,55	4.303,90	2.203,20	2.183,66	2.745,73	2.745,73	3.706,99	35,01 17,32
Total Impor Indonesia dari Negara LDC	206,22	325,71	932,46	837,72	429,72	429,72	1.046,53	143,54 22,11
Surplus Perdagangan	1.162,33	3.978,19	1.270,74	1.345,94	2.361,01	2.316,01	2.660,46	14,87 15,31
Total Ekspor Indonesia ke Dunia	100.798,62	114.100,89	137.020,42	116.510,03	157.779,10	157.779,10	203.496,62	28,98 9,6
Total Impor Indonesia dari Dunia	61.065,47	74.473,43	129.197,31	96.829,24	135.663,28	135.663,28	177.435,56	30,79 20,43

Sumber: Pusdatin (2012), diolah

Pada impor, walaupun pangsa total impor Indonesia dari LDC relatif kecil, namun terdapat indikasi peningkatan cukup tajam. Hal tersebut ditunjukkan oleh pertumbuhan *share* impor dari LDC terhadap total impor yaitu 0,03% pada tahun 2006 menjadi 0,77% pada tahun 2011. Hal tersebut menunjukkan bahwa pangsa impor meningkat hampir 23 kali lipat dalam lima tahun terakhir. Peningkatan kinerja impor yang jauh lebih tinggi daripada ekspor perlu menjadi perhatian dalam usulan kebijakan bebas bea masuk bagi LDC.

Surplus perdagangan Indonesia dan LDC meningkat dari USD 1.162,23 juta pada tahun 2006 menjadi USD 2.316,01 juta pada tahun 2010. Terlepas dari pertumbuhan impor yang jauh lebih tinggi dari ekspor, surplus perdagangan Indonesia dan LDC memiliki tren positif yaitu meningkat 15,31% pada periode 2006-2010. Berdasarkan data tersebut, diyakini pemberian fasilitas bebas bea masuk kepada LDC tidak akan merugikan Indonesia mengingat nilai impor Indonesia dari LDC relatif kecil dan Indonesia memiliki surplus perdagangan relatif besar.

Tabel 2. Daya saing dan Keterkaitan Industri LDC dengan Indonesia

HS	Pangsa Impor RI	Akumulasi Impor RI	URAIAN	Indeks IIT (Gruber Lloyd)					Indeks ISP				
				2006	2007	2008	2009	2010	2006	2007	2008	2009	2010
5201000000	43,0%	43,0%	Cotton, not carded/combed.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
2709001000	23,6%	66,7%	Crude petroleum oil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
0713319000	6,7%	73,4%	Beans (vigna mungo hepper/vigna radiata wilczek), dried, other than for sowing	0,69	0,00	0,00	0,05	0,05	0,31	1,00	-1,00	-0,95	-0,95
7204490000	2,9%	76,3%	Other ferrous waste and scrap :	0,00	0,00	NA	0,20	0,02	1,00	1,00	NA	-0,80	-0,98
1801000000	2,8%	79,1%	Cocoa beans, whole or broken,raw/roasted	0,00	NA	NA	NA	0,00	-1,00	NA	NA	NA	1,00
6305101100	2,7%	81,9%	Sack&bag,oth bast fibr head 5303, new,of jute	NA	NA	NA	0,00	0,00	NA	NA	NA	-1,00	-1,00
5307200000	1,5%	83,4%	Multiple (folded)/cabled of jute/ oth fibres bast fibres of heading 53.03.	0,00	0,00	0,00	0,75	0,01	-1,00	1,00	1,00	0,25	-0,99
8901902400	1,4%	84,8%	Other vessels, motorised of gross tonnage > 500 but <= 4000 ton	NA	NA	NA	NA	0,00	NA	NA	NA	NA	1,00
1202200000	1,1%	85,9%	Ground nuts, shelled	NA	NA	NA	0,16	NA	NA	NA	NA	-0,84	NA
7404000000	1,1%	86,9%	Copper waste and scrap.	0,06	0,00	0,37	0,00	0,88	-0,94	-1,00	0,63	-1,00	0,12
2710117000	1,0%	87,9%	Naphtha, reformat or preparations for preparing spirits	0,68	0,84	0,56	0,30	0,34	0,32	-0,16	-0,44	-0,70	-0,66
8802401000	0,9%	88,8%	Aeroplanes of an unladen weight > 15,000 kg	0,00	NA	NA	NA	NA	-1,00	NA	NA	NA	NA
3301291900	0,9%	89,7%	Oth pharmaceutical grade-essential oils oth than those of citronella	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1202109000	0,8%	90,5%	Oth ground nuts, not roasted/otherwise cooked, in shell	0,00	0,00	0,00	0,03	0,33	1,00	1,00	1,00	0,97	0,67

Sumber: Hasil Perhitungan (2012)

Keterangan :

- Gruber Lloyd atau disebut juga Intra Industry Trade, dengan nilai 0 – 1. Nilai 1 berarti produk tersebut terkait dengan indutri nasional, nilai 0 sebaliknya. Rumusnya : $1 - \frac{[X-M]}{X+M}$. X = ekspor produk, M = impor produk, [X-M] : harga mutlak X-M.
- Indeks Spesialisasi Perdagangan, dengan nilai -1 sampai 1. Nilai -1 menunjukkan produk bernilai tambah rendah (bahan baku), sedangkan nilai 1 menunjukkan bernilai tambah tinggi (konsumsi). Rumusnya : $\frac{X-M}{X+M}$, X = ekspor produk, M = impor produk.
- Merah diusulkan untuk tidak diliberalisasi kecuali sektor tidak keberatan.

Pemberian akses pasar bagi LDC oleh Indonesia akan berdampak positif jika didukung daya saing produk yang tinggi dan memiliki keterkaitan dengan industri nasional. Tabel 2 memperlihatkan, total impor Indonesia dari negara-negara LDC mencapai USD 1.046,53 juta, ternyata 43% dari impor tersebut merupakan produk katun (*cotton*), 23,6% merupakan minyak mentah (*Crude petroleum oil*), 6,7% merupakan bijian (*Beans*), 2,9% merupakan limbah dan potongan besi (*other ferrous waste and scrap*), 2,8% merupakan biji coklat (*Cocoa beans*), 2,7% merupakan karung (*sack and back of jute*), 1,5% merupakan benang untuk karung (*multiple cable of jute*), 1,4%

merupakan kapal bertonase antara 500 sampai 4.000 ton (*Other vassel, motorised of gross tonage > 500 but ≤ 4.000 ton*), 1,1% terdiri dari kacang tanah (*ground nut*), 1,1% terdiri dari limbah dan potongan tembaga (*cooper waste and scrap*), serta 1% terdiri dari Naptha. Akumulasi total impor dari kesebelas produk tersebut mencapai 87,8% dari total impor Indonesia atas seluruh produk negara-negara LDC. Adapun produk yang masih dikenakan tarif dari kesebelas produk tersebut adalah bijian sebesar 5%, limbah dan potongan besi sebesar 5% serta biji coklat sebesar 5%.

Selanjutnya Tabel 2 memperlihatkan daya saing dan keterkaitan produk dengan industri antara Indonesia

dan LDC masih rendah. Nilai indeks yang mendekati nol mengindikasikan perdagangan antara Indonesia dengan LDC masih merupakan *inter-industry trade*, atau perdagangan antar industri di Indonesia dengan negara-negara LDC tanpa saling meningkatkan nilai tambah (Grubel and Lloyd, 1971). Hasil perhitungan menunjukkan Indonesia memiliki keterkaitan industri rata-rata sebesar 0,14 pada tahun 2006 dan meningkat menjadi 0,15 pada tahun 2010.

Nilai Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP) sebesar -0,34 pada tahun 2006 dan -0,35 pada tahun 2010, mengindikasikan produk dari industri nasional tidak mampu bersaing dengan produk impor dari negara-negara LDC (Kementerian Perdagangan, 2008). Sebenarnya hal ini bermanfaat bagi industri pengolahan karena

mereka memperoleh akses bahan baku. Namun rendahnya daya saing tersebut menjadi salah satu kendala dan pertimbangan dalam pemberian bebas bea masuk untuk produk dari LDC di pasar Indonesia. Selanjutnya, berdasarkan hasil uji beda ISP dan IIT (Tabel 3), terlihat bahwa daya saing dan keterkaitan dengan industri domestik Indonesia dan LDC tidak mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan yang tidak signifikan tersebut mengindikasikan pola perdagangan dan produk yang diperdagangkan antara Indonesia dengan LDC dalam kurun waktu lima tahun terakhir relatif tidak berubah. Berdasarkan hal ini, diyakini pemberlakuan kebijakan bebas bea masuk diduga berdampak relatif kecil terhadap perekonomian dan kinerja perdagangan di Indonesia.

Tabel 3. Uji Beda ISP dan IIT

No	Uraian	ISP		IIT	
		Means	Prob	Means	Prob
1	Cotton, not carded/combed.	1,50 0,00	0,15	0,00 0,00	1,00
2	Crude petroleum oil	0,00 0,00	1,00	0,00 0,00	1,00
3	Beans (vigna mungo hepper/vigna radiata wilczek), dried, other than for sowing	2,00 1,00	0,65	2,00 1,00	0,65
4	Other ferrous waste and scrap :	0,00 1,50	0,18	0,00 1,50	0,18
5	Cocoa beans, whole or broken, raw/roasted	-	-	-	-
6	Sack&bag, oth bast fibr head 5303, new, of jute	-	-	-	-
7	Multiple (folded)/cabled of jute/ oth fibres bast fibres of heading	2,00 1,00	0,65	0,00 1,50	0,18
8	Other vessels, motorised of gross tonnage > 500 but <= 4000 ton	-	-	-	-
9	Ground nuts, shelled	-	-	-	-
10	Copper waste and scrap.	1,00 2,00	0,65	1,00 2,00	0,65

Sumber: Hasil Perhitungan (2012)

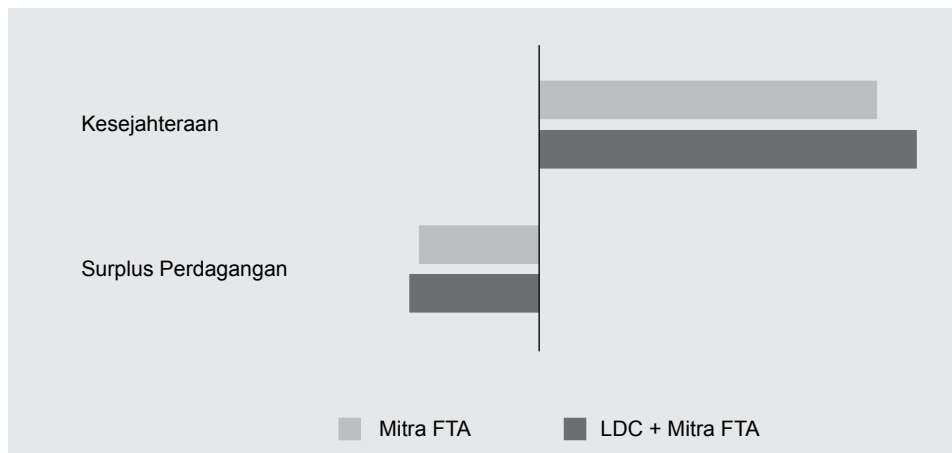
Dampak Pemberlakuan Kebijakan Bebas Bea Masuk bagi Indonesia

Dampak Pemberlakuan Kebijakan Bebas Bea Masuk terhadap Ekonomi Makro

Simulasi pemberlakuan kebijakan bebas bea masuk terhadap ekonomi makro Indonesia relatif kecil. Hal tersebut mengingat bahwa sebagian negara LDC termasuk dalam anggota ASEAN dan telah melakukan liberalisasi dengan Indonesia (Myanmar, Kamboja). Penghapusan kuota dan tarif tidak memberikan dampak signifikan bagi

perekonomian makro Indonesia (GDP, harga), walaupun terdapat tendensi penurunan surplus perdagangan (Gambar 4).

Pemberlakuan kebijakan bebas bea masuk menyebabkan penurunan kinerja perdagangan namun dikompensasi dengan peningkatan kesejahteraan. Hal tersebut sejalan dengan temuan pada kasus negara Selandia Baru dimana penghapusan tarif berdampak relatif kecil terhadap perekonomian makro, namun mampu menurunkan tingkat welfare loss (NZIER *Viewpoint*, 2010).



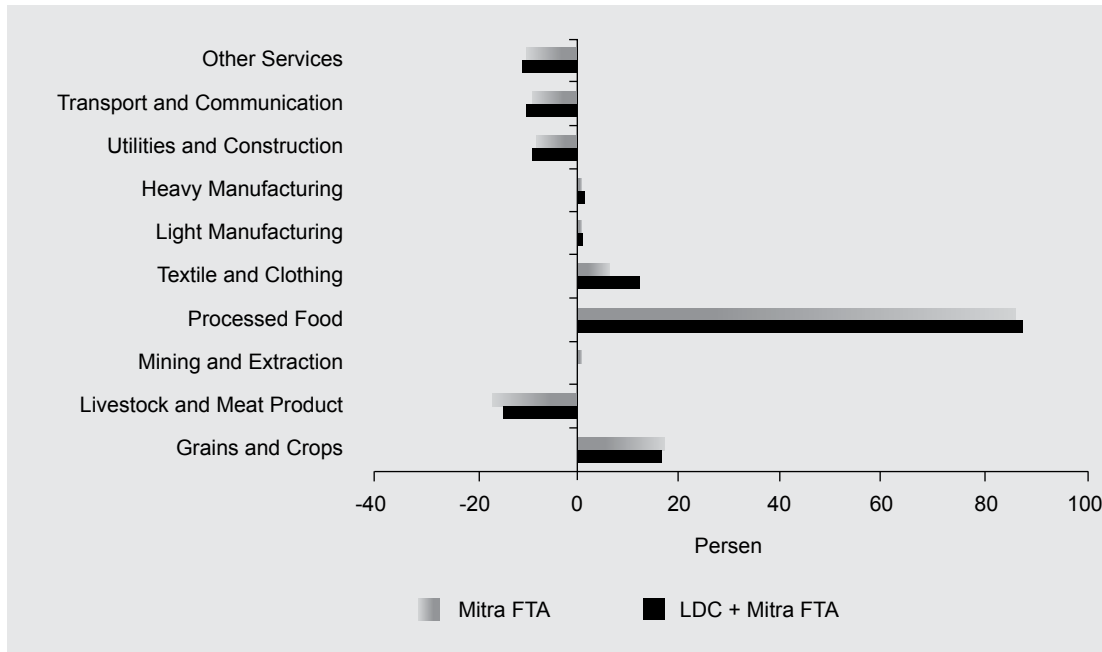
Gambar 4. Dampak Pemberlakuan Bebas Bea Masuk pada LDC terhadap Perekonomian Makro Indonesia

Sumber: Hasil simulasi (2012)

Dampak Pemberlakuan Kebijakan Bebas Bea Masuk terhadap Kinerja Ekspor Nasional

Dampak pemberlakuan kebijakan bebas bea masuk tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja ekspor Indonesia, khususnya setelah liberalisasi perdagangan berjalan (Gambar 5).

Hal tersebut mengingat bahwa *share* ekspor Indonesia ke LDC sangat kecil walaupun memiliki tren yang semakin meningkat. Selama periode 2006-2010, pertumbuhan ekspor sebesar 17,32% namun *share* ekspor ke LDC terhadap total ekspor Indonesia hanya sebesar 1,36% pada tahun 2006 dan 1,82% pada tahun 2010 (Tabel 1).



Gambar 5. Dampak Pemberlakuan Kebijakan Bebas Bea Masuk Terhadap Kinerja Ekspor Nasional

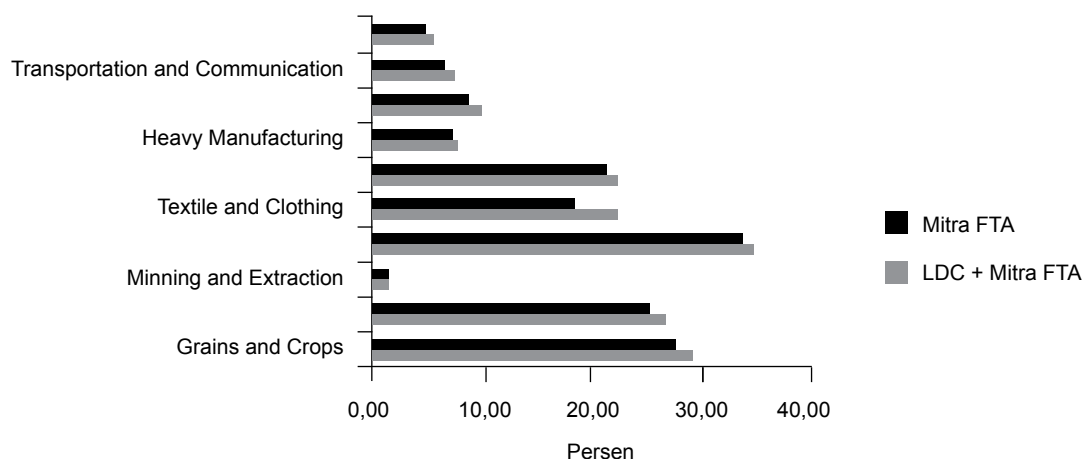
Sumber: Hasil simulasi (2012)

Secara sektoral, pemberlakuan kebijakan bebas bea masuk akan meningkatkan kinerja ekspor nasional untuk tanaman pangan, produk pertanian lain khususnya makanan olahan, serta tekstil dan produk tekstil. Selain itu, peluang peningkatan ekspor Indonesia masih mungkin meningkat lebih tinggi mengingat sebagian besar negara LDC merupakan eksportir barang mentah namun *net food importers*. Pendapatan dari ekspor barang mentah LDC digunakan untuk membeli bahan pangan impor untuk menutupi kelebihan permintaan akibat penurunan produksi pangan domestik (FAO, 2004). Contohnya pada kasus Madagaskar, penurunan tarif impor menyebabkan peningkatan impor akibat membanjirnya barang impor dari Eropa (Hallaert, 2008). Indonesia dapat meminimalkan penurunan surplus perdagangan dengan meningkatkan ekspor makanan olahan

serta tekstil dan produk tekstil pada LDC.

Dampak Pemberlakuan Bebas Bea Masuk terhadap Kinerja Impor Nasional

Gambar 6 menunjukkan bahwa kinerja impor nasional sejak liberalisasi mengalami peningkatan diseluruh kelompok barang. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa liberalisasi perdagangan akan meningkatkan impor yang mengakibatkan penurunan neraca perdagangan pada negara yang memiliki kesiapandandayasaingprodukyanglebih rendah (Park et.al, 2008). Pemberlakuan kebijakan bebas bea masuk pada LDC tidak signifikan merubah kinerja impor nasional dibandingkan pasca liberalisasi dilaksanakan. Hal tersebut disebabkan rendahnya *share* impor Indonesia terhadap LDC (0,03% pada tahun 2006 dan meningkat menjadi 0,77% pada tahun 2011).



Gambar 6. Dampak Pemberlakuan Bebas Bea Masuk terhadap Kinerja Impor Nasional

Sumber: Hasil simulasi (2012)

Peningkatan impor pangan meningkat lebih tinggi daripada sektor lainnya pasca liberalisasi, yaitu makanan olahan, ternak dan produk olahannya, serta biji-bijian dan tanaman pangan. Hal tersebut menunjukkan ketergantungan pangan nasional terhadap impor semakin meningkat sebagai dampak liberalisasi dan pemberlakuan bebas tarif dan kuota dari LDC. Penurunan tarif impor akan meningkatkan impor pada komoditas pertanian yang tidak memiliki keunggulan komparatif, seperti jagung, kedelai, dan

hortikultura (Haryadi, 2010; Rachbini, 2008; Siregar dan Suryadi, 2006 dan Firmansyah, 1998).

Usulan Pemberlakuan Bebas Bea Masuk terhadap LDC

Usulan dalam deklarasi G-20 tahun 2011 adalah memberikan akses pasar terhadap 97% dari total pos tarif atau volume impor negara bersangkutan terhadap impor dari LDC, namun bagi negara berkembang sebagaimana halnya Indonesia, masih memiliki fleksibilitas.

Tabel 4. Tarif Impor MFN Indonesia dan Pangsa Impor dari LDC

Deskripsi	Pos Tarif	Pangsa Impor
Total Pos Tarif Impor	1.598	
A. Tarif MFN 0%	217	51,20%
IIT \geq 0.7	11	0,01%
ISP \leq 0.3	60	50,00%
B. Tarif MFN 5%	755	46,30%
IIT \geq 0.7	23	0,001%
ISP \leq 0.3	163	8,50%
C. Tarif MFN 7.5-10%	286	1,00%
IIT \geq 0.7	6	0,00%
ISP \leq 0.3	53	0,10%
D. Tarif MFN \geq 12.5% dan Spesifik	340	1,50%
IIT \geq 0.7	6	0,00%
ISP \leq 0.3	64	0,00%

Sumber: Hasil Perhitungan (2012)

Keterangan :

IIT \geq 0.7 : keterkaitan dengan kinerja perdagangan industri nasional tinggi

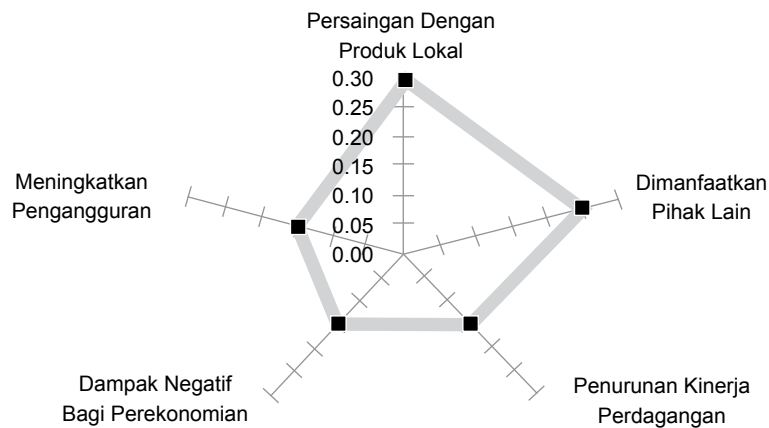
ISP \leq 0.3 : produk impor bernilai tambah rendah / bahan baku bagi industri nasional

Tabel 4 menunjukkan bahwa sebagian besar impor Indonesia dari LDC telah dikenakan tarif yang rendah (MFN 0% dan 5%), khususnya pada produk dengan nilai tambah rendah sebagai bahan baku industri nasional. Jumlah produk impor Indonesia dari LDC mencakup 1.598 pos tarif, yang terdiri dari 217 pos tarif dengan MFN 0%, 755 pos tarif dengan MFN 5%, 286 pos tarif dengan MFN 7,5-10% dan 340 pos tarif dengan MFN minimal 12.5% serta tarif spesifik.

Sesuai dengan klausul fleksibilitas bagi negara berkembang, akses pasar minimal yang dapat diberikan Indonesia bagi LDC adalah sebesar 70% dari total pos tarif atau pangsa impor. Adapun total pos tarif Indonesia adalah 10.012 pos tarif, berdasarkan Buku Tarif dan Bea Masuk Indonesia 2012. Oleh karenanya, Indonesia masih dapat memilih untuk tidak meliberalisasikan 3.003 pos tarif

yang diantaranya dapat memuat 755 pos tarif dengan bea masuk sebesar 5% yang banyak diimpor dari negara-negara LDC dan mungkin bersaing dengan produk domestik. Adapun produk negara-negara LDC yang dikhawatirkan akan bersaing dengan produk domestik adalah biji coklat.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, jelaslah bahwa pemberian fasilitas bebas bea masuk bagi produk yang berasal dari negara LDC tidak akan merugikan Indonesia bahkan diproyeksikan meningkatkan kinerja ekspor makanan olahan nasional. Hal ini disebabkan masih sedikitnya produk yang diimpor Indonesia dari LDC, produk yang diimpor umumnya bahan baku, dan klausul fleksibilitas yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan perlindungan terbaik bagi produk domestik.



Gambar 7. Peta Permasalahan Pemberlakuan Kebijakan Bebas Bea Masuk

Sumber: Puska KPI, (2012)

Selanjutnya, dalam upaya merumuskan kebijakan pemberian fasilitas bebas bea masuk yang tepat, dilakukan kegiatan *Focus Group Discussion* dengan pelaku usaha dan instansi terkait. Gambar 7 menunjukkan

bahwa *stakeholder* terkait memiliki kekhawatiran kebijakan bebas bea masuk bagi LDC akan dimanfaatkan oleh negara ketiga. Untuk mencegah hal tersebut, pemberlakuan kebijakan bebas bea masuk bagi LDC harus

disertai dengan aturan *rules of origin* yang ketat (*local content* 40%).

Hal kedua yang perlu mendapat perhatian adalah persaingan dengan produk domestik. Penghapusan tarif dan kuota impor untuk biji kakao dan produk olahannya dapat mempengaruhi kesejahteraan petani coklat nasional. Artinya kebijakan bebas bea masuk dapat dipertimbangkan lagi untuk komoditas yang memiliki *share* impor tinggi dan dapat dipenuhi dari produksi domestik.

Pemfokusan tujuan pemberlakuan kebijakan bebas bea masuk bagi LDC untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku industri sangat didukung oleh seluruh *stakeholder*. Hal itu akan mengantisipasi dampak negatif pemberlakuan kebijakan bebas bea masuk terhadap perekonomian nasional berupa pengurangan kesempatan kerja dan penurunan kinerja perdagangan relatif kecil.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Total ekspor Indonesia ke LDC (48 negara) pada tahun 2010 sebesar USD 2.745,73 juta dengan pertumbuhan 17,32% selama 2006-2010. Sedangkan total impor Indonesia dari LDC pada tahun 2010 mencapai USD 429,72 juta, yang terdiri dari 43,0% berupa katun (dengan tarif 0%), 23,6% minyak bumi (tarif 0%), 6,9% bijian (tarif 5%), 2,9% limbah besi (tarif 5%) dan 2,8% biji coklat (tarif 5%). Pangsa impor kelima produk tersebut mencapai 79,1% dari total impor atas produk LDC. Surplus perdagangan pada tahun 2010 sebesar USD 2,6 miliar dan tumbuh 15,31% selama 2006-2010.

Daya saing dan keterkaitan industri LDC dengan Indonesia masih rendah, dimana sebagian besar produk impor dari negara tersebut merupakan bahan baku bagi industri nasional. Selanjutnya, hasil simulasi memprediksikan dampak bebas bea masuk akan meningkatkan kinerja impor, mengurangi surplus perdagangan, namun dikompensasi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fasilitas bebas bea masuk sebaiknya ditujukan untuk memberikan akses bahan baku murah bagi industri nasional.

Total pos tarif Indonesia di tahun 2012 adalah 10.012 pos tarif, dimana Indonesia memiliki fleksibilitas untuk tidak meliberalisasikan 30% atau 3.003 pos tarif yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan bagi produk domestik yang bersaing dengan produk dari negara LDC. Klausula fleksibilitas tersebut memberikan kemudahan bagi Indonesia untuk melindungi produk domestik mengingat total pos tarif yang diimpor dari negara-negara LDC hanya 1.598 pos tarif.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, direkomendasikan agar pemberian fasilitas bebas bea masuk harus bertujuan untuk meningkatkan akses bahan baku murah yang dilakukan dengan pemberlakuan ketentuan *Rules of Origin* (Surat Keterangan Asal) yang ketat. Pemberlakuan ketentuan khusus (*Product Specific Rules/PSR*) untuk produk tertentu dilakukan bertahap, dan harus memaksimalkan fleksibilitas sebagai negara berkembang dengan mengecualikan produk impor utama dari negara LDC.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiningsih, S., et al. (2009). *Sustainable Development Impacts of Investment Incentives: A Case Study of the Chemical Industry in Indonesia*. International Institute for Sustainable Development.
- Berisha-Krasniqi, V., et al. (2008). The Development Promise: Can the Doha Development Agenda Deliver for Least-Developed Countries? *IFPRI Note 14*: Washington, DC. IFRI.
- Bouet, A., et al. (2010). The Costs and Benefits of Duty-Free, Quota-Free Market Access for Poor Countries. Who and What Matters? *IFPRI Discussion Paper 00990*: Washington, DC. Markets, Trade and Institutions Division, IFPRI.
- Bouet, A. (2008). The Expected Benefits from Trade Liberalization-Opening The Black Box of Global Trade Modelling. *IFPRI Food Policy Review 8*: Washington, DC. IFRI.
- Drajat, U.A. (2008). *Unveiling Protectionism: Regional Responses to Remaining Barriers in the Textiles and Clothing Trade*. UNESCAP.
- Douillet, M. (2012). Trade and Agricultural Policies in Malawi: Not All Policy Reform is Equally Good for the Poor. *MPRA Paper No. 40948*. Munich Personal RePEc Archive.
- Elliot, K. (2012). *Breaking the Deadlock on Market Access for Least Developed Countries dalam The Future and the WTO: Confronting the Challenges* diedit oleh Ricardo Melendez-Ortiz, Christophe Belimann, dan Miquel Rodriguez Mendoza: Geneva. International Centre for Trade and Sustainable Development.
- FAO. (2004). *The State of Agricultural Commodity Markets*. Roma
- Puska KPI. (2012). Kegiatan Focus Group Discussion Pelaksanaan Pemberian Bebas Bea Masuk dan Bebas Kuota Bagi Negara LDC, Dilaksanakan di Hotel Akmani, Jakarta, 8 November 2012.
- Firmansyah. (1998). *Prospek Komoditas Sayuran dan Buah-Buahan*. Jakarta : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Francois, J.F., B. J. McDonald dan H. Nordström. (1996). *Liberalization and Capital Accumulation in the GTAP Mode*. GTAP Technical Paper No. 7.
- Goldar, B. (2005). *Impact on India of Tariff and Quantitative Restriction under WTO*. Indian Working Paper No.172. Council for Research on International Economic Relations.
- Grubel, H.G., and P.J. Lloyd. (1971). The Empirical Measurement of Intra Industry Trade. *Economic Record 47 (4)*. Diunduh melalui <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1475-4932.1971.tb00772.abstract> ; jsessionid=2519A12909190B3C398BA85821D61FB6.d01t3, pada 20 Juni 2012.
- Hallaert, J.J. (2008). How does a domestic tax reform affect protection against imports?. IMF Working Paper. WP/08/151.
- Haryadi. (2010). *Dampak Penghapusan Tarif Oleh Negara-Negara Anggota WTO terhadap Permintaan Tenaga Kerja di Indonesia*. Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Jambi
- Hermawan, I. (2011). Analisis Dampak Kebijakan Makroekonomi Terhadap Perkembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Bank Indonesia.
- Hoekman, B., F. Ng, M. Olarreaga. (2002). *Reducing Agricultural Tariffs versus Domestic Support: What's More Important for Developing Countries?*. World Bank Policy Research Working Paper 2918.
- Indotextiles. (2012). *Import of Raw Materials Continue to Rise*. [online]. http://www.indotextiles.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2285&Itemid=72. (diakses 14 Agustus 2012).

- Kementerian Perdagangan. (2008). *Indeks Spesialisasi Perdagangan*. Diunduh melalui <http://www.kemendag.go.id>, pada 20 Juni 2012.
- Li, X.L. and C.A., Carter. (2009). The Impact of Tariff-Rate Import Quotas on Market Access. Davis : *Department University of California*.
- Nicita, A. (2005). Multilateral Trade Liberalization and Mexican Households: The Effect of the Doha Development Agenda dalam *Putting Development Back into the Doha Agenda: Poverty Impacts of a WTO Agreement*, Thomas W. Hertel and L. Alan Winters (ed). Washington, DC: World Bank.
- NZIER Viewpoint. (2010). The economic impacts of retaining tariffs in New Zealand: A dynamic CGE analysis. *Working Paper 2010/1*.
- Park, D., et al. (2008). Prospects of an ASEAN–People’s Republic of China Free Trade Area: A Qualitative and Quantitative Analysis. *Economics Working Paper Series No. 30*, Asian Development Bank.
- Pusat Data dan Informasi (Pusdatin). (2012). Neraca Perdagangan Indonesia: Jakarta. Kementerian Perdagangan.
- Rachbini, D. J. (2008). *Hancurnya Sistem Pertanian Kedelai*. Diunduh melalui <http://www.nabble.com/-sastra-pembebasan--Hancurnya-Sistem -Produksi Kedelai-td14988452.html>, pada 14 Agustus 2012.
- Robertson, R., S. et al. (2003). *Globalization and Working Conditions: Evidence from Indonesia*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis: Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada.
- Siregar, M. dan S. Suryadi. (2006). Enhancing Sustainable Development of Diverse Agriculture In Indonesia. *CAPSA Working Paper No. 97* (UNESCAP).
- Siriwardana, M. (2000). Effects of Trade Liberalization in South Asia With Special Reference to Srilanka (paper). Dipresentasikan pada Third Annual Conference on Global Economic Analysis, Monash University, Melbourne, Australia, 23-30 Juni
- Salvatore, D. (1997). *Ekonomi Internasional*. Edisi Kelima. Penerjemah Haris Munandar: Jakarta. Penerbit Erlangga.
- United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD). (2012). *Research and Policy Analysis on LDCs*. Geneve. Diunduh tanggal 20 Juni 2013 dari [http://unctad.org/en/Pages/ALDC/Least %20Developed %20Countries/Research-and-Policy-Analysis-on-LDCs.aspx](http://unctad.org/en/Pages/ALDC/Least%20Developed%20Countries/Research-and-Policy-Analysis-on-LDCs.aspx)

**PENGARUH VARIABEL EKONOMI DAN NON EKONOMI TERHADAP IMPOR
INDONESIA DARI ASEAN+6 MELALUI MODA TRANSPORTASI LAUT**
*The Impact of Economic and Non Economic Variables on Indonesia Import
from ASEAN+6 Through Sea Transportation Modes*

Astari Ayuwangi, Widyastutik

Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB
Jl. Kamper, Kampus IPB Bogor, Indonesia, widyastutik_ipb@yahoo.com

Naskah diterima: 19 September 2012

Disetujui diterbitkan: 22 November 2013

Abstrak

Selama periode tahun 2007-2011 impor Indonesia dari negara-negara ASEAN+6 didominasi oleh impor bahan baku dan bahan penolong. Faktor-faktor yang mempengaruhi dominannya impor Indonesia yang dimaksud, khususnya impor Indonesia yang diangkut melalui moda transportasi laut, merupakan tema utama tulisan ini. Variabel-variabel yang digunakan dalam analisis dengan menggunakan model gravity meliputi variabel ekonomi, yakni GDP per kapita ASEAN+6, GDP per kapita Indonesia, jarak ekonomi, nilai tukar riil, dan variabel non-ekonomi, yakni kualitas pelabuhan, stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan Indonesia. Hasil estimasi dengan menggunakan pendekatan gravity model menunjukkan bahwa variabel yang secara signifikan berpengaruh positif pada impor Indonesia adalah GDP per kapita Indonesia dan kualitas pelabuhan Indonesia. Sedangkan variabel jarak ekonomi, nilai tukar riil, stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan Indonesia secara signifikan berpengaruh negatif.

Kata kunci: Impor, Moda Transportasi, GDP, Kualitas Pelabuhan, Stabilitas Politik

Abstract

During 2007-2011, the Indonesia's imports from the ASEAN+6 countries were dominated by the raw materials. The factors that influence volumes of the Indonesia's imports, especially which transported by sea transport mode, become the main topic of this research. The variables of the gravity model used in this research are economic variables, i.e. per capita GDP of ASEAN+6, Indonesia's per capita GDP, economic distance, and real exchange rate, as well as non-economic variables such as Indonesia's quality of sea port, political stability and government effectiveness. Estimation using the gravity model shows that the variables of Indonesia's per capita GDP and Indonesia's quality of sea ports significantly have positive influence on Indonesia's imports, while the variables of economic distance, real exchange rate, political stability and government effectiveness significantly have negative influence.

Keywords: Import, Transportation Mode, GDP, Quality of Sea Port, Political Stability

JEL Classification: F02, F12, F13, F14, F15

PENDAHULUAN

Memasuki awal abad ke-21, kerjasama antara negara-negara di kawasan ASEAN telah memasuki babak baru, khususnya dalam bidang ekonomi. Integrasi ekonomi diawali dengan terbentuknya ASEAN *Free Trade Area* (AFTA) tahun 1992, ASEAN-China FTA tahun 2004 dan *Comprehensive Economic Partnership in East Asia* (CEPEA) tahun 2007. Kesepakatan CEPEA ini melibatkan negara-negara di kawasan ASEAN, Australia, India, Jepang, Rep. Korea, New Zealand, dan Cina. Mereka tergabung dalam ASEAN+6.

Kesepakatan CEPEA berdampak pada peningkatan volume impor Indonesia dari negara-negara ASEAN+6. Volume impor Indonesia dari negara-negara ASEAN+6 melalui moda transportasi laut dan moda transportasi udara selama periode tahun 2007-2011 mencapai 45,52% dari total impor Indonesia (BPS, 2012b). Hal yang menarik dalam perdagangan impor Indonesia dari negara-negara ASEAN+6 adalah dominasi jasa pengangkutan perdagangan melalui moda transportasi laut. Dominasi jasa angkutan laut juga terjadi pada perdagangan tingkat internasional. Menurut survei UNCTAD (2012), kontribusi moda transportasi laut dalam perdagangan internasional sebesar 77%, transportasi darat

sebesar 16%, perpindahan sebesar 6,7%, dan transportasi udara sebesar 0,3%. Moda transportasi laut memiliki keunggulan dibandingkan dengan moda transportasi lainnya, yaitu biaya per satuan lebih murah, infrastruktur laut, selat, dan samudera telah tersedia, serta volume angkutan yang sangat besar (Panggabean, 2013). Hummels (2007) menunjukkan bahwa volume barang yang diperdagangkan melalui moda transportasi laut terus tumbuh. Berdasarkan data tahun 1975 – 2004, pertumbuhan tersebut mencapai 4,4% per tahun.

Untuk kawasan ASEAN, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan Singapura merupakan 5 negara ASEAN yang kontribusi sektor jasanya terhadap GDP tertinggi (ASEAN Secretariat, 2012). Dengan Kerjasama Ekonomi Regional Komprehensif (*Regional Comprehensive Economic Partnership*) maka ASEAN+6, Cina, Rep. Korea, Jepang, Australia, Selandia Baru, dan India merupakan salah satu pakta perdagangan bebas terbesar di dunia. ASEAN+6 memiliki PDB sekitar 23 triliun dollar AS atau 1/3 PDB dunia dan 3,5 miliar jiwa penduduk yang terlibat dalam pakta perdagangan ini atau separuh dari populasi dunia. Tabel 1 menunjukkan volume impor Indonesia dari negara-negara ASEAN+6 melalui moda transportasi udara.

Tabel 1. Volume Impor Indonesia dari Negara-Negara ASEAN+6 Melalui Moda Transportasi Udara

Negara	Volume impor (Ton)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Malaysia	2,063	2,675	5,011	13,130	6,995
Filipina	135	923	1,034	643	3,339
Singapura	8,328	60,564	45,383	56,124	54,627
Thailand	39,280	40,143	40,531	84,114	68,374
Australia	2,765	1,580	1,261	12,108	9,216
India	1,662	2,569	3,155	9,263	4,347
Jepang	6,448	13,833	8,688	12,603	17,097
Rep Korea,	1,777	10,095	10,729	13,126	12,148
New Zealand	174	129	126	185	119
Cina	7,631	21,355	19,901	33,568	42,065
Total	70,262	153,866	135,819	234,863	218,363

Sumber: Badan Pusat Statistik (2012a), diolah

Tabel 2 menunjukkan volume impor Indonesia dari negara-negara ASEAN+6 melalui moda transportasi laut mencapai 370 kali lipat volume impor Indonesia dari negara-negara ASEAN+6 melalui moda transportasi udara (BPS, 2012). Hal ini menunjukkan pentingnya moda transportasi laut dalam perdagangan impor Indonesia dari negara-negara ASEAN+6.

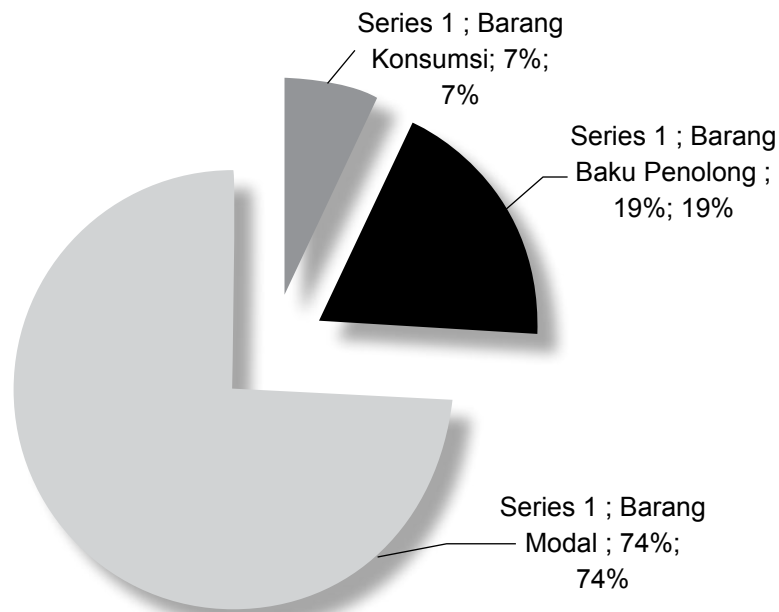
Tabel 2. Volume Impor Indonesia dari Negara-Negara ASEAN+6 Melalui Moda Transportasi Laut

Negara	Volume impor (Ribu Ton)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Malaysia	9,915	9,564	8,812	11,195	9,810
Filipina	362	341	285	323	315
Singapura	12,063	15,913	14,427	17,635	19,163
Thailand	4,910	4,739	4,200	4,922	7,191
Australia	6,333	5,892	6,836	7,511	8,147
India	2,182	3,013	2,247	3,146	4,897
Jepang	2,366	3,855	2,629	3,964	4,104
Rep. Korea	3,074	4,138	3,496	5,302	9,062
New Zealand	493	623	647	570	537
Cina	9,207	9,873	8,024	10,520	12,105
Total	50,909	57,956	51,607	65,092	75,335,

Sumber: Badan Pusat Statistik (2012a), diolah

Menurut golongan barang SITC 1 digit, kelompok barang utama impor Indonesia dari ASEAN+6 selama periode tahun 2007-2011 adalah mesin dan alat angkutan, bahan kimia dan produknya, barang-barang buatan pabrik serta minyak dan bahan bakar mineral (BPS, 2012b). Barang lain yang

diimpor meliputi bahan baku/penolong untuk keperluan industri, barang-barang modal termasuk barang-barang yang bernilai tinggi seperti otomotif dan elektronik, maupun barang konsumsi. Persentase impor Indonesia menurut golongan barang selengkapnya disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Persentase Impor Indonesia Menurut Golongan Barang

Sumber: Badan Pusat Statistik (2012b), diolah

Bahan baku/penolong yang diimpor Indonesia ini digunakan untuk proses industri dalam negeri dan industri yang berorientasi ekspor. Oleh sebab itu, impor seperti ini penting untuk dilakukan apabila harga bahan baku di dalam negeri mahal. Tingginya harga barang baku/penolong berdampak pada rendahnya daya saing produk yang dihasilkannya, baik pada pasar domestik maupun internasional. Oleh karena itu, analisis mengenai variabel-variabel yang menjadi penentu utama terhadap volume impor Indonesia dari negara-negara ASEAN+6 menjadi penting dan perlu dilakukan.

TINJAUAN PUSTAKA Kerjasama Perdagangan Jasa

General Agreement on Trade in Services (GATS) mulai berlaku pada Januari 1995 sebagai hasil dari perundingan Putaran Uruguay untuk perluasan sistem perdagangan multilateral sektor jasa. GATS memberikan mandat kepada setiap pemerintah negara anggota WTO untuk mengurangi hambatan perdagangan sektor jasa.

Untuk kawasan ASEAN, Negara-negara ASEAN telah menyepakati dan mengesahkan *ASEAN Framework*

Agreement on Services (AFAS). Dalam perundingan bidang jasa, AFAS menerapkan prinsip-prinsip sebagaimana yang telah diterapkan dalam *World Trade Organization* (WTO). Untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut, telah dibentuk *Coordinating Committee on Services* (CCS) yang bertugas menyusun modalitas untuk mengelola negosiasi di bidang jasa yang mencakup delapan sektor. Pada dasarnya, kesepakatannya adalah menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan, dengan membuka akses pasar (*market access*) dan penerapan perlakuan nasional (*national treatment*) untuk setiap *mode of supply* di atas. Dalam tulisan ini hambatan perdagangan diterjemahkan menjadi variabel-variabel non ekonomi yang meliputi kualitas pelabuhan, stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan.

Secara umum, tindakan-tindakan yang dilakukan dalam rangka pengurangan hambatan perdagangan di bidang jasa antara lain (Mikiz, 2009) :

1. Menghilangkan hambatan perdagangan jasa, yang sampai tahun 2010 meliputi 4 (empat) sektor jasa prioritas, yaitu transportasi udara, e-ASEAN, kesehatan, dan pariwisata.
2. Melaksanakan pengurangan hambatan untuk sub-sub sektor tambahan lainnya yang disepakati pada putaran perundingan berikutnya diadakan 1 kali dalam 2 tahun, secara bertahap sampai tahun 2015 telah meliputi semua sektor jasa yang ada.
3. Menjadwalkan paket-paket komitmen dengan parameter-parameter sebagai berikut :

- a. Untuk moda 1 dan 2 (perdagangan antar batas dan konsumsi di luar negeri), tidak ada pembatasan, kecuali jika ada alasan-alasan yang dapat diterima (seperti keselamatan publik) seluruh negara anggota sesuai perjanjian secara kasus per kasus.
- b. Mengizinkan partisipasi modal asing (FEP) dalam hal ini ASEAN, dengan batasan sebagai berikut :
 - 1) Tidak kurang dari 51% tahun 2008 (AFAS paket 7) dan 70% tahun 2010 (AFAS paket 8) untuk 4 sektor jasa prioritas
 - 2) Tidak kurang dari 49% tahun 2008 (AFAS paket 7), 51% tahun 2010 (AFAS paket *) dan 70% tahun 2013 untuk jasa logistik
 - 3) Tidak kurang 49% tahun 2008 (AFAS paket 7), 51% tahun 2010 (AFAS paket 8), dan 70% tahun 2015 untuk sektor jasa lainnya.
 - 4) Secara progresif menghilangkan pembatasan pada akses pasar untuk moda 3 (kehadiran komersial) pada tahun 2015.
 - 5) Menyepakati dan mengimplementasikan beberapa nota saling mengakui (*Mutual Recognition Arrangement*) yaitu MRA untuk jasa arsitektur, jasa akuntansi, kualifikasi survei, praktisi medis pada tahun 2008, dan praktisi gigi tahun 2009.

Dalam rangka pengurangan hambatan di sektor jasa, bentuk paket komitmen AFAS pada setiap putaran perundingan (Mikiz, 2009), sebagai berikut:

1. Putaran 1 berlangsung dari tahun 1996–1998, menyepakati komitmen AFAS paket 1 dan paket 2
2. Putaran II berlangsung dari tahun 1999–2001 menyepakati komitmen AFAS paket 3
3. Komitmen AFAS paket 4 disepakati pada putaran III yang berlangsung dari tahun 2002 – 2004
4. Pada putaran IV pada tahun 2005 – 2007 disepakati 2 paket sekaligus yaitu komitmen AFAS paket 5 dan paket 6.
5. Pada putaran V yang berlangsung dari tahun 2007 – 2009, disepakati komitmen AFAS paket 7. Protokol untuk mengimplementasikan paket 7th Package of AFAS *Commitment* telah ditandatangani pada KTT ASEAN ke-14, tanggal 26 Februari 2009 di Cha-am, Thailand.

Penelitian Terdahulu

Pendekatan *gravity model* digunakan untuk menganalisis perdagangan bilateral suatu negara dengan negara lain. *Analisis gravity model* (O'Chalagan dan Uprasen, 2012) menjelaskan aliran perdagangan bilateral oleh mitra dagang pada *Gross National Product* (GNP) dan jarak geografis antar negara. GDP per kapita negara pengekspor maupun pengimpor umumnya berpengaruh positif pada permintaan impor suatu negara. Menurut Fitzsimons, Hogan dan Neary (1999), meningkatnya GDP per kapita negara pengekspor akan meningkatkan kemampuan produksi negara tersebut, sedangkan meningkatnya GDP per kapita negara pengimpor akan meningkatkan konsumsi negara tersebut, sehingga dengan demikian permintaan untuk impor pun mengalami

peningkatan. Areethamsirikul (2006) juga menggunakan parameter ekonomi GDP dan GDP per kapita untuk meneliti perdagangan intra-ASEAN .

Jarak berpengaruh pada biaya transportasi dalam perdagangan. Jarak yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jarak ekonomi. Variabel jarak ekonomi digunakan oleh beberapa peneliti antara lain Alejandro et al. (2010) yang memasukkan “*a remoteness variables*” untuk mengontrol efek “*relative distance*”, Anderson dan Wincoop (2004) dan Zahidi (2012). Penggunaan jarak ekonomi dalam rumusan model cukup beralasan mengingat jarak geografis antar negara tidak berubah atau konstan. Kondisi ini tidak dapat digunakan dalam melihat faktor jarak terhadap aliran perdagangan, baik ekspor maupun impor jika hanya menggunakan jarak geografis saja, akan tetapi dapat dilihat dari *share* GDP yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi negara (Li dan Zau, 2008).

Walsh (2006) menggunakan *gravity model* untuk menganalisis perdagangan sektor jasa yang meliputi *total service imports, travel service, transport services, government service, dan commercial services* di negara-negara OECD. Penelitiannya menunjukkan variabel GDP per kapita negara pengekspor dan pengimpor serta bahasa adalah variabel yang paling berpengaruh dalam perdagangan impor antar negara. Jarak tidak berpengaruh signifikan terhadap aliran perdagangan.

Variabel lain yang berpengaruh terhadap perdagangan adalah nilai tukar. Menurut Mankiw (2000), nilai tukar riil dapat menunjukkan harga relatif barang di kedua negara. Jika nilai tukar negara pengekspor terhadap negara pengimpor

mengalami peningkatan (depresiasi), maka ekspor negara pengekspor tersebut ke negara pengimpor akan meningkat. Jika nilai tukar negara pengimpor terhadap negara pengekspor mengalami depresiasi, maka akan menurunkan insentif untuk melakukan impor karena harga produk negara pengimpor tersebut lebih kompetitif.

Kualitas pelabuhan merupakan salah satu faktor penting yang menentukan kelancaran pengangkutan barang dan jasa yang akan diperdagangkan. Menurut Wilson, Mann dan Otsuki (2003) perbaikan kualitas pelabuhan secara signifikan berpengaruh positif terhadap perdagangan, baik ekspor maupun impor.

Menurut Barro (1991) dalam Grindle (2007), ketidakstabilan politik dapat menurunkan investasi-investasi produktif, sehingga akan berdampak pula pada penurunan produksi. Situasi politik yang stabil akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif, dan situasi seperti ini merangsang pertumbuhan ekonomi, terbukanya akses untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang produktif, sehingga produksi dapat ditingkatkan (Tarmidi, 2009). Meningkatnya produksi ini lebih lanjut dapat berimplikasi terhadap turunnya impor dan meningkatnya ekspor suatu negara.

Variabel efektivitas pemerintahan berhubungan erat dengan tata kelola

pemerintahan yang baik dan efektif (*good governance*). Menurut Brunetti, Kinsuko dan Weder (1997), efektivitas dan kredibilitas pemerintah berkontribusi positif terhadap perekonomian, terciptanya iklim yang kondusif untuk meningkatkan produksi, mengurangi impor, dan meningkatkan ekspor.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan adalah metode kuantitatif. Analisis regresi data panel dengan *gravity model* digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi volume impor Indonesia melalui moda transportasi laut dari ASEAN+6. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan bantuan *software Microsoft Office Excel dan E-Views 6*.

Dalam ukuran ekonomi, model standar *gravity* menduga perdagangan berdasarkan jarak antar negara dan interaksi antar negara. Dalam tulisan ini digunakan *gravity model* yang dimodifikasi, dimana *volume impor* negara *i* (Indonesia) dari negara *j* (ASEAN+6) diterangkan oleh GDP per kapita riil baik negara pengekspor maupun pengimpor, jarak ekonomi, nilai tukar riil, kualitas pelabuhan, stabilitas politik, dan efektivitas pemerintahan negara pengimpor. Persamaan *gravity model* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$M_{ijt} = \alpha_0 + \beta_1 \text{GDPPC}_{jt} + \beta_2 \text{GDPPCIND}_{it} + \beta_3 \text{JREK}_{ijt} + \beta_4 \text{XRATE}_{ijt} + \beta_5 \text{QOPIND}_{it} + \beta_6 \text{POLSTABIND}_{it} + \beta_7 \text{GOVEFFIND}_{it} + \epsilon_{ijt}$$

dimana:

α_0 = intersep

$\beta_1 - \beta_7$ = koefisien variabel-variabel independen

M_{ijt} = volume impor Indonesia dari ASEAN+6 melalui moda transportasi laut (kg)

GDPPC_{jt} = GDP per kapita riil negara-negara ASEAN+6 (USD)

GDPPCIND_{it} = GDP per kapita riil Indonesia (USD)

QOPIND_{it} = kualitas pelabuhan Indonesia

JREK_{ijt} = jarak ekonomi Indonesia dengan ASEAN+6

POLSTABIND_{it} = stabilitas politik Indonesia

XRATE_{ijt} = nilai tukar riil Indonesia terhadap ASEAN+6 (Rp/Local Currency Unit)

GOVEFFIND_{it} = efektivitas pemerintahan Indonesia

ϵ_{ijt} = error

Data

Data yang digunakan adalah data sekunder, yakni data panel yang berasal dari beberapa sumber. Data panel menggabungkan antara *time series* 2007-2011 serta *cross section* negara-

negara ASEAN+6, terdiri dari Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Australia, India, Jepang, Republik Korea, New Zealand, dan Cina. Data dan sumber data dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Jenis dan Sumber Data Dalam Penelitian

Data	Sumber
Impor	Badan Pusat Statistik
GDP per kapita riil	World Bank
Jarak	CEPII
Nilai tukar, Kualitas Pelabuhan, Stabilitas Politik dan Efektivitas pemerintahan	World Bank

Beberapa variabel yang merupakan hasil kalkulasi dari beberapa data adalah sebagai berikut:

1. Jarak Ekonomi (JREK)

Penggunaan jarak ekonomi menurut Li, Song dan Zau (2008) dibentuk dari persamaan berikut:

$$JREK_{ij} = \text{jarak geografis} * \frac{GDP_j}{total\ GDP_j}$$

2. Nilai Tukar Riil (XRATE)

Nilai tukar yang dapat menunjukkan harga relatif barang di kedua negara yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$XRATE = NER * \text{rasio tingkat harga}$$

Variabel kualitas pelabuhan, stabilitas politik dan efektivitas

pemerintahan merupakan indeks yang diperoleh dari *World Governance Indicator* (World Bank). Kualitas pelabuhan mencakup pengembangan pergudangan, transportasi, pengiriman, penyediaan utilitas dasar, infrastruktur teknologi informasi, dan pengaturan badan-badan administratif terkait dan sistem. Indeks tersebut memiliki skor 1-7, dimana skor 1: berarti infrastruktur pelabuhan sangat buruk, sedangkan skor 7: berarti infrastruktur pelabuhan sangat efisien sesuai dengan standar internasional.

Stabilitas politik menyangkut hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan jabatan politik, pengaturan partai politik, bahkan mencakup masalah terorisme. Suatu negara yang memiliki masalah terkait terorisme maka stabilitas

keamanan dalam negerinya terganggu. Hal ini menurunkan insentif untuk investasi, produksi, dan selanjutnya ekspor dan impor. Dampak lanjutannya adalah penurunan ekspor. Ukuran stabilitas politik memiliki skor antara 0-100, dimana nol merupakan skor terendah (stabilitas politik lemah) dan 100 merupakan skor tertinggi (stabilitas politik kuat).

Efektivitas pemerintahan berkaitan erat dengan *good governance*, yakni menyangkut kepercayaan publik terhadap kompetensi pemerintah dalam mengelola pemerintahan, efisiensi birokrasi, pembuatan kebijakan, dan

kebebasan terhadap tekanan politik. Ukuran efektivitas pemerintahan memiliki skor 0-100, dimana nol merupakan skor terendah (efektivitas pemerintahan lemah) dan 100 merupakan skor tertinggi (efektivitas pemerintahan kuat).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gross Domestic Product (GDP)

Berdasarkan Tabel 3 selama periode tahun 2007-2011, GDP negara-negara ASEAN+6 menunjukkan *trend* yang meningkat. Jepang merupakan negara yang memiliki GDP terbesar sedangkan New Zealand merupakan negara yang memiliki GDP terendah.

Tabel 3. Gross Domestic Product Negara-negara ASEAN+6, 2007-2011 (Juta USD)

Negara	2007	2008	2009	2010	2011
Indonesia	432,217	510,245	539,580	708,027	846,832
Malaysia	193,551	230,988	202,252	246,821	287,937
Filipina	149,360	173,603	168,334	199,589	224,754
Singapura	168,434	166,792	175,935	213,155	239,700
Thailand	246,977	272,578	263,711	318,908	345,672
Australia	850,326	1,052,818	921,972	1,139,201	1,379,382
India	1,238,700	1,224,095	1,361,057	1,684,315	1,847,977
Jepang	4,356,329	4,849,208	5,035,142	5,488,416	5,867,154
Korea,Rep.	1,049,236	931,402	834,060	1,014,890	1,116,247
New Zealand	134,015	130,677	117,376	141,548	159,706
Cina	3,494,056	4,521,827	4,991,256	5,930,529	7,318,499

Sumber: World Bank (2012), diolah

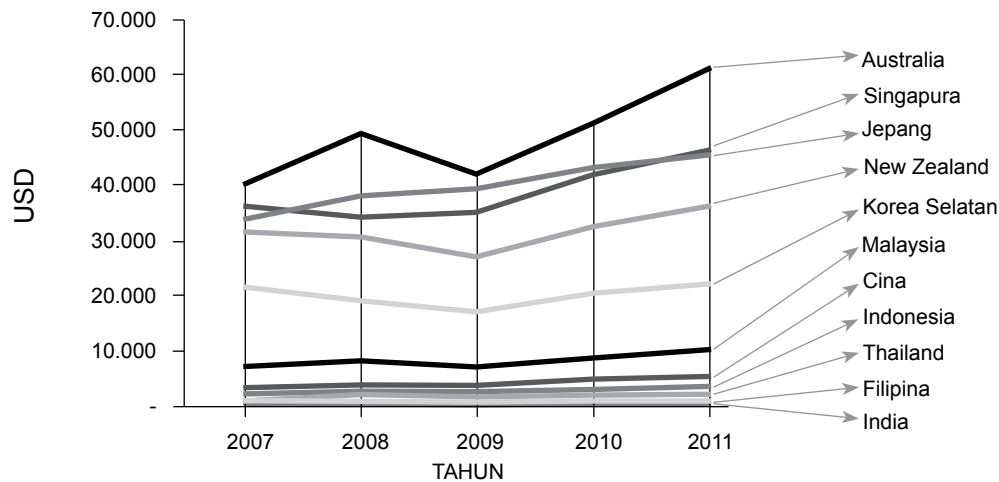
Pada tahun 2008 dan 2009 terjadi penurunan GDP di beberapa negara ASEAN+6. Penurunan GDP tersebut merupakan dampak dari krisis finansial global yang berawal dari Amerika Serikat dengan terjadinya kasus subprime mortgage. Krisis tersebut memberi tekanan kepada perekonomian dunia, termasuk juga kawasan ASEAN.

GDP per Kapita

Dari sisi GDP per kapita terdapat kesenjangan diantara negara-negara ASEAN+6. GDP per kapita tertinggi terjadi di Australia yang pada tahun 2011 mencapai USD 60,979 atau lebih dari 40 kali lipat pendapatan per kapita India yang hanya USD 1,488. Singapura dan Jepang merupakan negara dengan GDP

per kapita tertinggi kedua dan ketiga dengan nilai pada tahun yang sama sebesar USD 46,241 dan USD 45,902.

GDP per kapita masing-masing negara ASEAN+6 selengkapnya disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. GDP Per Kapita Negara-negara ASEAN+6, 2007-2011

Sumber: *World Bank* (2012), diolah

Perkembangan Kualitas Pelabuhan ASEAN+6

Berdasarkan Tabel 4, rata-rata kualitas pelabuhan terbaik dimiliki oleh Singapura dengan nilai 6,79, diikuti

Malaysia dengan skor 5,65, dan New Zealand dengan skor 5,43. Di antara negara-negara ASEAN+6 nilai rata-rata kualitas pelabuhan terendah dimiliki oleh Filipina, yakni sebesar 2.95.

Tabel 4. Kualitas Pelabuhan Negara-negara ASEAN+6, 2007-2011

Negara	2007	2008	2009	2010	2011	Mean
Indonesia	2,66	3,04	3,40	3,62	3,60	3,27
Malaysia	5,72	5,71	5,52	5,58	5,70	5,65
Filipina	2,82	3,16	3,00	2,76	3,00	2,95
Singapura	6,83	6,78	6,78	6,76	6,80	6,79
Thailand	4,65	4,42	4,69	5,03	4,70	4,70
Australia	5,05	4,77	4,65	4,86	5,10	4,89
India	3,49	3,33	3,47	3,86	3,90	3,61
Jepang	5,55	5,22	5,17	5,15	5,20	5,26
Rep Korea	5,51	5,18	5,10	5,46	5,50	5,35
New Zealand	5,43	5,35	5,47	5,42	5,50	5,43
Cina	3,98	4,32	4,28	4,32	4,50	4,28

Sumber: *World Bank* (2012), diolah

Perkembangan Stabilitas Politik ASEAN+6

Singapura merupakan negara yang memiliki rata-rata skor stabilitas politik tertinggi di antara negara-negara

ASEAN+6 lainnya, yakni sebesar 91,6, disusul New Zealand dengan rata-rata skor sebesar 91,4. Stabilitas politik negara-negara ASEAN+6 selengkapnya disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Stabilitas Politik Negara-negara ASEAN+6, 2007-2011

Negara	2007	2008	2009	2010	2011	Mean
Indonesia	13	16	21	20	21	18.2
Malaysia	49	47	43	52	52	48.6
Filipina	8	9	7	8	9	8.2
Singapura	92	96	90	90	90	91.6
Thailand	15	12	12	12	17	13.6
Australia	80	80	73	74	74	76.2
India	13	14	10	11	13	12.2
Jepang	80	74	82	77	79	78.4
Rep. Korea	60	55	51	50	55	54.2
New Zealand	94	90	85	91	97	91.4
Cina	27	28	27	24	25	26.2

Sumber: *Worldwide Governance Indicators* (2012), diolah

Perkembangan Pemerintahan ASEAN+6

Berdasarkan Tabel 6, rata-rata efektivitas pemerintahan tertinggi di negara-negara ASEAN+6 dimiliki oleh

Efektivitas

Singapura dengan skor rata-rata 99,8 persen, disusul New Zealand sebesar 96, Australia sebesar 95,6. Sedangkan, rata-rata efektivitas pemerintahan terendah dimiliki oleh Indonesia, yakni sebesar 46,6.

Tabel 6. Efektivitas Pemerintahan Negara-negara ASEAN+6, 2007-2011

Negara	2007	2008	2009	2010	2011	Mean
Indonesia	13	16	21	20	21	18.2
Malaysia	49	47	43	52	52	48.6
Filipina	8	9	7	8	9	8.2
Singapura	92	96	90	90	90	91.6
Thailand	15	12	12	12	17	13.6
Australia	80	80	73	74	74	76.2
India	13	14	10	11	13	12.2
Jepang	80	74	82	77	79	78.4
Rep. Korea	60	55	51	50	55	54.2
New Zealand	94	90	85	91	97	91.4
Cina	27	28	27	24	25	26.2

Sumber: *Worldwide Governance Indicators* (2012), diolah

Pengaruh Variabel Ekonomi dan Non Ekonomi terhadap Impor Indonesia Melalui Moda Transportasi Laut

Berdasarkan hasil pengujian model uji *Chow*, metode yang terbaik adalah *Fixed Effect Model* (FEM) dengan *General Least Square* (GLS) *weighted*

dengan *cross section weight* dan *white cross section*. Hasil uji normalitas menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,146024, (lebih besar dari taraf nyata 5%) sehingga *residual error* (*error term*) dapat dikatakan terdistribusi normal. Dalam uji kriteria

statistik pelanggaran multikolinearitas, model ini pun disimpulkan tidak mengalami pelanggaran tersebut. Hal ini disebabkan nilai *R-squared* lebih tinggi dari nilai korelasi parsial antar variabel. Sedangkan, untuk masalah heteroskedastisitas, hasil estimasi menunjukkan nilai *sum squared resid weighted* sebesar $2.24E+19$ lebih kecil dari *sum squared resid unweighted* yang nilainya sebesar $3.05E+19$, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Nilai statistik *Durbin-Watson* dari hasil pengolahan data adalah sebesar 1,869176. Hal ini berarti bahwa nilai statistik *Durbin-Watson* tersebut mendekati nilai 2,00 yang berada pada area non-autokorelasi. Hal tersebut mengindikasikan tidak terjadi masalah autokorelasi. Berdasarkan hal-hal tersebut dapat dikatakan hasil estimasi model bersifat *BLUE* (Tabel 7).

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi volume impor Indonesia dari ASEAN+6, estimasi dilakukan terhadap lima puluh unit observasi (data bilateral Indonesia ke 10 negara selama 5 tahun). Hasil estimasi memiliki nilai koefisien determinasi (*R-squared*) sebesar

0,9822. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 98,22% keragaman volume impor Indonesia dari negara-negara ASEAN+6 melalui moda transportasi laut dapat dijelaskan oleh model, sedangkan sisanya 1,78% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model. Nilai probabilitas (*F-statistic*) adalah 0,000000, dimana nilai tersebut lebih kecil dari taraf nyata 5%. Hal ini menunjukkan pada tingkat kepercayaan 95%, variabel GDP per kapita riil negara-negara ASEAN+6, GDP per kapita riil Indonesia, jarak ekonomi, nilai tukar riil, kualitas pelabuhan, stabilitas politik, dan efektivitas pemerintahan Indonesia secara bersama-sama signifikan mempengaruhi volume impor Indonesia dari negara-negara ASEAN+6. Hasil uji-t menunjukkan variabel GDP per kapita riil Indonesia, jarak ekonomi, nilai tukar riil, kualitas pelabuhan Indonesia, stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan Indonesia secara parsial signifikan mempengaruhi volume impor Indonesia dengan tingkat taraf nyata 5%. Variabel GDP per kapita riil negara-negara ASEAN+6 tidak signifikan mempengaruhi volume impor Indonesia dari negara-negara ASEAN+6.

Tabel 7. Hasil Estimasi Data Panel dengan Pendekatan FEM

Variabel	Koefisien	Elastisitas	t-statistik	Prob.
GDPPC	230391.2	0.53	0.876492	0.3871
GDPPCIND	26467080	4.83	20.48284	0.0000**
JREK	-2448863	-0.34	-8.316954	0.0000**
XRATE	-1012171	-0.53	-3.441512	0.0016**
QOPIND	9.93E+08	0.54	9.333500	0.0000**
POLSTABIND	-3.60E+08	-1.09	-16.65959	0.0000**
GOVEFFIND	-4.10E+08	-3.17	-18.83566	0.0000**
C	1.38E+09		0.406206	0.6872
<i>Cross-Section Effects</i>				
Malaysia				3.67E+09
Filipina				-6.48E+09
Singapura				6.99E+09
Thailand				-2.08E+09
Australia				8.03E+09
India				-2.41E+09
Japan				-1.09E+10
Korea, Rep.				-4.08E+09
New Zealand				4.41E+08
Cina				6.85E+09
		<i>R-squared</i>		0.982200
		<i>Adjusted R-squared</i>		0.973569
		<i>Prob (F-statistic)</i>		0.000000
		<i>Durbin-Watson stat</i>		1.869176
		<i>Sum squared resid weighted</i>		2.24E+19
		<i>Sum squared resid unweighted</i>		3.05E+19
		<i>Prob Jarque-Bera</i>		0.146024

Keterangan: **signifikan pada taraf nyata 5%

Variabel GDP per kapita riil negara-negara ASEAN+6 dalam hasil estimasi ditemukan tidak signifikannya pengaruh negara-negara ASEAN+6 tersebut terhadap volume impor Indonesia. Hal ini disebabkan faktor penentu yang berpengaruh sangat kuat terhadap impor Indonesia adalah GDP per kapita Indonesia sendiri sebagai negara pengimpor. Menurut Fitzsimons et al. (1999), peningkatan GDP per kapita negara pengimpor akan meningkatkan konsumsi negara tersebut sehingga permintaan untuk impor pun mengalami peningkatan.

Variabel GDP per kapita riil Indonesia dalam hasil estimasi secara signifikan berpengaruh positif dan memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0000. Dengan meningkatnya GDP per kapita riil Indonesia sebesar 1%, peningkatan tersebut akan memperbesar volume impor Indonesia dari negara-negara ASEAN+6 sebesar 4,83%, ceteris paribus. GDP per kapita riil menunjukkan kemampuan agregat suatu negara. Oleh sebab itu, semakin besar pendapatan agregat suatu negara, maka semakin tinggi kemampuan untuk mengimpor.

Variabel jarak ekonomi signifikan berpengaruh negatif dan memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0000. Hal ini menunjukkan bahwa variabel jarak ekonomi berpengaruh nyata terhadap volume impor Indonesia dari negara-negara ASEAN+6. Peningkatan jarak ekonomi sebesar 1% akan menurunkan volume impor Indonesia dari negara-negara ASEAN+6 sebesar 0,34%, ceteris paribus. Hal ini berarti bahwa semakin jauh jarak ekonomi, maka perdagangan akan membutuhkan biaya yang lebih besar. Jarak ekonomi berhubungan erat dengan biaya transportasi. Biaya transportasi akan menyebabkan penurunan volume perdagangan, baik ekspor maupun impor (Salvatore, 1997).

Variabel nilai tukar riil (Rp/mata uang negara-negara ASEAN+6) signifikan berpengaruh negatif terhadap volume impor Indonesia dari negara-negara ASEAN+6 dan menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,0016. Hal ini menunjukkan bahwa variabel nilai tukar riil berpengaruh nyata terhadap volume impor Indonesia dari negara-negara ASEAN+6. Meningkatnya nilai tukar riil sebesar 1% akan menurunkan volume impor Indonesia dari negara-negara ASEAN+6 sebesar 0,53%, ceteris paribus. Adanya depresiasi rupiah terhadap mata uang negara-negara ASEAN+6 membuat harga domestik lebih kompetitif dibandingkan dengan harga barang impor di pasar nasional sehingga akan menurunkan insentif untuk melakukan impor.

Variabel kualitas pelabuhan Indonesia dalam hasil estimasi memiliki pengaruh positif dan memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0000. Meningkatnya kualitas pelabuhan

Indonesia sebesar 1% akan meningkatkan volume impor Indonesia dari negara-negara ASEAN+6 sebesar 0,54%, ceteris paribus. Wilson, Mann dan Otsuki (2005) menjadikan variabel kualitas pelabuhan sebagai proksi dari efisiensi pelabuhan yang berhubungan dengan infrastruktur sehingga memungkinkan penanganan volume perdagangan yang lebih besar. Kualitas pelabuhan yang digunakan dalam penelitian ini menurut *World Governance Indicator* yang dipublikasikan *World Bank* mencakup pengembangan pergudangan, transportasi, pengiriman dan infrastruktur teknologi informasi, penyediaan utilitas dasar seperti air dan listrik, serta badan-badan administratif terkait dan sistem. Menurut Wilson, Mann dan Otsuki (2003), peningkatan kualitas pelabuhan secara signifikan berpengaruh positif terhadap perdagangan, baik ekspor maupun impor.

Variabel stabilitas politik Indonesia memiliki pengaruh negatif terhadap volume impor Indonesia dari negara-negara ASEAN+6. Situasi politik yang stabil akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif dan aman yang merangsang pertumbuhan dan menyediakan akses untuk kesempatan berusaha bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang produktif (Tarmidi, 2009). Untuk kasus di Indonesia, pemberantasan kasus penyalahgunaan jabatan politik, pengaturan lembaga dan partai politik, bahkan penanganan masalah terorisme berdampak pada kestabilan politik sehingga menciptakan iklim kondusif dan memberikan insentif untuk memproduksi barang dan jasa. Impor dengan demikian akan berkurang. Hal ini menjelaskan

hubungan negative antara stabilitas politik Indonesia terhadap volume impor Indonesia. Efektivitas pemerintahan Indonesia memiliki pengaruh negatif dan memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0000. Dengan meningkatnya efektivitas pemerintahan Indonesia sebesar 1% akan menurunkan volume impor Indonesia dari negara-negara ASEAN+6 sebesar 3,17%, ceteris paribus.

Tata kelola pemerintah yang baik dan efektif seringkali disebut *good governance*. Dimensi-dimensi dari *good governance* sangat luas, bukan hanya terbatas pada pemberantasan korupsi, melainkan menyangkut juga kepercayaan publik terhadap kompetensi pemerintah dalam mengelola pemerintahan, efisiensi birokrasi, pembuatan kebijakan, pencapaian stabilitas keamanan, penegakan hukum, serta pengelolaan sumber daya ekonomi secara efektif, transparan, dan akuntabel. Menurut Brunetti, Kinsuko dan Weder (1997) pengelolaan pemerintahan yang efektif dan berkompetensi dapat mendorong perekonomian secara optimal sebagai imbas dari terciptanya iklim yang kondusif bagi investasi-investasi produktif. Peningkatan produksi suatu negara dapat mengurangi impor dan meningkatkan ekspor.

Dari hasil estimasi *cross section effects* pada Tabel 7, efek individu pada data *cross section* dengan nilai paling tinggi adalah Australia, berarti volume impor Indonesia dari Australia memiliki rata-rata perubahan yang paling tinggi sebesar 8.03E+09, disusul Singapura, Cina, dan Malaysia. Sesuai teori permintaan, salah satu faktor yang mempengaruhi impor yang tidak diobservasi dalam tulisan ini adalah selera.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan hasil estimasi, variabel GDP per kapita riil Indonesia dan kualitas pelabuhan Indonesia secara signifikan berpengaruh positif terhadap volume impor Indonesia. Sementara, jarak ekonomi, nilai tukar riil, stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan Indonesia secara signifikan berpengaruh negatif terhadap volume impor Indonesia. Sedangkan variabel GDP per kapita riil negara-negara ASEAN+6 ditemukan tidak signifikan mempengaruhi volume impor Indonesia dari negara-negara tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa hal yang dapat disarankan yaitu rata-rata indeks kualitas pelabuhan Indonesia masih tergolong rendah di bawah Singapura, Malaysia, bahkan Thailand. Implikasinya, Indonesia perlu meningkatkan dan memperbaiki kualitas pelabuhannya, mencakup pengembangan pergudangan, transportasi, pengiriman, penyediaan utilitas dasar, infrastruktur teknologi informasi, dan badan-badan administratif terkait dan sistem. Bila tidak, hal-hal tersebut akan mempengaruhi waktu pelayanan yang pada akhirnya mempengaruhi biaya impor. Insentif pemerintah kepada swasta diperlukan juga agar swasta ikut berperan lebih aktif. Salah satu bentuk insentif tersebut, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, yang menegaskan penghapusan monopoli sektor negara atas pelabuhan dan membuka peluang untuk partisipasi baru sektor swasta. Insentif tersebut bermaksud menumbuhkan persaingan yang sehat, turunnya biaya jasa, dan meningkatkan pelayanan pelabuhan.

Tindakan hukum berkaitan penyalahgunaan jabatan politik, pengaturan lembaga dan partai politik, bahkan penanganan masalah terorisme, merupakan faktor-faktor yang menjamin kestabilan politik di Indonesia. Situasi politik yang stabil dan penyediaan akses untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang produktif, akan mendorong meningkatnya produksi dan dengan demikian impor dapat dikurangi.

Indonesia perlu meningkatkan efektivitas pelayanan birokrasi. Birokrasi yang efisien menjamin kelancaran arus barang ekspor dan impor. Selama ini pengurusan pergerakan barang dan dokumen di pelabuhan berbasis transaksi, akibat dari belum adanya pelayanan jasa logistik yang terpadu antara badan pengatur pelabuhan, perusahaan pelabuhan, pengguna jasa pelabuhan, karantina, dan kepabeanan. Dampaknya, sistem administrasi berbelit-belit.

DAFTAR PUSTAKA

- Alejandro, L, *et al.* (2010). Are Estimation Techniques Neutral to Estimate Gravity Equation? An Application to The Impact of EMU on Third Countries Exports. Washington D.C.: U.S. International Trade Commission.
- Anderson J.E, E.V Wincoop. (2004). Trade Cost. *Journal of Economic Literature*. American Economic Association. 42: 691-751.
- Areethamsirikul, S. (2006). The Impact of ASEAN Enlargement Intra-ASEAN Trade: Gravity Mode Approach. *The Indonesian Quarterly*. 34(2): 176-192.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2012a). *Statistik Indonesia*. Jakarta (ID): BPS.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2012b). *Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Impor*, Berbagai Edisi. Jakarta (ID): BPS.
- Brunetti A, G. Kinsuko, B. Weder. (1997). Institutional Obstacle to Doing Business: Region by Region Result from a Worldwide Survey of the Private Sector. *Working Paper* No. 1759.
- O'Chalagan, B. A., and U. Uprasen, (2012). A Qualitative Analysis of the Impact of the Fifth Enlargement on ASEAN. *ASEAN Economic Bulletin*, Volume 29, No.1 pp 46-64
- Centre d'Etudes Prospectives et d'Informations Internationales (CEPII). (2012). Diunduh tanggal 2 Mei 2013 dari [<http://cepii.fr/>]
- Fitzsimons, E., V. Hogan, and P. Neary. (1999). Explaining the Volume of North-South Trade in Ireland: A Gravity Model Approach. *Economic and Social Review*. 30(4): 381-401.
- Grindle, M.S. (2007). Good Enough Governance Revisited. *Development Policy Review*. 25(5): 553-574.
- Hummels, D. (2007). Transportation Cost and International Trade in The Second Era of Globalization. *Journal of Economics Perspective*. 21: 131-154.
- Li, K., L. Song, and X. Zhau. (2008). *Component Trade and China's Global Economics Integration*. United Kingdom: United Nations University.
- Mankiw, N.G. (2000). Teori Makroekonomi. Edisi ke-5. Jakarta (ID): Erlangga. Terjemahan dari *Principles of Macroeconomics* oleh Imam N.
- Mikiz, M. 2009. Liberalizing Trade in Services in ASEAN. UN ESCAP.
- Panggabean, G. (2013). *Ekonomi Biaya Tinggi pada Sektor Logistik di Pelabuhan Belawan Medan*. Jakarta: KPPU.
- Salvatore, D. (1997). *Ekonomi Internasional*. Jakarta (ID): Erlangga. Terjemahan dari *International Economics* oleh Haris M.
- Tarmidi, D. (2009). *Aspek Politik dan Pemerintahan dalam Pemulihan*

- Ekonomi Indonesia*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (2012). *Review of Maritime Transport 20*. UNCTAD: Geneva.
- Walsh, K. (2006). *Trade in Service: Does Gravity Hold? A Gravity Model Approach to Estimating Barriers to Services Trade*. Dublin: Dublin City University.
- Wilson, J.S., C. Mann, and T. Otsuki. (2003). Trade Facilitation and Economic Development: A New Approach to Quantifying the Impact. *The World Bank Review*. 17: 367-389.
- Wilson, J.S., C. Mann, and T. Otsuki. (2005). Assessing the Benefits of Trade Facilitation: A Global Perspective. *The World Economy*. 28: 841-871.
- World Bank. (2012). World Development Indicators [Internet]. Diunduh tanggal 10 Mei 2013 dari [<http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators>]
- Worldwide Governance Indicators (WGI). (2012). Diunduh tanggal 8 Mei 2013 dari [<http://www.wgi.org>].
- Zahidi, A. (2012). Dampak Trade Facilitation terhadap Arus Perdagangan di Kawasan ASEAN+3. Bogor: IPB.